

**PENGARUH CINA TERHADAP INTENSITAS SENGKETA
PERAIRAN INDUS INDIA-PAKISTAN TAHUN 2008-2014**

SKRIPSI



Disusun oleh

EKA DEWI AGUSTININGSIH

NIM 071012083

PROGRAM STUDI SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Semester Genap 2013/2014

**PENGARUH CINA TERHADAP INTENSITAS SENGKETA
PERAIRAN INDUS INDIA-PAKISTAN TAHUN 2008-2014**

SKRIPSI

Maksud: sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga.



Disusun oleh

EKA DEWI AGUSTININGSIH

NIM 071012083

**PROGRAM STUDI SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Genap 2013/2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**“Pengaruh Cina Terhadap Intensitas Sengketa Perairan Indus India-
Pakistan tahun 2008-2014”**

Disusun oleh:

Eka Dewi Agustiningsih
071012083

Disetujui untuk diajukan pada
Ujian Akhir Skripsi
Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014

Surabaya, 7 Juli 2014
Dosen Pembimbing,

Irfa Puspitasari, S.IP, MA
NIP. 19850325 201012 2 002

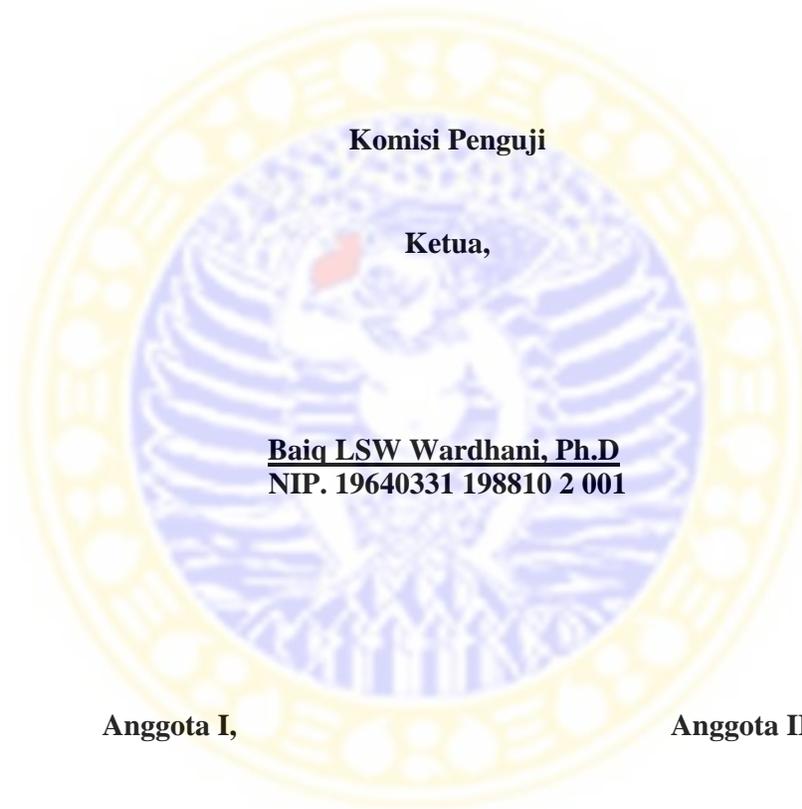
Mengetahui,

Ketua Departemen Hubungan Internasional

M. Muttaqien, S.IP, MA, Ph.D
NIP. 19730130 199903 1 001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji
pada hari Kamis, 21 Juli 2014, pukul 07.30 WIB
di Ruang Sidang Cakra Buana Catur Matra, Gedung C
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Surabaya



Komisi Penguji

Ketua,

Baiq LSW Wardhani, Ph.D
NIP. 19640331 198810 2 001

Anggota I,

Anggota II,

Citra Hennida, M.A (IR)
NIP. 19791025 200604 2 001

I Gede Wahyu Wicaksana, Ph.D
NIP. 19790602 200710 1 001

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi berjudul:

**“Pengaruh Cina Terhadap Intensitas Sengketa Perairan Indus India-
Pakistan tahun 2008-2014”**

ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi skripsi.

Surabaya, Agustus 2014

Eka Dewi Agustiningasih

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Yang Pertama dan Terkasih Mama dan Nenek
terimakasih atas segala doa, perhatian, dukungan, dan
perjuangannya,

Untuk adikku yang manja setiap hari berharap bisa bermain
terus dan belajar seru dirumah

serta untuk Ayah.

Spesial untuk almarhum kakek, terimakasih atas doanya selama
hidupnya, semoga engkau mendapat tempat yang terang dan
baik disisi ALLAH SWT_Amin Ya Rabbal Alamiin

Mungkin untuk orang yang dekat atau yang sedang jauh disana

L ove you as always and forever...

Dewi
(Dew_dew)

HALAMAN INSPIRASIONAL

“... wa qaluu hasbunallahu wa ni'mal wakiil”
Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik
Pelindung (Q.S Al-Imran:173)

“... Huwa Khairun tsawabaw wa khairun 'uqba”
Dia sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan
(Q.S Al-Kahfi:44)

“Fainna ma'al 'usri yusra”
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(Q.S Al-Insyirah:5)

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow”
(Albert Einstein)

No Mirror can reflect a picture of a Human as Best as his Attitude and
Way of Speaking do

(Hazrat Ali (R:A))

“How something appears is always a matter of perspective”

(Unknown)

“If you change the way you look at things, the things you look at change”

(Wayne Dyer)

“Watch your thoughts they become words, watch your
words they become actions, watch your actions they become
habits, watch your habits they become character, watch your
character it become your destiny”

(Lao Tzu)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kasih sayang NYA dalam melancarkan dan memudahkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu. Hanya ridhonya, harapan peneliti dan orang tua proses penyelesaian dan hasil skripsi dapat terwujud sesuai harapan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing peneliti dalam menjalani tingkat kehidupan selanjutnya sehingga dapat mendewasakan diri sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Penyusunan skripsi ini bermula dari ketertarikan peneliti terhadap isu-isu lingkungan. Dalam proses mencari topik dan perumusan masalah yang problematis dengan bimbingan dari Mbak Irfa Puspitasari selaku dosen pembimbing. Pada akhirnya peneliti telah menetapkan melakukan penelitian mengenai intensitas sengketa perairan Indus antara India dan Pakistan dengan masuknya Cina sebagai aktor eksternal. Banyak tantangan dan hambatan yang peneliti alami antara lain kurangnya ketersediaan data yang relevan dan akurat sehingga peneliti harus mengkonstruksikan dan menggabungkan berbagai data yang terpisah menjadi suatu kesatuan data sedemikian rupa berdasarkan kerangka teoritis untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah disusun. Alhamdulillah dengan segala usaha, semangat, dan doa peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang memuaskan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan dan dorongan dari orang-orang terdekat. Oleh karenanya peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang pertama kepada Mama, Nenek, Adikku, Ayah, dan Almarhum Kakek beserta segenap keluarga besar lainnya atas dukungan baik melalui tindakan dan doa selama ini. Kedua, peneliti juga menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada mbak Irfa atas segala kontribusinya yang ikhlas bersabar dalam membimbing dan memahami saya (terutama waktu saya sakit). Kemudian untuk para dosen penguji praskripsi dan skripsi yang memberi banyak masukan dalam membantu penyempurnaan susunan skripsi ini: Pak Ajar, Mak Citra, Mas Wahyu, dan Ibu Ani. Serta segenap dosen pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional (Pak Muttaqien, Pak Basis, Pak Dugis, Pak Wahyudi, Bu Lilik, Bu Sartika selaku Dosen Wali, Mas Safril, Mas Joko, Mas Ari, dll) yang

telah berbagi ilmu selama peneliti menempuh pendidikan. Untuk teman-teman "seperjuangan" HI 2010, khususnya kelompok yang mengklaim kaum "proletar (marchaenism)" Srivi (berkenan mendengarkan segala curhat dan curcol ku), Nurul, Tyas, dan Iva terima kasih telah memperkenankan peneliti untuk makan dan tidur di kos kalian. Untuk Mbak Asha yang beberapa waktu terakhir mau menemani, menasehati, dan menyemangati untuk terus maju_ aku doa'in supaya mami nanti lancar skripsinya. Temen yang lainnya, maaf sekali jika belum disebut, karena tidak mungkin cukup untuk menulis nama dan kebaikan kalian selama ini, semoga Allah selalu menyayangi kalian. Tak lupa juga, untuk teman teman KKN Jrebeng'ers (Mami Gracia, Abi Faisal, Bunda Dinda, Umi Chyntia, Mama Ntang, Mbok Tar, Harris, Mas Adi, dan Chikara) yang telah menjadi saudara sampai sekarang (walaupun kita bertemu sebentar namun rasa kebersamaan itu tetap melekat) alhamdulillah atas kebaikan, doa, dan semangat kebersamaan kalian aku berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik, semoga kalian yang belum lulus akan segera menyusul selamat berjuang dan sukses selalu. Teman-teman SMA gank "IDEM" Ita, Eke, Maya, Ratri (pendatang baru yang *so wise*) terima kasih atas semua saran kalian selama ini sehingga bisa membuatku bisa tetap berjilbab dan mengenal Islam lebih dalam, sukses untuk kita semua. Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya para penstudi Hubungan Internasional.

Surabaya, Juli 2014

Dewi
(Dew_dew)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN INSPIRATORIAL	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PETA	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Kerangka Pemikiran	8
I.4.1 <i>Hydro-hegemony</i>	8
I.4.2 <i>Hydropolitical Complexes</i>	12
I.4.3 Teori Rasionalitas Air	14
I.5 Sintesis Teori	15
I.6 Hipotesis	16
I.7 Metodologi Penelitian	17
1.7.1 Operasionalisasi Konsep dan Variabel	17
1.7.1.1 Kekuatan Asimetris	17
1.7.1.2 Keterlibatan Aktor Eksternal	18
1.7.1.3 Intensitas Konflikual	19
1.7.1.4 Intensitas Kerjasama	20
1.7.2 Tipe Penelitian	22
1.7.3 Jangkauan Penelitian	22
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	23
1.7.5 Teknik Analisis Data	23
1.7.6 Sistematika Penulisan	24

BAB II. ASIMETRIS KEKUATAN RIPARIAN INDUS DAN KETERLIBATAN CINA

II.1 Kekuatan Asimetris Antara Riparian Sungai Indus	26
II.1.1 Posisi Riparian	27
II.1.2 Tiga Dimensi Kekuatan	30
II.1.3 Potensi Eksploitasi	38
II.2 Latar Belakang Keterlibatan Cina dalam Pembangunan Proyek Air Pakistan	39
II.3 Pengaruh Keterlibatan Cina dalam Meningkatkan Posisi Tawar Pakistan	48

II.3.1 Volume Perdagangan dan Bantuan Cina terhadap Pakistan ...	48
II.3.2 Perkembangan Infrastruktur Proyek Air di Pakistan	54

BAB III. PERUBAHAN INTENSITAS KONFLIKTUAL DAN INTENSITAS KERJASAMA ANTARA INDIA DAN PAKISTAN

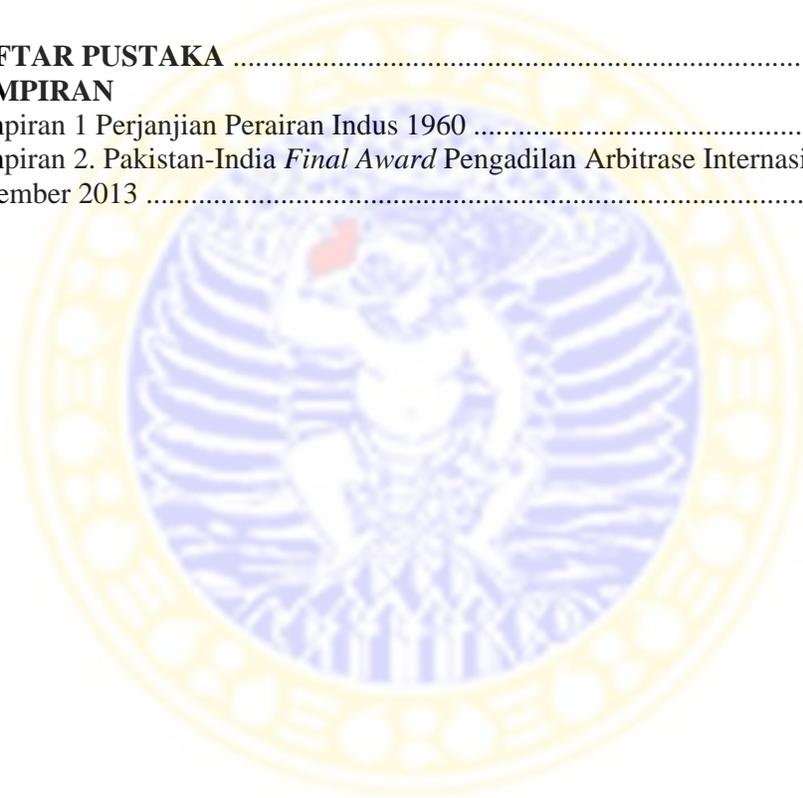
III.1 Peristiwa dan Interaksi antara India-Pakistan tahun 2008-2014 .	
III.1.1 Intensitas Konflikual.....	64
III.1.2 Intensitas Kerjasama	67
III.2 Peristiwa dan Interaksi antara India Pakistan tahun 2001-2007	
III.2.1 Intensitas Konflikual	77
III.2.2 Intensitas Kerjasama	81

BAB IV. KESIMPULAN 90

DAFTAR PUSTAKA xiv

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Perairan Indus 1960	xxix
Lampiran 2. Pakistan-India <i>Final Award</i> Pengadilan Arbitrase Internasional 20 Desember 2013	xli



DAFTAR PETA

Peta 1.1	Perairan Indus	2
----------	----------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proyek-Proyek PLTA Besar di Pakistan	55
------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ketentuan Penggunaan Hidroelektrik (PLTA)	3
Tabel 1.2	Pilar Hidro-hegemon	9
Tabel 1.3	Skala Intensitas Konflik Air	9
Tabel 1.4	Strategi Kontrol Sumber Daya Air	10
Tabel 1.5	Jenis-Jenis Pemicu Konflik dan Dampaknya	13
Tabel 1.6	Tiga Dimensi Kekuasaan	17
Tabel 1.7	Indikator Skala Intensitas Konfliktual	20
Tabel 1.8	Indikator Skala Intensitas Kerjasama	21
Tabel 2.1	Kekuatan Militer Negara-Negara di Asia Selatan	32
Tabel 2.2	Persepsi India dan Pakistan	37
Tabel 2.3	Investasi Cina pada Proyek PLTA Pakistan	58
Tabel 3.1	Tabel Perbandingan Intensitas Konfliktual	84
Tabel 3.2	Tabel Perbandingan Intensitas Kerjasama	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pembagian Air Berdasarkan Perjanjian Sungai Indus 1960	28
Grafik 2.2	Perbandingan PDB India dan Pakistan	30
Grafik 2.3	Jumlah Ekspor dan Impor Pakistan ke Cina	49
Grafik 2.4	Total Volume Dagang Cina-Pakistan	53
Grafik 3.1	Perdagangan Bilateral India-Pakistan	72

ABSTRAK

Penyelesaian permasalahan pembagian dan penggunaan bersama Perairan Indus yang terletak diantara negara India dan Pakistan telah terwujud dalam *Indus Water Treaty* 1960. Peningkatan isu sengketa penggunaan Perairan Indus dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim, peningkatan populasi penduduk, dan peningkatan aktifitas produksi agrikultural menyebabkan peningkatan permintaan air bagi kedua negara. Sebagai hegemon regional yang berada pada posisi hulu, segala tindakan India sangat mempengaruhi dan menentukan pola interaksi antar riparian yang berdampak pada perubahan intensitas sengketa. Namun keadaan kekuatan asimetris antar riparian selalu bersifat dinamis. Sebagai negara riparian lemah, Pakistan dapat meningkatkan posisi tawarnya melalui keterlibatan aktor eksternal dalam membantu penyediaan dana alternatif untuk membantu pengembangan infrastruktur proyek air Pakistan. Hal tersebut ternyata dapat mengubah dinamika internal posisi tawar Pakistan yang berdampak pada peningkatan kerjasama antara India-Pakistan dalam sengketa perairan Indus yang berada pada situasi kompleksitas hidropolitik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *hydropolitical security complex*, *hydro-hegemony*, dan *water rationality theory* dalam menjelaskan hubungan antara pengaruh dukungan aktor eksternal terhadap intensitas sengketa antara India dan Pakistan pada tahun 2008 hingga 2014. Sehingga tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe kausal eksplanatif, dengan intensitas sengketa India dan Pakistan sebagai variabel dependen dan keterlibatan Cina sebagai variabel independen.

Kata-kata Kunci: *Indus Water Treaty*, *hydro-hegemon*, kekuatan asimetris, intensitas sengketa, intensitas kerjasama, keterlibatan aktor eksternal.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

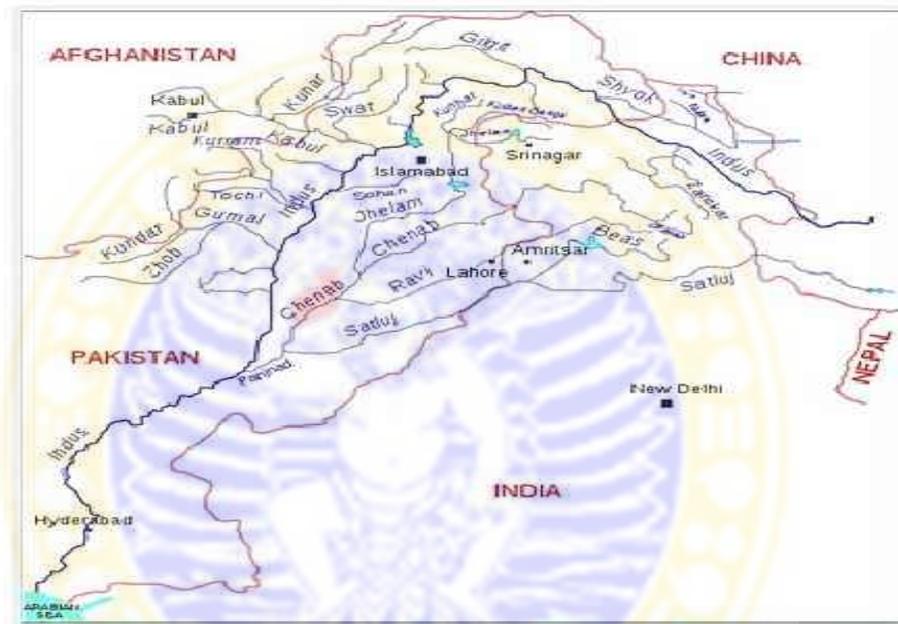
Sengketa perairan Indus telah ada sejak abad 19 dalam sub-kontinen India yang diselesaikan oleh Pemerintah Inggris melalui arbitrase Komisi Anderson tahun 1935. Sengketa tersebut terulang kembali karena peningkatan permintaan air untuk irigasi yang dapat diselesaikan oleh Komisi Rao tahun 1942.¹ Sengketa antara kedua negara muncul kembali pada 1 April 1948 ketika India menghentikan semua saluran irigasi Pakistan sebesar 1,6 juta hektar yang melalui perbatasan India-Pakistan. Selain itu, India menuntut agar Pakistan mengakui klaim India atas hak milik perairan Punjab, India. Peperangan hampir terjadi ketika India menolak proposal yang diajukan Pakistan mengenai permintaan arbitrase netral.

Pemicu munculnya ide pembagian penggunaan tiga sungai sebelah timur untuk India dan tiga sungai sebelah barat untuk Pakistan yaitu berasal dari proposal yang ditolak oleh kedua negara pada tahun 1952. India harus menyediakan dana untuk membangun kanal dan bendungan untuk mengganti persediaan air keperluan irigasi dari sungai sebelah timur, namun India menolak untuk membayar pembangunan bendungan. Hingga akhirnya manajemen sengketa perairan Indus antara India dan Pakistan terselesaikan dengan bantuan mediator

¹ S. Barret, "Conflict and Cooperation in Managing International Water Resources", CSERGE (Working Paper London Business School and Centre for Social and Economic Research on the Global Environment University College London and University of East Anglia, 1994)

W.A.B Illif, Bank Dunia yang tertuang dalam *Indus Water Treaty* 1960. Esensi dasar perjanjian tersebut adalah pembagian penggunaan air yakni aliran sungai sebelah barat (Indus, Jehlum, dan Chenab) menjadi bagian Pakistan, sedangkan aliran sungai sebelah timur (Ravi, Beas, dan Suttlej) menjadi bagian India.²

Peta 1.1 Perairan Indus



Jarayam, Dhanasree “Environmental Change and Ripples for Water Security in Southern Asia”, NTS Alert (Juli 2012): 4. http://www.rsis.edu.sg/nts/HTML-Newsletter/Alert/pdf/NTS_Alert_jul_1201.pdf (diakses pada 3 Januari 2014).

Perdebatan yang sering muncul dalam sengketa perairan Indus setelah terbentuknya perjanjian diatas adalah mengenai alokasi air yang terkait dengan pembangunan bendungan yang dapat mengurangi pasokan air kepada salah satu riparian. Dalam *Indus Water Treaty* 1960 terdapat beberapa kategori penggunaan air antara lain penggunaan domestik, penggunaan non-konsumtif, penggunaan

²IDSA, “Water Security For India: The External Dynamics” Task Force Report, (2010):40, http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/book_WaterSecurity.pdf (diakses pada 9 September 2013).

agrikultural, dan penggunaan hidro-elektrik (PLTA).³ Pada pasal tambahan C pasal III 2d ayat 9 melegalkan adanya penggunaan agrikultural dan penggunaan hidro-elektrik (PLTA) bagi Pakistan di setiap tributari Jhelum dan apabila ada penggunaan agrikultural oleh India maka tidak boleh mempengaruhi kapasitas aliran air di setiap tributari Sungai Jhelum yang terdapat penggunaan agrikultural dan penggunaan hidro-elektrik (PLTA) oleh Pakistan.⁴ Ketentuan lainnya yang melegalkan kedua pihak membangun bendungan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Ketentuan Penggunaan hidroelektrik (PLTA)

ARTICLE III Provisions Regarding Western Rivers	ANNEXURE C—AGRICULTURAL USE BY INDIA FROM THE WESTERN RIVERS (Article III (2)(c))	ANNEXURE D—GENERATION OF HYDRO-ELECTRIC POWER BY INDIA ON THE WESTERN RIVERS (ARTICLE III (2)(d))
<p>(1) Pakistan shall receive for unrestricted use all those waters of the Western Rivers which India is under obligation to let flow under the provisions of Paragraph (2).</p> <p>(2) India shall be under an obligation to let flow all the waters of the Western Rivers, and shall not permit any interference with these waters, except for the following uses, restricted (except as provided in item (c)(i) of Paragraph 5 of Annexure C) in the case of each of the rivers. The Indus, The Jhelum and The Chenab, to the drainage basin thereof:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Domestic Use; (b) Non-Consumptive Use; (c) Agricultural Use, as set out in Annexure C; and (d) Generation of hydro-electric power, as set out in Annexure D. 	<p>8. On those Tributaries of The Jhelum on which there is any Agricultural Use or hydro-electric use by Pakistan any new Agricultural Use by India shall be so made as not to affect adversely the then existing Agricultural Use or hydro-electric use by Pakistan on those Tributaries.</p>	<p>Part 3—New Run-of-River Plants 15</p> <p>(iii) where a Plant is located on a Tributary of The Jhelum on which Pakistan has any Agricultural Use or hydro-electric use, the water released below the Plant may be delivered, if necessary, into another Tributary but only to the extent that the then existing Agricultural Use or hydro-electric use by Pakistan on the former Tributary would not be adversely affected.</p>

Indus Water Treaty, 1960,
<http://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/223497-1105737253588/IndusWatersTreaty1960.pdf>. (Diakses pada 9 September 2013)

³ Penggunaan agrikultural meliputi irigasi; Penggunaan domestik meliputi sanitasi, rekreasi, kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri; Penggunaan non-konsumtif meliputi navigasi, jasa transportasi barang, kontrol banjir, kegiatan profit lainnya; Penggunaan hidro-elektrik meliputi pembangunan dam untuk PLTA.

⁴ Indus Water Treaty, 1960,
<http://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/223497-1105737253588/IndusWatersTreaty1960.pdf>. (Diakses pada 9 September 2013)

Peningkatan permintaan energi air untuk produktifitas ekonomi dan sosial serta dampak perubahan iklim, mendorong India membangun banyak bendungan pada sungai sebelah barat. Pembangunan proyek bendungan India pada sungai sebelah barat banyak menuai perdebatan dari pihak Pakistan salah satunya adalah proyek Kishanganga 330 MW. Proyek Kishanganga merupakan proyek PLTA pengalihan air yang mengalirkan air dari Sungai Kishanganga (Sungai Neelum di Pakistan) melalui saluran sepanjang 24 km untuk memproduksi tenaga hingga aliran air tersebut bergabung dalam Wullar Barrage melalui Sungai Jhelum dekat Muzaffarabad hingga menuju wilayah kependudukan India di Kashmir. Pengalihan air tersebut tidak sesuai dengan pasal tambahan D ayat 15 (3) yang tidak mengizinkan adanya pengalihan air dalam cabang tributari sungai yang terdapat penggunaan agrikultural dan hidro-elektrik Pakistan.⁵

Selain itu, berdasarkan pendapat Menteri Sumber Daya dan Minyak Khaqan Abbasi atas nama Menteri Air dan Tenaga mengatakan kepada senat bahwa proyek Kishanganga akan mengurangi aliran air pada sungai Neelum sebesar 21 persen⁶ dan berdampak langsung pada kurangnya penghasilan energi listrik proyek Neelum-Jhelum 969MW sebesar 13 persen atau setara dengan 700 juta unit listrik.⁷ Proyek Neelum-Jhelum menjadi proyek strategis bagi Pakistan selain untuk mengembangkan infrastruktur di wilayah PoK (*Pakistan occupied Kashmir*), digunakan pula untuk memperoleh pasokan air dari wilayah PoK

⁵ Pasal tambahan D ayat 15 (iii) pada tabel 1.1.

⁶ Syeh Jamait Ali Shah dalam ISSRA, " Water Security Dilemma:Revisiting the Efficacy of Indus Water Treaty", (Margalla Papers, Vol. XV, Issue I, 2011):11, http://www.ndu.edu.pk/issra_pub/Margalla_Papers_Special_Edition_2011.pdf (diakses pada 23 Februari 2014).

⁷ Anonim, "Kishanganga will cause 13% drop in Pakistan's hydroelectricity generation" Authint Mail, 20 Desember 2013, <http://www.authintmail.com/article/kashmir/kishanganga-will-cause-13-drop-pakistans-hydroelectricity-generation.htm> (diakses pada 14 Januari 2014)

melalui pengaliran air dari sungai Neelum melewati terowongan panjang menuju sungai Jhelum. Proyek yang berada dibawah pengawasan *Water and Power Development Authorities* (WAPDA) tersebut dapat mengalirkan listrik sebanyak 5,15 milyar unit listrik pertahun dan memainkan peran penting dalam pengembangan perekonomian Pakistan.⁸ Berdasarkan ketetapan Perjanjian Perairan Indus hak atas penyimpanan air akan diperoleh bagi salah satu pihak yang lebih awal menyelesaikan pembangunan bendungan.

Pakistan telah mengajukan bantuan pinjaman kepada Bank Dunia dan ADB namun mendapat kendala karena terdapat beberapa persyaratan yang sulit dipenuhi oleh Pakistan. Upaya dalam memperoleh alternatif dana tambahan agar dapat menyelesaikan bendungan tepat waktu tanpa melalui proses tender yang kompetitif, Pakistan mengajukan proposal bantuan kepada Cina. Setelah beberapa kali terjadi penundaan oleh pihak Cina karena ketidakmungkinan membangun bendungan dengan resiko geografis yaitu lempeng bumi yang aktif. Pada bulan 19 Desember 2007 perusahaan konsorsium milik negara Cina Gezhouba Group and China National Machinery Import and Export Corporation (CGGC-CMEC) dan pihak Pakistan menandatangani perjanjian konstruksi (*Construction Agreement*) dengan bantuan sebesar US\$ 448 juta dalam bentuk mekanisme pembiayaan *buyer's of credit*.⁹ Mekanisme ini merupakan salah satu jenis fasilitas pinjaman bagi importir (penerima pinjaman) yang disediakan oleh bank atau lembaga finansial lain, untuk membiayai pembelian modal barang/jasa dan item-item besar

⁸ Jiuping Xu, et.al, Proceedings Of The Sixth International Conference On Management Science And Engineering Management, (London:Springer-Verlag, 2013).

⁹ Dalam mekanisme 'Buyer's Credit' keterlibatan agensi yang disediakan oleh eksportir sangat penting terhadap kelangsungan mekanisme pembayaran importir dan menjamin resiko ekonomi, sosial, dan politik lainnya yang tidak diinginkan. Masing-masing pihak harus menentukan prinsip dan suku bunga pembayaran berdasarkan persetujuan awal.

lainnya secara kredit. Dengan demikian eksportir (pemberi pinjaman) dapat memperpanjang masa kredit tersebut sesuai kontrak penjualan dengan importir.¹⁰ Sedangkan surat mulai konstruksi (*Leter of Commencement*) baru dikeluarkan pada 20 Januari 2008. Sebulan setelahnya, tepatnya tanggal 9 Februari 2008 Presiden Pakistan meresmikan pembangunan proyek Neelum Jhelum kepada WAPDA yang telah diberikan kontrak konstruksi oleh perusahaan konsorsium Cina, CCGS-CMEC.¹¹

Pada tahun 2009, Presiden Ali Asif Ali Zardari berkunjung ke Cina untuk menandatangani kesepakatan (MoU) kolaborasi pembangunan beberapa proyek antara WAPDA dan Three Gorges Project Cooperation (TGPC). Perusahaan Cina, International Water and Electric Corporation (CIW&EC) juga terlibat dalam mengerjakan pembangunan jembatan diatas Sungai Jhelum pada area yang sama. Pada bulan Mei 2012 lalu, Pakistan dan Cina mengadakan *Joint Energy Working Group* selama dua hari di Islamabad membahas mengenai proyek Kohala dan PLTA Neelum-Jhelum yang menghabiskan biaya masing-masing sebesar US\$ 2,2 juta dan US\$ 3,6 juta.¹² Setahun berikutnya, tepatnya pada pada bulan Juli 2013, pejabat perusahaan Cina CGGC dengan tim Pakistan mengadakan pertemuan di Beijing untuk menetapkan penambahan jumlah tenaga kerja agar proyek Neelum-Jhelum dapat diselesaikan lebih awal sebelum waktu yang telah ditentukan.

¹⁰ Frank Skinner, *Pricing and Hedging Interest and Credit Risk Sensitive Instrumens* (Elsevier, 2005), 292.

¹¹ Syeh Jamait Ali Shah dalam ISSRA, "Pakistan's Water Security", 12,

¹² Priyanka Singh, "China and Pakistan-occupied Kashmir (POK) in 2012: A Review" *China Yearbook* 2012, (New Delhi:IDSA, 2013):112, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=OCBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fidsa.in%2Fsystem%2Ffiles%2Fbook_ChinaYearbook2012.pdf&ei=lo23U_uHNsyUuASUioDYCQ&usq=AFOjCNFA8Uhl-LEBfHJrJvr-YFkpBEzRgw&sig2=FW3bl2EUtmK-VoQuyCTLjw (diakses pada 9 September 2013).

Walaupun prosentase dana bantuan dan jasa yang diberikan tidak besar dan kurang cukup dalam menyelesaikan semua kebutuhan proyek, namun keterlibatan Cina terhadap pengembangan infrastruktur air Pakistan dan proyek-proyek lainnya dapat menyebabkan kemungkinan terjadi peningkatan intensitas konflikktual dalam dinamika hubungan India-Pakistan. Hal tersebut dapat terwujud dengan mudah dan cepat, terutama didukung adanya fakta bahwa terdapat hubungan sengketa antara India-Cina mengenai penggunaan dan perbatasan perairan Gangga-Brahmaputra-Meghna (GBM).¹³ Selain itu, jika dilihat dari sisi historis Cina merupakan mitra lama Pakistan yang menjadi pemasok senjata dan kekuatan militer lainnya dalam sejarah perang India-Pakistan. Dengan melihat beberapa fakta diatas dan bentuk keterlibatan Cina terhadap pengembangan proyek infrastruktur air di PoK dalam konteks sengketa perairan Indus, peningkatan intensitas konflikktual antara India-Pakistan yang dapat mengancam stabilitas keamanan dikawasan Asia Selatan mungkin dapat terjadi. Khususnya apabila sengketa perairan Indus dapat saling berinteraksi dan berkorelasi dengan isu lain yang saling mempengaruhi interaksi sengketa satu sama lain.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh keterlibatan Cina dalam pengembangan infrastruktur proyek air Pakistan terhadap intensitas sengketa Perairan Indus antara India-Pakistan tahun 2008-2014?

¹³ IDSA, "Water Security", 16.

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan intensitas sengketa antara India dan Pakistan tahun 2008-2014 setelah ada keterlibatan Cina dalam pembangunan infrastruktur air Pakistan. Agar dapat mengetahui perubahan apapun yang terjadi, peneliti menjelaskan pula intensitas sengketa antara India dan Pakistan pada tahun 2001-2007. Dengan menggunakan kerangka pemikiran *Hydro-hegemony*, *Hydropolitics Complexes* dan Teori Rasionalitas Air diharapkan berguna bagi akademisi Hubungan Internasional sebagai pendekatan baru yang lebih detail dalam menganalisis permasalahan konflik atau sengketa perairan internasional.

I.4 Kerangka Teoritis

I.4.1 *Hydro-hegemony*

Permasalahan keamanan sengketa air tidak bisa terlepas dari peran *hydro-hegemony*¹⁴ pada kawasan perairan antar negara riparian. Bentuk manifestasi kekuatan yang fokus pada sektor air merupakan tingkat paling spesifik terhadap analisis politik air hidro-hegemon. Kerangka hidro-hegemoni dapat digunakan dalam konflik ataupun sengketa dengan kondisi adanya kekuatan asimetris, bentuk kontrol air yang terkonsolidasi, dan terjadi pada iklim kompetitif.¹⁵ Terdapat dua sudut pandang teoritis dalam kerangka hidro-hegemoni yaitu kekuatan asimetris dan skala intensitas konflik air yang dapat membantu

¹⁴ Alexis Carles, "Power asymmetry and conflict over water resources in the Nile River Basin: the Egyptian hydro-hegemony" (PhD diss., King's College London, 2006), 10. http://protosh2o.act.be/VIRTUELE_BIB/Water_in_de_Wereld/CON-Waterconflicten_en_rampen/W_CON_E5_Power_assymetry.pdf (Diakses pada 12 Desember 2013)

¹⁵ Alexis Carles, "Power Asymmetry".

menjelaskan pengaruh keterlibatan Cina di Pakistan terhadap sengketa perairan Indus.

Tabel 1.2 Pilar Hidro-hegemon

HYDRO-HEGEMONY			Dimension of Power*	Equivalent 'Form' of Power	Characteristics
RIPARIAN POSITION Upstream / Downstream	POWER <i>1st Dimension</i> Military Economic <i>2nd Dimension</i> Active Stalling Incentives <i>3rd Dimension</i> Securitization Sanc'd Discourse	EXPLOITATION POTENTIAL Infrastructure Tech. capacity	First	Structural Power	Power as might. (<i>prestige / coercive power / material power</i>) The possession of and ability to mobilise capabilities (military, economic, political might, etc.).
			Second	Bargaining Power	Power as a relationship. (<i>power / legitimacy</i>) The impact that one's own options and alternatives may have on the other (moral high ground, authority, etc.).
			Third	Ideational Power	Power in the realm of ideas. The ability to shape perceptions / issues/ thoughts, to determine the 'established order of things'.

Lukes dalam Jeroen Warner, "Hydrohegemony as layered cake: Hydro-hegemonic strategies – the case of Turkey" (Second workshop Hydro-Hegemony, Goodenough College, London, 6-7 Juni, 2006).

Tabel 1.3 Skala Intensitas Konflik Air

	scale	event description
konflikual	-7	Formal Declaration of War
	-6	Extensive War Acts causing deaths, dislocation or high strategic costs
	-5	Small Scale Military Acts
	-4	Political-Military Hostile Actions
	-3	Diplomatic-Economic Hostile Actions
	-2	Strong Verbal Expressions displaying hostility in interaction
	-1	Mild Verbal Expressions displaying discord in interaction
kooperatif	0	Neutral or non-significant acts for the inter-nation situation
	1	Minor Official Exchanges, Talks or Policy Expressions – mild verbal support
	2	Official Verbal Support of goals, values, or regime
	3	Cultural or Scientific Support (non-strategic)
	4	Non-military Economic, Technological or Industrial Agreement
	5	Military, Economic or Strategic Support
	6	Major Strategic Alliance (International Freshwater Treaty)
7	Voluntary Unification into one nation	

Shira B. Yoffe, Basin At Risk: Conflict and Cooperation Over International Freshwater Resources, (PhD diss., Oregon State University, 12 Oktober 2001), 71.

Pilar hidro-hegemoni digunakan untuk mengukur dan menunjukkan kekuatan asimetris antar riparian melalui posisi riparian (riparian hulu atau riparian hilir), tingkat kekuatan hegemoni (ada tiga dimensi yaitu kapasitas struktural, posisi tawar, dan kekuatan ideasional), dan potensi eksploitasi (kapasitas teknik dalam membangun infrastruktur). Sedangkan skala intensitas konflik air Yoffe digunakan sebagai alat analisis dalam mengukur perubahan interaksi antara India dan Pakistan. Dampak adanya kekuatan yang asimetris antar riparian mendorong perubahan sikap baik hidro-hegemon maupun riparian lainnya dalam meningkatkan atau menurunkan skala intensitas konflik dalam kondisi kompleksitas hidropolitik. Berdasarkan penelitian Yoffe tahun 2001 belum pernah ada kasus sengketa perairan internasional yang mencapai titik skala ekstrem seperti dekralisasi formal perang maupun mengintegrasikan diri secara sukarela.¹⁶

Tabel 1.4 Strategi Kontrol Sumber Daya Air



Mark Zeitoun dan Jeroen Warner, "Hydro-hegemony – A Framework for Analysis of Transboundary Water Conflicts" *Water Policy* 8, (London: Kings's College University, 2006): 444
https://www.uea.ac.uk/polopoly_fs/1.147026!ZeitounWarner_HydroHegemony.pdf (Diakses pada 10 Desember 2013).

¹⁶ Shira B. Yoffe, *Basin At Risk: Conflict and Cooperation Over International Freshwater Resources*, (PhD diss., Oregon State University, 12 Oktober 2001), 102, http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/9693/Yoffe_Shira_B_2001_pt1.pdf?... (diakses pada 15 Desember 2013).

Bentuk hidro-hegemon ada dua jenis yaitu *positive-leadership hegemonic* dan *negative-dominative hegemonic*. *Positive-leadership hegemonic* menunjukkan bahwa hidro-hegemon dapat menyediakan tatanan dan mengatur kebutuhan barang publik diantara riparian lainnya untuk mencegah munculnya *free rider*. Sedangkan *negative-dominative hegemonic* menunjukkan adanya dominasi dan pemaksaan untuk mematuhi keinginan hidrohegemon.¹⁷ Hidro-hegemon dapat memilih strategi kontrol air seperti perebutan, penahanan, dan penyatuan melalui berbagai bentuk interaksi yaitu penggunaan bersama, konsolidasi, dan persaingan antar riparian.¹⁸ Hasil keseluruhan dari jenis hidro-hegemon, strategi kontrol air beserta bentuk interaksinya dan skala intensitas konflik membentuk kerangka kerja hidrohegemoni seperti pada tabel 1.3 diatas.

Segala bentuk interaksi, taktik, dan strategi mengontrol sumber daya air yang dilakukan oleh hidrohegemon selalu diupayakan untuk menuju bentuk konsolidasi sumber daya dengan riparian lainnya. Hal ini harus dilakukan agar kerangka hidro-hegemon berfungsi dengan baik dalam menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh negara riparian. Setidaknya, masing-masing riparian dapat memanfaatkan aliran air dan mempertahankan hubungan yang penuh dengan ketidakstabilan, namun tidak sampai mengerucut pada konflik persenjataan. Sebagai negara riparian lemah dapat melakukan strategi *counter hegemony* dengan cara memperkuat dimensi kekuatan kedua yaitu posisi tawar yang meliputi

¹⁷ Mark Zeitoun dan Jeroen Warner, "Hydro-hegemony – A Framework for Analysis of Transboundary Water Conflicts" *Water Policy* 8, (London: Kings's College University, 2006): 438-9 https://www.uea.ac.uk/polopoly_fs/1.147026!ZeitounWarner_HydroHegemony.pdf (Diakses pada 10 Desember 2013).

¹⁸ Zeitoun dan Warner, "Hydro-hegemony", 443.

de-sekritisasi, perkembangan perekonomian, sumber pendanaan alternatif, mengadakan negosiasi dan membangun hasil hasil yang positif.¹⁹

I.4.2 *Hydropolitical Complexes*

Konsep “*security complexes*” dalam teori *Regional Security Complex* (RSC) menggambarkan suatu kondisi bahwa perhatian dan persepsi utama keamanan negara terkait dengan beberapa isu tertentu yang saling berkorelasi dengan isu lainnya. *Regional Security Complex* merumuskan konsep *hydropolitical security complex* sebagai bentuk spesial dari *security complex*.²⁰ Konsep *hydropolitical security complex* muncul ketika seperangkat negara yang secara geografis menjadi bagian miliknya maupun bagian pengguna lain yang secara teknis berbagi penggunaan sungai dan mereka mulai mempertimbangkan konsekuensi hak kepemilikan atas tubuh air tersebut kedalam agenda keamanan nasional utama.²¹

Dalam mekanisme integrasi dan resolusi sengketa antar riparian, tidak efektif jika tidak ada penggunaan kekuatan dan kekerasan.²² Sehingga manajemen sumber daya air dalam kondisi *hydropolitical security complex* (HSC) selalu berada situasi yang penuh tekanan dan cenderung mengarah pada spektrum negatif, yakni perang.²³ Apabila dalam situasi yang kompleks terdapat campur tangan atau keterlibatan aktor eksternal maka cenderung berubah menjadi semakin kompleks. Oleh sebab itu Allan dan Turton telah mengembangkan konsep baru

¹⁹ Zeitoun dan Warner, “Hydro-hegemony”, 454.

²⁰ Buzan dan Waever (2003), dalam Sai Felicia Khrisna-Hensel, ed. *New Security Frontiers-Critical Energy and The Resource Challenge*, Global Interdisciplinary Studies Series, (ASHGATE, 2012), 151.

²¹ Buzan dan Waever (2003), dalam Sai Felicia Khrisna-Hensel, ed., 151

²² Buzan dan Waever (2003), dalam Sai Felicia Khrisna-Hensel, ed., 151

²³ Buzan dan Waever (2003), dalam Sai Felicia Khrisna-Hensel, ed., 152

yakni *hydropolitical complexes* yang menjelaskan bahwa konsep tersebut berada dalam struktur situasi yang sama dengan HSC, namun berada diantara kondisi kerjasama dan kompetisi.²⁴

Tabel 1.5 Jenis-Jenis Pemicu Konflik dan Dampaknya

Repressor	Type of Leverage Used by Weakest Riparian				Type of Leverage Used by Strongest Riparian			
	EQ ₁ :	Outcome	EQ ₂ :	Sustained	EQ ₃ :	Outcome	EQ ₄ :	Sustained
Geographic	0.81*	Conflict			0.68*	Conflict		
Military	0.27*	Qualified Negotiation	0.09	No	0.43*	Qualified Negotiation	0.02	No
Political	0.04				0.19*	Qualified Negotiation	0.01	No
Economic	0.11*	Negotiation	0.01	Yes	0.17*	Negotiation	0.09	Yes
Technological	0.08*	Negotiation	0.01	Yes	0.09*	Negotiation	0.01	Yes
External	0.73*	Negotiation	0.28*	Yes	0.01			
Incentive	0.39*	Negotiation	0.07*	Yes	0.33*	Negotiation	0.01	No
Constraint	0.07				0.09			
Economic Inequality	0.19*	Qualified Negotiation	0.09	No	0.08*	Qualified Negotiation	0.01	No
Ethnic Conflict	0.22*	Conflict			0.21*	Conflict		
Basin Dependence	0.40*	Conflict			0.23*	Conflict		

Jenny R. Kehl, "hydropolitical complexes and asymmetrical power – conflict, cooperation, and governance of international river systems", *Journal of World-Systems Research*, Vol. XVII, No. 1 (Spring, 2011): 227, <http://www.jwsr.org/wp-content/uploads/2013/02/Kehl-vol17n1.pdf> (diakses pada 21 November 2013).

Sengketa air internasional seringkali terjadi dalam kondisi kompleksitas hidropolitik yang mendorong keputusan masing-masing riparian untuk mengambil pilihan menurunkan atau meningkatkan sengketa berdasarkan pola hubungan asimetris antar riparian. Kerangka untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika kekuatan asimetris terbagi dalam empat tipe yaitu *hard power*, *soft power*, *structural power*, dan *sticky power*.²⁵ *Sticky power* adalah kekuatan ekonomi yang diukur dari GDP, total dagang dengan riparian lainnya, dan tingkat akses pasar. *Soft power* berasal dari akuntabilitas kekuatan politik dan penyebaran

²⁴ Allan (2001,2002) dan Turton (2003,2008) dalam Sai Felicia Khrisna-Hensel, ed., 152

²⁵ Jenny R. Kehl, "hydropolitical complexes and asymmetrical power – conflict, cooperation, and governance of international river systems", *Journal of World-Systems Research*, Vol. XVII, No. 1 (Spring, 2011): 227, <http://www.jwsr.org/wp-content/uploads/2013/02/Kehl-vol17n1.pdf> (diakses pada 21 November 2013).

ide (nilai budaya dan norma), kekuatan tersebut dapat diukur dari besarnya kekuatan politik dan transfer teknologi. Sebagaimana pada tabel penelitian Kehl diatas terlihat bahwa, perimbangan kekuatan melalui *hard* dan *structural power* tidak efektif bagi riparian lemah sedangkan perimbangan kekuatan melalui kategori *soft dan sticky power* lebih efektif dalam jangka panjang.²⁶

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh riparian lemah antara lain menggunakan kekuatan eksternal. Pengaruh keterlibatan aktor eksternal dapat dilihat pada peningkatan total dagang dan bantuan, penyediaan dana alternatif, dan transfer teknologi yang berguna dalam membantu pembangunan infrastruktur seperti PLTA, meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam menyediakan layanan publik, dan proyek lain yang meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik.²⁷ Pengaruh keterlibatan aktor eksternal pada hubungan kekuatan asimetris antar riparian yang bersengketa, dapat mengubah dinamika kekuatan internal riparian lemah dalam kompleksitas hidropolitik. Kehadiran aktor eksternal diharapkan dapat mengurangi dominasi riparian kuat dan mempromosikan peningkatan kerjasama untuk stabilitas regional.

1.4.3 Teori Rasionalitas Air

Teori ini menjelaskan bahwa negara harus bertindak dengan cara mempromosikan keamanan jangka panjang terhadap suplai air.²⁸ Tindakan tersebut meliputi mempertahankan hubungan baik dan mengejar manajemen air

²⁶ Kehl, "hydropolitical complexes", 221.

²⁷ Kehl, "hydropolitical complexes", 230.

²⁸ Undula Z. Alam, "Water Rationality: Mediating the Indus Water Treaty", master's thesis, University of Durham, September 1998): 24, <http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/MEDIATING%20THE%20INDUS%20WATER%20TREATLY.pdf> (diakses pada 12 Desember 2013).

secara bijaksana. Rasionalitas air mempercayai bahwa setiap ada keterlibatan pihak ketiga, seharusnya dapat mempromosikan kerjasama adalah hasil dari sengketa.²⁹ Jika keterlibatan pihak ketiga mengenal permasalahan yang sedang diperdebatkan oleh masing-masing riparian, maka memberi peluang untuk menghasilkan kerjasama. Namun, jika pihak ketiga kurang memahami permasalahan yang terjadi antar riparian, maka tidak akan ada celah untuk membangun kerjasama. Sehingga penekanan pada persepsi pihak ketiga terhadap sengketa air menjadi faktor utama dalam promosi peningkatan kerjasama antara pihak yang bersengketa.³⁰

“while no ‘water wars’ have occurred, there is ample evidence that the lack of clean freshwater has lead to occasionally intense political instability and that, on a small scale, acute violence can result. What we seem to be finding, in fact, is that geographic scale and intensity of conflict are inversely related”³¹

Sebagaimana kutipan Wolf diatas, tidak mengurangi keberadaan kompetisi dalam perebutan sumber daya air dan membuat kerjasama sebagai respon otomatis. Peperangan masih mungkin bisa terjadi, karena jalan menuju kerjasama sangat sulit dilakukan dengan adanya penundaan dari salah satu atau semua pihak yang bersengketa.³² Setidaknya, ada pembatasan penggunaan kekerasan untuk hasil yang lebih berguna dalam jangka panjang.

1.5 Sintesis Teori

Berdasarkan kerangka *hydro-hegemony*, kekuatan asimetris yang diukur dari pilar hidro-hegemoni menentukan riparian kuat dan riparian lemah. Riparian

²⁹ Alam, “Water Rationality”, 24

³⁰ Alam, “Water Rationality”, 166.

³¹ Wolf dalam Alam, “Water Rationality”, 162

³² Alam, “Water Rationality”, 163.

kuat yang berperan sebagai hidro-hegemon sangat menentukan bentuk interaksi kontrol air yang berpengaruh langsung terhadap perubahan dinamika sengketa baik intensitas konflikual maupun intensitas kerjasama. Namun negara riparian lemah dapat melakukan strategi *counter hegemony* melalui peningkatan dimensi kekuatan kedua yaitu posisi tawar, salah satunya melalui sumber dana alternatif. Berdasarkan konsep *hydropolitical complexes*, sumber dana alternatif dapat diperoleh melalui dukungan aktor eksternal sehingga riparian lemah dapat meningkatkan posisi tawarnya. Hal ini juga berfungsi sebagai upaya mengurangi dominasi hidro-hegemon yang berlebihan, menyeimbangkan kondisi kekuatan yang asimetris dan mempromosikan peningkatan kerjasama terhadap pihak yang bersengketa. Dalam teori rasionalitas air menyampaikan bahwa keterlibatan pihak ketiga seharusnya dapat mempromosikan kerjasama. Peningkatan kerjasama tersebut bergantung pada persepsi atau pemahaman pihak ketiga terhadap sengketa yang terjadi dan pertimbangan rasionalitas pihak yang bersengketa dalam menghindari peperangan air demi tercapainya keamanan akses suplai air dalam jangka panjang.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan sintesis teori, diperoleh hipotesis sebagai berikut. Keterlibatan Cina sebagai aktor eksternal dalam kondisi kekuatan asimetris pada sengketa Perairan Indus dapat mempengaruhi dinamika internal posisi tawar Pakistan melalui penyediaan dana alternatif untuk pengembangan infrastruktur air Pakistan. Hal tersebut berpengaruh terhadap perubahan intensitas konflikual dan intensitas kerjasama antara India dan Pakistan dengan

pertimbangan rasionalitas kedua negara dalam menghindari peperangan air untuk keamanan akses suplai air jangka panjang.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Operasionalisasi Konsep dan Variabel

1.7.1.1 Kekuatan Asimetris

Indikator pengukuran kekuatan asimetris yang diperoleh dari tiga pilar hidro-hegemoni meliputi posisi riparian, potensi eksploitasi, dan tiga dimensi kekuatan.³³ Pertama, posisi riparian ditentukan berdasarkan letak geografis riparian (riparian hulu atau riparian hilir), jumlah aliran air yang diperoleh, dan kapasitas mengelola sumber daya air.³⁴ Kedua, potensi eksploitasi ditentukan dari kapasitas teknik dan kemampuan infrastruktur masing-masing riparian. Ketiga, dimensi kekuatan terbagi menjadi tiga bagian yang meliputi kapasitas struktural, posisi tawar, dan kekuatan ideasional.

Tabel 1.6 Tiga Dimensi Kekuatan

STRUCTURAL POWER <i>(power of might/capability)</i>	BARGAINING POWER <i>(power as a relationship: legitimacy)</i>	IDEATIONAL POWER <i>(power in the realm of ideas)</i>
Economic	Legitimacy	Ability to shape issues
Military	Agreements / Obligations	Ability to shape perceptions
International Support	Moral High Ground / Law	Ability to sanction the discourse
Financial Mobilization	Agenda-Setting	'Power Reputation' / deterrence
Human Capital		
Riparian Position		

Lukes, Power - A Radical View, 2 th ed., (Hampshire: Palgrave Mcmilan, 2005), 451.

³³ Zeitoun dan Warner, "Hydro-hegemony", 450.

³⁴ Zeitoun dan Warner, "Hydro-hegemony", 450.

Kapasitas struktural merupakan kemampuan negara dalam memobilisasi kekuatan ekonomi, kekuatan militer berdasarkan jumlah angkatan perang dan total persenjataan yang dimiliki, dukungan internasional dapat berupa bantuan finansial dan politik, mobilisasi finansial yang dapat diperoleh melalui negara donor kaya, negara aliansi, dan lembaga finansial internasional lainnya untuk membangun infrastruktur proyek, modal manusia atau *human capital*.³⁵ Sedangkan posisi tawar lebih mengacu pada aturan permainan yaitu kekuatan untuk membentuk agenda yang terdiri dari kemampuan pihak yang lebih lemah dalam memilih kepatuhan atau tidak terhadap perintah pihak yang lebih kuat.³⁶

Kemudian, kekuatan ideasional terinspirasi dari Antonio Gramsci mengenai konsep hegemoni ideologi yang mengacu pada kekuatan untuk mencegah orang lain dalam menyampaikan keluhan yang dapat membentuk persepsi, kognisi dan preferensi sedemikian rupa bahwa mereka menerima peranannya didalam tatanan yang ada.³⁷ Dimensi kekuatan ideasional meliputi kemampuan dalam membentuk isu dan persepsi (konstruksi pengetahuan) sebagai proses awal dalam mendukung diskursus serta reputasi kekuatan sebagai *deterrence*.³⁸

1.7.1.2 Keterlibatan Aktor Eksternal

Keadaan asimetris kekuatan yang terjadi dalam kondisi kompleksitas hidropolitik mendorong riparian lemah untuk mencari dukungan aktor eksternal. Aktor eksternal tersebut dapat berupa negara, NGO, lembaga finansial

³⁵ Zeitoun dan Warner, "Hydro-hegemony", 449-50.

³⁶ Lukes, 2005 dalam Zeitoun dan Warner, "Hydro-hegemony", 450.

³⁷ Zeitoun dan Warner, "Hydro-hegemony", 76.

³⁸ Zeitoun dan Warner, "Hydro-hegemony", 448.

internasional, MNC dan aktor bukan negara lainnya yang dapat memberikan pengaruh ekonomi, politik, atau militer kepada salah satu negara riparian. Kekuatan aktor eksternal memiliki berbagai macam dimensi, kepentingan dan ukuran oleh sebab itu, peneliti menggunakan beberapa indikator seperti a) perubahan total perdagangan dan bantuan dari aktor eksternal b) transfer teknologi c) perkembangan infrastrukural dan mekanisme institusional sebagai indikator yang mempengaruhi peningkatan *soft power* riparian lemah.³⁹

1.7.1.3 Intensitas Konflikual

Peneliti mengambil indikator masing-masing skala intensitas konflik air sebagai indikator intensitas konflik terletak pada skala 0 hingga -7. Pada skala -1 menunjukkan adanya perselisihan lisan ringan dalam interaksi, seperti menolak nota protes, menyangkal tuduhan, dan pernyataan keberatan. Skala -2 mulai muncul permusuhan dalam ungkapan lisan kuat dalam interaksi yang ditunjukkan dengan mengecam pemimpin lain, membloking kebijakan di badan internasional, dan menunda kunjungan kepala negara. Skala -3 tindakan permusuhan diplomatis-ekonomi menolak visa bagi negara lain dan pencabutan perjanjian air. Skala -4 tindakan permusuhan politik dan militer seperti menyerang kedutaan. Skala -5 tindakan militer skala kecil seperti pertempuran terbatas dan mengambil wilayah yang diduduki. Skala -6 perang skala luas menyebabkan kematian, dislokasi, dan biaya strategis tinggi. Skala -7 deklarasi formal perang. Ukuran masing masing

³⁹ Indikator perkembangan infrastrukural dan mekanisme institusional merupakan salah satu indikator yang paling relevan dalam mempengaruhi dinamika hubungan kerjasama dan konflikual antar riparian, diperoleh dari penelitian Shira B. Yoffe, "Basin at Risk Project", 83-101. Sedangkan indikator total perdagangan plus bantuan dan transfer teknologi diambil dari penelitian Kehl sebagai ukuran dari pengaruh aktor eksternal. Dalam Kehl, "hydropolitical complexes", 225.

indikator yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 1.7 indikator skala intensitas konfliktual berikut.

Tabel 1.7 Indikator Skala Intensitas Konfliktual

Indikator konfliktual	-7	Formal Declaration of War
	-6	Extensive war acts causing death, dislocation or high strategic cost Using nuclear weapons, full-scale air, naval, or land battles; invading or occupying territory; massive bombing of civilian areas; capturing of soldiers in battle; large scale bombing of military installations; chemical or biological warfare.
	-5	Small scale military acts Limited air, sea, or border skirmishes; border police acts; annexing territory already occupied; seizing material of target country; imposing blockades; assassinating leaders of target country; materially supporting subversive activities against target country.
	-4	Political-military hostile actions Inciting riots or rebellions (providing training or financial aid for rebellions); encouraging guerilla activities against target country; limited and sporadic terrorist actions; kidnapping or torturing foreign citizens or prisoners of war; giving sanctuary to terrorists; breaking diplomatic relations; attacking diplomats or embassies; expelling military advisors; executing alleged spies; nationalizing companies without compensation.
	-3	Diplomatic-economic hostile actions Increasing troop mobilization; boycotts; imposing economic sanctions; hindering movement on land, waterways, or in the air; embargoing goods; refusing mutual trade rights; closing borders and blocking free communication; manipulating trade or currency to cause economic problems; halting aid; granting sanctuary to opposition leaders; mobilizing hostile demonstrations against target country; refusing to support foreign military allies; recalling ambassador for emergency consultations regarding target country; refusing visas to other nationals or restricting movement in a country; expelling or arresting nationals or press; spying on foreign government officials; terminating major agreements. <i>Unilateral construction of water projects against another country's protests; reducing flow of water to another country; abrogation of a water agreement</i>
	-2	Strong verbal expression displaying hostility in interaction Threatening retaliation for acts; making threatening demands and accusations; condemning strongly specific actions or policies; denouncing leaders, system, or ideology; postponing visits by heads of state; refusing participation in meetings or summits; leveling strong propaganda attacks; denying support; blocking or vetoing policy or proposals in the UN or other international bodies. <i>Official interactions only.</i>
	-1	Strong verbal expression displaying discord in interaction Objecting in a low-key way to policies or behaviour; communicating dissatisfaction through a third party; failing to reach an agreement; refusing protest note; denying accusations; objecting to explanation of goals, position, etc.; requesting changes in policy. <i>Both unofficial and official, including diplomatic notes of protest</i>
	0	Neutral or no significant acts for the inter-nation situations Making rhetorical policy statements; broadcasting non-consequential news item; inviting non-governmental visitors; making statements of indifference compensating for nationalized enterprises or private property; making 'no comments' statement

Peneliti olah berdasarkan Lucia De Stefano, et. al, "Updating the International Water Events Database revised", *The United Nations World Water Programme*, <http://www.unesdoc.unesco.org/images/0018/001818/181890e>. (Diakses pada 8 Desember 2013).

1.7.1.4 Intensitas Kerjasama

Indikator intensitas kerjasama juga diperoleh berdasarkan indikator skala intensitas konflik air yang terletak antara skala 0 hingga 7. Pada skala 1 yaitu pertukaran resmi ringan, ungkapan kebijakan atau pembicaraan, dukungan lisan ringan, dan menyelenggarakan pertemuan pejabat tinggi. Skala 2 dukungan resmi lisan terhadap tujuan, nilai, atau rejim seperti melanjutkan kembali hubungan diplomatik yang rusak. Skala 3 dukungan atau kesepakatan ilmiah atau budaya

yang dapat dilakukan dengan cara pertukaran dan kesepakatan akademik budaya. Skala 4 perjanjian industri, teknologi, dan non-ekonomi militer dapat terwujud melalui pemberian status *Most Favored Nation* dan memberikan bantuan bencana. Skala 5 dukungan strategis atau ekonomi militer salah satunya dengan cara mengejar perlucutan senjata. Skala 6 membentuk *International Freshwater Treaty* dan aliansi strategi bersama. Skala 7 penyatuan sukarela menjadi satu bangsa. Indikator masing-masing skala intensitas yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 1.4 tabel indikator skala intensitas kerjasama.

Tabel 1.8 Indikator Skala Intensitas Kerjasama

Indikator Kerjasama	0	Neutral or no significant acts for the inter-nation situations Making rhetorical policy statements; broadcasting non-consequential news item; inviting non-governmental visitors; making statements of indifference; compensating for nationalized enterprises or private property; making 'no comments' statement
	1	Minor official exchange, talks or policy expressions, mild verbal support Organizing meetings of high officials; conferring about problems of mutual interest; inviting junior officials for talks; issuing joint communiques; appointing ambassadors; announcing ceasefires; allowing non-governmental exchanges; proposing talks; tolerating public non-governmental support of the regime; exchanging prisoners of war; requesting support for policy, stating or explaining policy.
	2	Official verbal of goals, values, or regime Officially supporting policies; raising legations to embassies; reaffirming friendship; asking for help against third parties; apologizing for unfavorable actions or statements; allowing entry of press correspondents; asking for aid or expressing thanks for it; resuming broken diplomatic or other relations.
	3	Cultural or scientific agreement or support (non-strategic) Starting diplomatic relations; establishing technological or scientific communication; proposing or offering economic or military aid; recognizing the government; organizing visits by the head of state; opening borders; conducting or enacting friendship agreements; conducting cultural or academic agreements or exchanges. <i>Agreements to set up co-operative working groups</i>
	4	Non-military economic, technological or industrial agreement Making financial loans or grants; agreeing to economic pacts; giving industrial, cultural, or educational assistance; conducting trade agreements or granting Most-Favored-Nation status; establishing common transport or communication networks; selling industrial/ technological surplus supplies; providing technical expertise; ceasing economic restrictions; repaying debts; selling non-military goods; giving disaster relief. <i>Legal, co-operative actions between nations that are not treaties; co-operative projects for water shed management, irrigation, poverty-alleviation.</i>
	5	Military economic or strategic support Selling nuclear power plants or material; providing air, naval, or land facilities for bases; giving technical or advisory military assistance; granting military aid; sharing highly advanced technology; intervening with military support at the request of government; concluding military agreements; training military personnel; formulating joint programmes and plans to initiate and pursue disarmament.
	6	International Freshwater Treaty; Major strategic alliance (regional or international) Fighting a war jointly; establishing a joint military command or alliance; conducting joint military manoeuvres; establishing an economic common market; joining or organizing international alliances; establishing joint programmes to raise the global quality of life.
	7	Voluntary unification into one nation <i>Merging voluntarily into one nation or state, forming one nation with one legally binding government.</i>

Peneliti olah berdasarkan Lucia De Stefano, et. al, "International Water Events"

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kausal-eksplanasi yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara dua atau lebih variabel.⁴⁰ Pada tipe penelitian ini selalu menggunakan variabel independen sebagai variabel sebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat. Peneliti menetapkan dukungan aktor eksternal yaitu keterlibatan Cina di Pakistan sebagai variabel independen sedangkan intensitas sengketa sungai Indus antara India-Pakistan tahun 2008-2014 sebagai variabel dependen. Hubungan antar variabel dalam tipe penelitian kausal dijelaskan dalam kerangka teoritis karena disusun melalui studi pustaka yang selanjutnya diturunkan menjadi hipotesis untuk diuji.⁴¹

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Peneliti mengambil rentan waktu 2008-2014 sebagai fokus utama penelitian.⁴² Pada kurun waktu tersebut merupakan ukuran dampak pengaruh keterlibatan Cina terhadap perubahan intensitas sengketa sungai Indus antara India-Pakistan. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan rentan waktu 2001-2007 sebagai perbandingan terhadap perubahan intensitas sengketa sungai Indus India-Pakistan sebelum adanya keterlibatan Cina dalam proyek air di Pakistan, terutama proyek Neelum-Jhelum.

⁴⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 31-33.

⁴¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 33; 95.

⁴² Pada bulan Januari 2008 perusahaan konsorsium milik negara China CGGC-CMEC baru mengeluarkan letter of commencement yang selanjutnya pembangunan proyek tersebut secara resmi dimulai pada sebulan berikutnya.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia atau disebut juga dengan *second-hand information*.⁴³ Data sekunder meliputi artikel dalam surat kabar, buku atau telaah gambar, dan artikel dalam jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi penelitian sebelumnya.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif dan studi perbandingan sebagai teknik analisis data. Pertama, metode kualitatif lebih menekankan kata kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data.⁴⁴ Menurut Miles dan Huberman ada tiga hal dalam analisis data kualitatif: 1) reduksi data meliputi proses penyederhanaan dan abstraksi, 2) penyajian data yang bisa disajikan dalam bentuk matriks; grafik; jaringan; bagan, 3) menarik kesimpulan atau verifikasi.⁴⁵

Kedua, metode studi perbandingan menggunakan metode sistematis dengan melakukan tahapan berikut, konseptualisasi permasalahan, operasionalisasi dan penggunaan indikator secara konsisten.⁴⁶ Ciri dari teknik analisa data studi perbandingan adalah '*question that travel*' yang dapat memicu munculnya perbedaan.⁴⁷ Pada penelitian ini, penulis menganalisis kasus yang

⁴³ Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 291.

⁴⁴ John Creswell 1994 dalam Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 78

⁴⁵ Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 339-41.

⁴⁶ Donna L. Bahry, "Crossing Border: The Practice of Comarative Research", dalam Jarol B. Manheim and Richard C.Rich, Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Sciences, (London: longman Publisher, 1995), 245-60.

⁴⁷ Bahry, "Crossing Border", 245-60.

sama dalam kurun waktu yang berbeda dan menggunakan masing-masing indikator dari skala intensitas konflik air Yoffe sebagai *question that travel*.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis yaitu teori dan konsep, hipotesis, dan metodologi penelitian yang meliputi operasionalisasi konsep dan variabel; tipe penelitian; jangkauan penelitian; teknik pengumpulan data; teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II. Pada sub bab pertama membahas mengenai kondisi kekuatan asimetris antara India dan Pakistan dalam sengketa perairan Indus dengan menggunakan indikator pilar hidrohegemoni yang meliputi posisi riparian, tiga dimensi kekuatan, dan potensi eksploitasi. Pada sub bab kedua menjelaskan latar belakang, meliputi peran, motif, dan persepsi Cina dalam membantu pengembangan infrastruktur proyek air Pakistan dalam konteks sengketa Perairan Indus. Pada sub bab ketiga membahas mengenai bentuk keterlibatan atau upaya Cina dalam meningkatkan posisi tawar Pakistan pada sengketa Indus, melalui dua indikator berikut: total volume dagang dan perkembangan infrastruktur proyek PLTA di Pakistan.

Bab III. Pada sub bab pertama membahas mengenai perubahan intensitas konflikual dan intensitas kerjasama India-Pakistan berdasarkan skala intensitas konflik air tahun 2008-2014. Kemudian data tersebut dibandingkan dengan intensitas konflikual dan intensitas kerjasama tahun 2001-2007, untuk mengetahui perubahan pada dinamika sengketa Perairan Indus setelah keterlibatan

Cina pada proyek air Pakistan. Pada pembahasan berikutnya juga menjelaskan mengenai pertimbangan rasionalitas India-Pakistan dalam menghindari peperangan air demi keamanan suplai air jangka panjang.

Bab IV. Berisi kesimpulan yang mengelaborasi data pada bab II dan bab III yang didasarkan pada pengembangan kerangka teoritis dan hipotesis pada bab I. Serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

ASIMETRIS KEKUATAN RIPARIAN INDUS DAN KETERLIBATAN CINA

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai kondisi kekuatan asimetris riparian Indus antara India dan Pakistan untuk menentukan hidro-hegemon pada riparian Indus. Kemudian pada sub pembahasan selanjutnya sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh dominasi hidro-hegemon, riparian lemah menggunakan keterlibatan aktor eksternal yaitu Cina yang bisa mengubah dinamika internal posisi tawar Pakistan dalam sengketa Perairan Indus melalui penyediaan dana alternatif bagi pengembangan infrastruktur proyek air Pakistan. Sebelum menjelaskan pengaruh keterlibatan Cina dalam meningkatkan posisi tawar Pakistan, terlebih dahulu peneliti memaparkan mengenai latar belakang keterlibatan Cina untuk membantu Pakistan dalam sengketa Perairan Indus yang meliputi motif, peran, dan persepsi Cina dalam sengketa perairan Indus. Setelah mengetahui kondisi kekuatan asimetris antar negara riparian dan latar belakang keterlibatan Cina, peneliti dapat menjelaskan pengaruh keterlibatan Cina sebagai penyedia dana untuk perkembangan infrastruktur air Pakistan dalam upaya meningkatkan posisi tawar Pakistan pada sengketa perairan Indus.

II.1 Kekuatan Asimetris Antar Negara Riparian Indus

Perairan Indus merupakan lembah sungai terbesar di Asia dengan luas area 1.138.800 km² dengan panjang 3180 km yang berawal dari Tibet barat mengalir melalui Cina, Kashmir, kemudian turun ke Pakistan dan berakhir di Lautan

Arab.⁴⁸ Luas wilayah Perairan Indus berada pada lima negara meliputi 52 persen di Pakistan, 34 persen di India, 7 persen di Cina, 6 persen Afganistan, dan 1 persen di Nepal.⁴⁹ Namun ratifikasi Perjanjian Sungai Indus hanya dilakukan dan berlaku bagi riparian India dan Pakistan sehingga Cina, Nepal, dan Afganistan tidak termasuk dalam pembahasan kekuatan asimetris dalam sengeketa Perairan Indus. Dengan menggunakan pilar hidro-hegemoni, peneliti dapat menunjukkan kondisi kekuatan asimetris antara kedua negara, aktor hidro-hegemon dan potensi eksploitasinya serta potensi kekuatan yang dapat digunakan oleh riparian lemah dalam mengurangi dominasi pengaruh hidro-hegemon. Terdapat tiga pilar hidro-hegemon yaitu posisi riparian, tiga dimensi kekuatan, dan potensi eksploitasi yang penulis jelaskan pada sub pembahasan berikut.

II.1.1 Posisi Riparian

Apabila dilihat berdasarkan letak geografis India merupakan riparian hulu yang memiliki kemampuan untuk mengubah Punjab Barat sebagai tulang punggung pertanian Pakistan menjadi gurun pasir.⁵⁰ Berdasarkan keuntungan geografis, India mendapat keunggulan strategis dalam mengontrol dan mengatur aliran air Pakistan.⁵¹ Berdasarkan ketentuan Perjanjian Sungai Indus, mengenai India memperoleh hak atas tiga sungai sebelah timur, sedangkan Pakistan juga

⁴⁸ Rashid, U. H, dalam Anonim, "Indus Water Treaty and Resolution of Water Conflicts Between Two Nuclear Nations (Pakistan and India)", (2010):8, <http://www.feem-web.it/ess/ess12/files.papers/hayat.pdf>. (diakses pada 2 Oktober 2013).

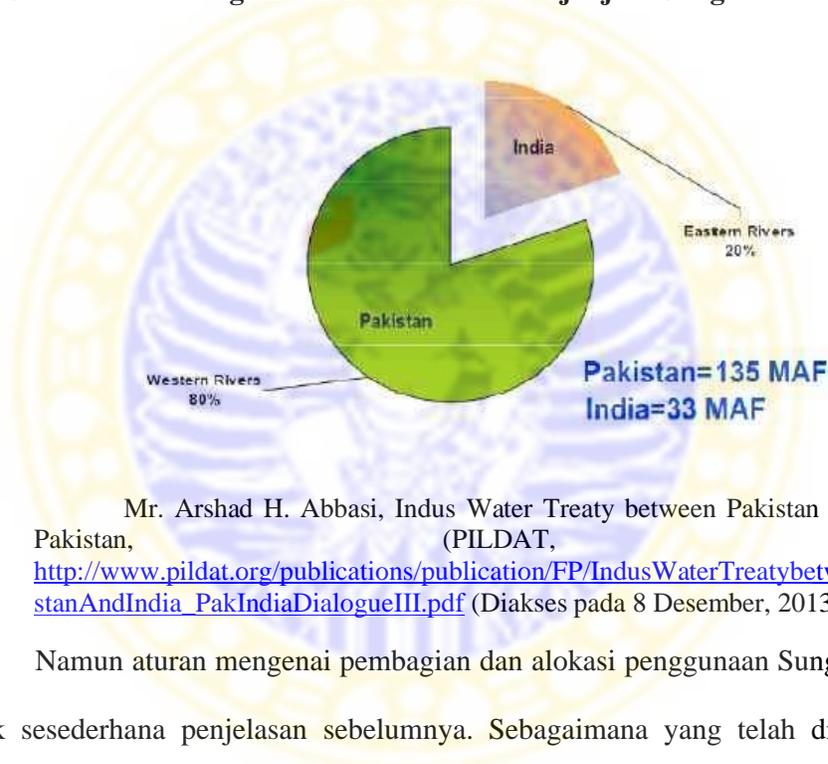
⁴⁹ UNEP, "Atlas of international freshwater agreements" United Nations Environment Programme & Food and Agriculture Organization of the United Nations, (Corvallis: Oregon State University, 2002).

⁵⁰ Mandel R., dalam Anonim, "Indus Water Treaty", 12.

⁵¹ Spykman dan Rollins dalam Lucy Petheram, "Dam it?: Hydropolitics in the changing political context of Nepal" (master's thesis, University of Otago, November 2010):33-34, <http://otago.ourarchive.ac.nz/bitstream/handle/10523/1664/PetheramLucy2010MA.pdf> (diakses pada 24 Desember 2013).

memperoleh hak atas tiga sungai sebelah barat. Berdasarkan pembagian tersebut, Pakistan memperoleh volume air yang lebih besar daripada India, sebagaimana grafik 2.1. Hal ini disesuaikan dengan tingkat ketergantungan air bagi Pakistan terhadap Sungai Indus adalah sebesar 76 persen sedangkan India hanya sebesar 34 persen. Sungai Indus menyumbang 25 persen jumlah GDP Pakistan dan lebih dari 60 persen untuk pendapatan devisa nasional tahunan.⁵²

Grafik 2.1 Pembagian Air Berdasarkan Perjanjian Sungai Indus 1960



Mr. Arshad H. Abbasi, Indus Water Treaty between Pakistan and India Pakistan, (PILDAT, 2012), http://www.pildat.org/publications/publication/FP/IndusWaterTreatybetweenPakistanAndIndia_PakIndiaDialogueIII.pdf (Diakses pada 8 Desember, 2013).

Namun aturan mengenai pembagian dan alokasi penggunaan Sungai Indus tidak sesederhana penjelasan sebelumnya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal III tentang penggunaan sungai sebelah barat, Pakistan mendapatkan hak penggunaan tak terlarang. Pada pasal III tambahan C mengatur bahwa India juga mendapatkan hak penggunaan non-konsumtif, domestik, dan penggunaan agrikultural terbatas atas tiga sungai sebelah barat. Sedangkan pasal III tambahan D, mengizinkan India untuk membangun pembangkit tenaga listrik air pada tiga

⁵² Dr. Shaheen Akhtar dalam ISSRA, "Pakistan's Water Security", 18.

sungai sebelah barat. Berdasarkan pasal III tambahan E India memiliki kapasitas penyimpanan terbatas yaitu sebesar 3,6 MAF untuk penggunaan non-konsumsi meliputi 1,25 MAF untuk umum 1,6 MAF untuk membangun tenaga, dan 0,75 MAF untuk perlindungan banjir.⁵³ Pada tiga anak sungai sebelah timur India berhak menggunakan 33 MAF untuk irigasi dan pembangkit listrik.

Saat ini, India memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 17 MAF dan 12700 MW pada setiap tributari sungai sebelah timur, sedangkan Pakistan hanya mampu membangun pembangkit listrik sebesar 6717 MW.⁵⁴ Ketersediaan air untuk India telah menurun sejak tahun 2005 yaitu sebesar 1800 meter/kubik hingga tahun 2010 sebesar 1731 meter/kubik. Namun penurunan air secara drastis dialami oleh Pakistan yaitu sebesar 1200 meter/kubik pada tahun 2005 dan terus menurun hingga 1038 meter/kubik pada tahun 2010.⁵⁵ Berdasarkan laporan Pusat Internasional Woodrow Wilson tahun 2009 ketersediaan air di Pakistan turun hingga 70 persen yakni sebesar 1500 kubik/meter. Berdasarkan Perjanjian Sungai Indus Pakistan seharusnya menerima 55000 cusecs⁵⁶, namun pada tahun 2009 Pakistan hanya memperoleh 13000 cusecs pada musim dingin dan 29000 pada musim panas.⁵⁷ Penjelasan diatas menunjukkan bahwa India yang memiliki

⁵³ Hamid Sarfraz, "Revisiting the 1960 Indus Water Treaty", *Water International*, Vol. 38, No. 2 (Routledge, April 2013), 209, http://www.waterlawandgovernance.org/sites/default/files/documents/revisiting_the_1960_indus_waters_treaty_water_international.case_study.pdf (diakses pada 12 Desember 2013).

⁵⁴ Abbasi, "Indus Water Treaty", 11.

⁵⁵ Anonim, "Population growth will reduce water availability in Pakistan" *People's Daily*, 28 Juni 2010, <http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/7042509.html> (Diakses pada 8 Desember, 2013).

⁵⁶ Cusecs adalah satuan satu kaki kubik air per detik atau setara dengan 6,24 galon sama dengan 28 liter air bersih per detik. Untuk jumlah yang sangat besar menggunakan juta kaki acre atau MAF.

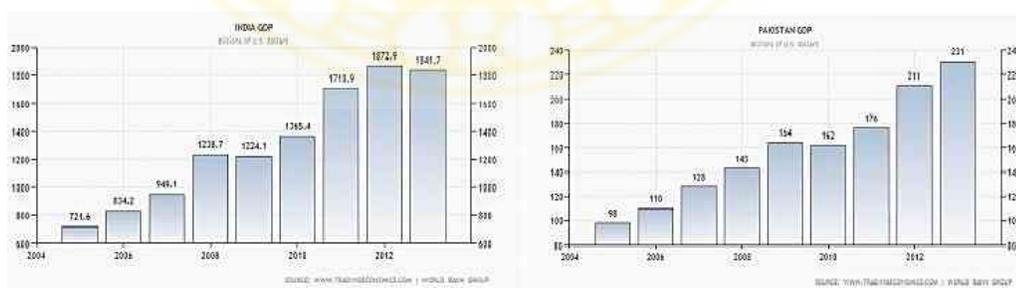
⁵⁷ Mogwai dalam Anonim, "Indus Water Treaty", 12.

kapasitas pengelolaan air lebih baik dari Pakistan dapat memanfaatkan alokasi air lebih maksimal untuk memenuhi permintaan energi air domestik.

II.1.2 Tiga Dimensi Kekuatan

Dimensi kekuatan yang pertama adalah **kapasitas struktural** yang meliputi kekuatan ekonomi, militer, dan kekuatan politik serta dukungan internasional. Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi indikator umum yang sering digunakan untuk mengukur kekuatan ekonomi sebuah negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi India pada tahun 2009-2010 sebesar 7,2 persen. Sedangkan pertumbuhan PDB Pakistan secara keseluruhan pada tahun yang sama yakni sebesar 3,3 persen.⁵⁸ Selama beberapa tahun terakhir Pakistan mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi yang tinggi pada tahun 2009 hingga mencapai 17,6 persen, dan lonjakan harga pangan menyebabkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran meningkat hingga 7,7 persen pada tahun 2012.⁵⁹

Grafik 2.2 Perbandingan PDB India dan Pakistan



⁵⁸ Anonim, "Pakistan sees 4pc GDP growth in 2010-2011" DAWN, 2010, <http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/thenewspaper/business/pakistan-sees-4pc-gdp-growth-in-201011-740> (Diakses pada 5 Desember 2013).

⁵⁹ Anonim, "Growth Resuming Dangers Remain" IMF World Economic Outlook, April 2012, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf> (Diakses pada 21 Maret 2014)

Anonim, Trading Economics, dan
<http://www.tradingeconomics.com/pakistan/gdp>
<http://www.tradingeconomics.com/india/gdp> (Diakses pada 23 Maret 2014)

Berdasarkan grafik 2.2 dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian India berada jauh diatas Pakistan. Pada tahun 2010 India berhasil bertahan dari pengaruh krisis keuangan global. Hal ini disebabkan karena kuatnya permintaan domestik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 mencapai 10,6 persen. Namun sejak tahun 2011 tingkat pertumbuhan ekonomi India mulai melambat hanya mencapai 4,8 persen pada September 2013 akibat penurunan pengeluaran pemerintah, inflasi tinggi, depresiasi mata uang India, dan penurunan jumlah investasi asing.⁶⁰ Tingkat inflasi yang tinggi hingga mencapai 12,11 persen terjadi pada tahun 2010, namun pada bulan Januari 2014 angka inflasi India menurun hingga 7,24 persen.⁶¹ Oleh sebab itu pemerintah India berusaha mengupayakan agar tingkat pertumbuhan ekonomi 2014 diperkirakan harus mencapai 5,4 persen.⁶²

Mengenai komponen PDB utama, pada tahun 2009-2010 terjadi penurunan di sektor pertanian Pakistan sebesar 4,7 persen pada tahun 2009 menjadi 3 persen pada tahun 2010.⁶³ Namun meningkat kembali pada tahun 2012-2013 yang semula hanya 20,1 persen menjadi 25,3 persen.⁶⁴ Sebaliknya, India mengalami peningkatan pada sektor jasa yang mencapai 66,1 persen, namun mengalami

⁶⁰ Anonim, "GDP up, Touches 4,8% in Q2" The Hindu, 29 November 2013, <http://www.thehindu.com/business/Economy/gdp-up-touches-48-in-q2/article5405276.ece> (diakses pada 2 Januari 2014).

⁶¹ Anonim, Inflation.eu, "Inflation India", 2014, <http://www.inflation.eu/inflation-rates/india/historic-inflation/cpi-inflation-india-2014.aspx> (diakses pada 23 Maret 2014).

⁶² Anonim, "Inflation India", 1.

⁶³ Anonim, "CIA World Factbook", <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html> (Diakses pada 21 Maret 2014).

⁶⁴ Anonim, "CIA World Factbook", 1.

penurunan pada sektor industri sebesar 9,1 persen hingga tahun 2013.⁶⁵ Secara keseluruhan berdasarkan data diatas, angka pertumbuhan ekonomi India masih cukup jauh diatas pertumbuhan ekonomi Pakistan. Hal ini dapat dilihat dari selisih PDB India sebesar 1,21 persen atau 6/5 dari PDB Pakistan pada akhir 2013.

Tabel 2.1 Kekuatan Militer Negara-Negara di Asia Selatan

Country	Land Tot Tot				GDP	Act Mil		Bud		Air		Cmbt	Ldrs	Eun	Eau	Sub	Mobi	Trad
	Brk	Power	Qual	Pos		Man	Bud	Man	AFV	Combt	Ldrs							
South Asia Nations																		
India	1	2290	35	1200	\$1300	1288	\$30000	\$23	5600	650	7	5	7	5	4	7		
Pakistan	2	699	24	169	\$150	619	\$4600	\$7	3200	380	6	4	6	4	3	7		
Myanmar	3	202	12	48	\$38	405	\$6000	\$15	600	120	5	3	5	3	1	4		
Sri Lanka	4	196	25	21	\$33	160	\$1300	\$8	330	35	7	5	8	3	3	1		
Bangladesh	5	92	19	150	\$70	150	\$1000	\$7	370	75	5	4	5	3	3	4		
Nepal	6	61	10	29	\$11	69	\$160	\$2	80	0	6	2	7	2	1	8		
Afghanistan	7	27	8	31	\$11	51	\$200	\$4	200	0	5	2	6	3	1	5		

Strategy Page, dalam Indus Water Treaty and Resolution of Water Conflicts Between Two Nuclear Nations (Pakistan and India), 2010, <http://www.feem-web.it/ess/ess12/files.papers/hayat.pdf>. (diakses pada 2 Oktober 2013)

Pengukuran kekuatan militer lebih rumit daripada pengukuran kekuatan ekonomi, sebab tingkat ambisi keamanan negara dapat tumbuh sesuai rejim yang berkuasa. Menteri Keuangan India meningkatkan anggaran militer hingga 5,3 persen tahun 2013/2014 yakni sebesar 37.4 juta dolar AS.⁶⁶ Pemerintahan India tetap melanjutkan proses modernisasi secara masif angkatan bersenjata walaupun berada pada kondisi inflasi yang tinggi dan rejim nilai tukar yang kurang menguntungkan.⁶⁷ Salah satu upaya nyata India dalam memodernisasi

⁶⁵ Anonim, "CIA World Factbook", 1.

⁶⁶ Laxman K. Behera, "India's Defence Budget 2013-14: A Bumpy Road Ahead" (IDSA, 4 Maret 2013), http://www.idsa.in/idsacomments/IndiasDefenceBudget2013-14_lkbehera_040313. (Diakses pada 22 Maret 2014)

⁶⁷ Behera, "India's Defence Budget", 1.

pertahanannya adalah menandatangani kontrak 126 pesawat tempur Rafale Perancis sebesar 15 hingga 20 juta dolar AS pada tahun anggaran mendatang.⁶⁸

Pakistan juga merupakan negara yang selalu meningkatkan anggaran pertahanan setiap tahun. Hal ini terus dilakukan karena kekuatan militer Pakistan hanya sekitar sepertiga dari kekuatan militer India.⁶⁹ Dana pertahanan untuk 1 Juli 2013 hingga 30 Juni 2014 mendatang meningkat dari 5,7 juta dolar AS menjadi 6,3 juta dolar AS.⁷⁰ Kekuatan Militer Pakistan dapat bertahan ketika beberapa kali melakukan peperangan dengan India disebabkan oleh adanya suplai pasokan senjata dari Cina. Selain itu, senjata nuklir yang sedang dikembangkan oleh Pakistan mampu membuat Pakistan terus bertahan dalam permainan konflik dengan India, sebagaimana pendapat Perkovich berikut *“Nuclear weapons give Pakistan the capacity to stay in the game, to continue to pop up and grab India by the dhoti”*.⁷¹

Indikator kekuatan struktural berikutnya adalah kekuatan politik dan dukungan internasional. Negara-negara kuat dan maju didunia memandang India sebagai suatu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Asia yang seharusnya terus bermain dibidang ekonomi, sedangkan Pakistan sebagai negara

⁶⁸ Behera, “India’s Defence Budget”, 1.

⁶⁹ SIPRI, “The SIPRI Military Expenditure Database”, [http://milexdata.sipri.org/result.php4; Comparisons of World Military Strengths Result, GFP, http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=India&country2=Pakistan&Submit=Compare+Countries](http://milexdata.sipri.org/result.php4;Comparisons%20of%20World%20Military%20Strengths%20Result,%20GFP,%20http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=India&country2=Pakistan&Submit=Compare+Countries) (diakses pada 14 April 2014).

⁷⁰ Anonim, “Pakistan raises annual defence budget by 10 percent” DAWN, 12 Juni 2013, <http://www.dawn.com/news/1017785/pakistan-raises-annual-defence-budget-by-10-per-cent> (Diakses pada 8 November 2013).

⁷¹ Perkovich dalam Anonim, “Indus Water Treaty”, 13.

yang harus memainkan peranannya dalam melawan terorisme.⁷² Kekuatan struktural India menguat karena peran utama perekonomiannya dan investasi dari negara-negara maju. Berdasarkan UNCTAD dalam laporan yang berjudul ‘*World Investment Prospect Survey 2009-2012*’ India merupakan negara lima teratas yang sangat menarik bagi investor internasional.⁷³ Selama tahun 2012 hingga 2014 India menjadi negara tiga teratas dimana berbagai perusahaan Inggris dapat melakukan bisnis yang lebih baik.⁷⁴

Kemitraan pertahanan strategis antara India dan Rusia telah menjadi konstituen utama dalam kebijakan luar negeri India pada pemerintahan Singh. Kalangan diplomatik India meyakini Rusia sangat penting dalam menjaga keseimbangan geopolitik Asia, tidak hanya itu Singh mengakui bahwa Rusia menjadi pendorong Kebijakan ‘*Look East*’ India. Sejak kunjungan Singh, Perdana Menteri India pada Oktober 2013 lalu menegaskan bahwa kemitraan Indo-Rusia meliputi hubungan pertahanan, energi nuklir, perdagangan, dan hidrokarbon. Peran penting Rusia disektor nuklir ditunjukkan dengan pembangunan dua tenaga nuklir berkekuatan 1000MW di Kudankulam yang telah selesai bahkan sebelum India menerima keanggotaan *Nuclear Suppliers Group* (NSG).

Pakistan menjadikan Cina sebagai mitra diplomatik Pakistan. Menurut Hussain “*friendship with China is the most important pillar of our foreign policy and security policy.*”⁷⁵ Ketika Mamnoon Hussain, Kepala negara Pakistan

⁷² Anonim, “Indus Water Treaty”, 14.

⁷³ Anonim, “FDI India”, <http://fdiindia.in/> (Diakses pada 2 Maret 2014).

⁷⁴ Anonim, “FDI India”, 1.

⁷⁵ Shannon Tiezzi, “China, Pakistan Flesh Out New ‘Economic Corridor’” *The Diplomat*, 20 februari 2014, <http://thediplomat.com/2014/02/china-pakistan-flesh-out-new-economic-corridor/> (Diakses pada 3 Maret 2014).

mengadakan kunjungan ke Beijing untuk menemui Xi Jinping Kepala Negara Cina dalam rangka membahas ‘Koridor Ekonomi Cina-Pakistan’ terdapat beberapa proyek antara lain pengembangan pelabuhan Gwaddar, pembangunan infrastruktur jalan dan kereta api, dan pembangunan tenaga nuklir di Karachi dengan bantuan dari Cina sebesar 6,5 juta dolar.⁷⁶ Menurut Juru Bicara Menteri Luar Negeri Cina koridor ekonomi tersebut berperan sebagai *driver for connectivity between South Asia and East Asia*.⁷⁷ Koridor tersebut memainkan peranan penting terhadap integrasi ‘*Greater South Asia*’ yang meliputi Cina, Iran, Afganistan, dan membentang hingga Myanmar.⁷⁸ Kedekatan hubungan militer antara Cina dan Pakistan masih dapat dilihat hingga sekarang, yakni Cina membantu manufaktur Pakistan dalam pembuatan lima puluh jet tempur JF-17.⁷⁹

Dimensi kekuatan kedua, **posisi tawar**. Berdasarkan pertimbangan keutungan letak geografis dan kapasitas struktural India, membuka jalan lebar bagi India dalam melakukan tindakan apapun terhadap alokasi aliran air ke Pakistan dan membuat Pakistan mematuhi segala agenda dan aturan permainan India. Mayoritas riparian hulu menggunakan air untuk mendapat kekuasaan lebih besar, sedangkan riparian hilir menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan

⁷⁶ Tiezzi, “Economic Corridor”, The Diplomat.

⁷⁷ Koridor tersebut merupakan salah satu upaya Cina untuk membentuk jalur sutra baru dan jalur sutra maritim yaitu rute alternatif dalam melengkapi perdagangan minyak dan sumber energi lainnya, transportasi, dan integrasi ekonomi dengan wilayah Asia Tengah dan Negara-negara Barat dalam Ibid.

⁷⁸ Mushahid Hussain, Ketua Institut Pakistan-Cina dalam Tiezzi, “Economic Corridor”, The Diplomat.

⁷⁹ Anonim, “Cina ‘welcome’ India-Pakistan DGMOs meet” The Hindu, 18 September 2013, <http://www.thehindu.com/news/international/world/china-welcomes-indiapakistan-dgmos-meet/article5474556.ece.htm> (Diakses pada 12 Mei 2014).

air lebih banyak.⁸⁰ Sedangkan berdasarkan kekuatan ekonomi dan stabilitas politik, negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar dan stabilitas politik yang kuat mendapat kekuasaan yang lebih besar pula dalam mempengaruhi hubungan antara negara riparian (baik negara tersebut sebagai riparian hulu maupun riparian hilir). India mendapatkan keunggulan posisi geografis, ekonomi, politik, dan dukungan strategis negara-negara kuat seperti halnya Amerika Serikat dan Inggris dalam isu Jammu dan Kashmir.

Dimensi kekuatan ketiga, **kekuatan ideasional**. Penggunaan kekuatan ideasional menjadi upaya mendapatkan kontrol sumber daya air dilakukan ketika kekuatan Hukum Perairan Internasional melemah yaitu hanya fokus pada pembagian volume air yang merata dan masuk akal tanpa memahami akar permasalahan mendasar.⁸¹ Kekuatan ideasional India terkait erat dengan posisi tawar negaranya, karena Pakistan sepenuhnya bergantung pada perairan Indus yang mengalir melewati wilayah sengketa Jammu dan Kashmir. Sehingga isu Jammu dan Kashmir menjadi isu utama yang terkait pula dengan isu sengketa perairan Indus. Kekuatan ideasional India mengikuti *Harmone Doctrine*⁸² yaitu kepemilikan air secara eksklusif oleh satu riparian yaitu riparian hulu atau dengan

⁸⁰ James Warner, "Mind the GAP – Working with Buzan: the Illisu Dam as a security Issue" (Occasional Paper 67, SOAS Water Issues Study Group, School of Oriental and African Studies/King's College : London, 2004a).

⁸¹ Mark Zeitoun dan M. Woodhouse, "Hydro-hegemony and International Water Law: Grappling with the gaps of Power and Law" *Water*, Vol. 2, (2008): 103-119.

⁸² Rafay Alam, et. al, "Re-Imagining the Indus" (Observer Research Foundation & Lahore University of Management Sciences, Oktober 2011): 9, <http://orfonline.org/cms/export/orfonline/documents/other/indus> (Diakses pada 23 maret 2014).

kata lain doktrin tersebut memberikan ‘Kedaulatan Teritorial Mutlak’⁸³ kepada riparian hulu.

Sedangkan Pakistan mendasarkan pada ide ‘*historic use*’. Pemikiran dasar tersebut membentuk persepsi India dan Pakistan terhadap *Indus Water Treaty* pada setiap permasalahan alokasi air dan pembangunan bendungan sebagaimana pada tabel 2.3 berikut. Pakistan memandang bahwa pembangunan bendungan Uri Todiam, Kishanganga, Salal, Wullar, Tulbul, Baglihar, dan bendungan lainnya pada sisi sungai yang mengalir untuk Pakistan menunjukkan niat India untuk mengendalikan aliran air Pakistan.⁸⁴ Sedangkan India menganggap bahwa Pakistan dapat menggunakan isu peperangan air sebagai strategi untuk mengalihkan isu terorisme dan menarik simpati dukungan internasional dalam mendukung usahanya terhadap Kashmir.⁸⁵

Tabel 2.2 Persepsi India dan Pakistan

PAKISTAN'S CONCERNS OVER IWT	INDIAN VIEW ON IWT
Construction of dams on Western Rivers violation of the spirit of the Treaty and can cause up to 30 percent water loss	Elaborate restriction on water use on Western rivers. Restriction on RoR dams will impact energy development in Kashmir and elsewhere
Construction of dams will give India the ability to affect Pakistan's water resource (assistance to Afghanistan in construction of water-storage dams also alluded to)	Fear that Pakistan is trying to nullify permissible uses clause in the IWT
FILLING OF BAGLIHAR RESERVOIR CITED AS PROOF OF INTENTIONS (THOUGH OFFICIALLY BAGLIHAR ISSUE IS RESOLVED)	INDIA WILL NOT CUT-OFF ECONOMIC NOSE TO SPITE PAKISTAN
Water issues have been inextricable linked to Indo-Pak issues	Poor water usage and water infrastructure in Pakistan

Rafay Alam, et. al, “Re-Imagining the Indus”, (Observer Research Foundation & Lahore University of Management Sciences, Oktober 2011): 17,

⁸³ Tajammal dalam Anonim, “Indus Water Treaty”, 15

⁸⁴ Khanzada Anonim, “Indus Water Treaty”, 21.

⁸⁵ Arvind Gupta, “Indus Water Treaty: Zardari ups the ante on Water Issues” IDSA, 30 Januari 2009, http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/IndusWaterTreaty_AGupta_300109. (Diakses pada 10 Januari 2014).

<http://orfonline.org/cms/export/orfonline/documents/other/indus.PDF> (diakses pada 23 Maret 2014)

II.1.3 Potensi Eksploitasi

India memiliki kapasitas teknik yang lebih besar dalam membuat bendungan dengan jumlah bendungan saat ini sebanyak 5102. Hal ini membawa India menjadi negara ketiga terbesar setelah Amerika dengan jumlah bendungan 9265 dan Cina dengan jumlah bendungan 5191.⁸⁶ Sedangkan Pakistan berada pada posisi 28 negara dengan jumlah bendungan hanya sebesar 154. Dengan memperoleh keunggulan kapasitas teknik, letak geografis dan kekuatan struktural India memiliki potensi yang sangat besar dalam mengurangi alokasi air ke Pakistan.

Dengan melihat hasil kekuatan asimetris antara India sebagai hidro-hegemon dan Pakistan sebagai riparian lemah, kemungkinan besar terjadi peningkatan konflik dan rentan campur tangan pihak eksternal untuk menciptakan kondisi perimbangan kekuatan.⁸⁷ Pihak eksternal tersebut memainkan peran krusial terhadap sumber daya dan kekuatan riparian dalam sistem perairan internasional. Peranan aktor tersebut menjadi semakin penting sebagaimana sumber daya semakin langka dan praktek penggunaan air bersama semakin menjadi perdebatan. Apabila riparian lemah mendapatkan dukungan aktor eksternal yang mampu menyediakan insentif bantuan yang mempromosikan kerjasama, maka hidrohegemon memilih untuk menggunakan proses negosiasi yang kooperatif dan kebijakan penggunaan air bersama yang lebih merata.

⁸⁶ Anonim, "Number of Dams by Country Members, General Synthesis" International Commission on Large Dams (ICOLD), http://www.icold-cigb.org/GB/World_register/general_synthesis.asp?IDA=206 (22 Maret 2014).

⁸⁷ Kehl, "hydropolitical complexes", 227-8,

Oleh sebab itu sebagai riparian lemah Pakistan mengajukan bantuan kepada Cina untuk memperoleh bantuan baik berupa dana, barang, dan jasa dalam pembangunan infrastruktur air Pakistan khususnya pada proyek Neelum-Jhelum yang berada diwilayah kependudukan Pakistan pada Kashmir. Berdasarkan hipotesis pada bab sebelumnya mengatakan bahwa kehadiran Cina diharapkan dapat mengurangi dominasi kekuatan hidro-hegemon dan mempromosikan kerjasama. Sebelum membahas mengenai pengaruh keterlibatan Cina dalam meningkatkan posisi tawar Pakistan dalam Sengketa Perairan Indus India-Pakistan. Pada sub-pembahasan berikut ini peneliti membahas mengenai latar belakang keterlibatan Cina yang meliputi motif dan peran Cina dalam sengketa Perairan Indus.

II.2 Latar Belakang Keterlibatan Cina dalam Pembangunan Infrastruktur Air Pakistan

Dampak modernisasi dan industrialisasi menyebabkan Cina kekurangan suplai air bersih. Pemerintah mengakui bahwa permasalahan air menjadi '*choking point*' bagi perkembangan ekonomi.⁸⁸ Mayoritas dua dari tiga wilayah otonomi dan provinsi lainnya mengalami kekurangan sumber daya air, sebab 84 persen air digunakan untuk keperluan industri dan 67 persen untuk aktifitas agrikultur.⁸⁹ Sumber daya air pada wilayah Cina tidak terdistribusi secara seimbang. Wilayah utara Cina secara mutlak mengalami kelangkaan air diperkirakan sekitar 35 persen

⁸⁸ Anonim, "Government Issues Stark Warning" China Water Risk, <http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/government-issues-stark-warning/> (Diakses pada 5 November 2013)

⁸⁹ Anonim, "Who's Running Dry? Provinces, Autonomous Regions and Municipalities" China Water Risk, 2011, <http://chinawaterrisk.org/big-picture/whos-running-dry/> (Diakses pada 12 Desember 2013)

dari total populasi wilayah utara, hanya ada 7 persen jumlah ketersediaan air, sedangkan wilayah selatan Cina kaya sumber daya air.⁹⁰ Namun persediaan air tersebut tidak layak pakai karena terkena dampak polusi air. Terdapat 90 persen air bawah tanah yang tercemar, 19 persen sungai, 35 persen danau beserta bendungan untuk penggunaan industri dan agrikultur juga tercemar.⁹¹ Sehingga secara keseluruhan ada 78 persen tidak layak untuk konsumsi manusia.

Sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pesat dalam globalisasi ekonomi menghadapkan Cina pada permasalahan perekonomian dan keterbatasan sumber daya. Negara Cina memiliki keuntungan komparatif dalam pasar global yaitu tenaga kerja yang murah, namun memiliki kekurangan suplai sumber daya energi air yang layak konsumsi.⁹² Apabila kelangkaan air tersebut tidak segera diselesaikan maka dalam jangka menengah dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, penurunan tingkat produktifitas sumber daya manusia hingga proses produktifitas pada sektor industri yakni pandangan perusahaan asing mengenai keterbatasan operasi perusahaan dan rantai suplai produk. Hal tersebut dapat mempengaruhi harga produk, biaya operasional, keuntungan, dan pertumbuhan masa depan. Permasalahan pada sektor sosial juga pasti muncul seperti relokasi dan konflik antar wilayah dalam memperebutkan sumber daya air.

⁹⁰ Nazia Hussain, Water: The New Dimension in India-China Relations, Centre for Development and Peace Studies, <http://cdpsindia.org/pdf/water%20war.pdf>. (Diakses pada 12 November 2013)

⁹¹ Anonim, "China Water Risk Goes Live" China Water Risk, 2011b, <http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/china-water-risk-goes-live/>. (Diakses pada 5 Desember 2013)

⁹² IISD, "An Environmental Impact Assessment of China's WTO Accession-An Analysis of Six Sectors" (IDSA, 2004), <http://www.cbd.int/impact/case-studies/cs-impact-cciced-eia-en.pdf>. (Diakses pada 5 Desember 2013)

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan diatas, maka dirumuskan kebijakan Cina *12th Five Years Plan* (12FYP) yang telah menjadi bagian dari *Central Plan* dengan tujuan mengatasi kelemahan dalam kebijakan air sebelumnya dengan meningkatkan penggunaan PLTA.⁹³ Fokus kebijakan tersebut adalah konservasi dan pembersihan sumber daya air yang tercemar, namun hal ini justru meningkatkan biaya operasional ekspor produk Cina. Karena keterbatasan suplai air internal, Cina membangun bendungan pada sungai lintas batas, menambah kapasitas penyimpanan air, dan meminimalisasi penggunaan batubara sebagai upaya untuk mengurangi polusi dan membantu kontrol perubahan iklim.⁹⁴

Strategi Cina dalam menghadapi kelangkaan air dan memperoleh suplai air pada wilayah perairan internasional (perairan perbatasan dengan negara lain) yaitu tidak pernah mengadakan perjanjian penggunaan air bersama secara mengikat dengan negara riparian lainnya serta membangun lebih banyak bendungan yang selebihnya berada pada beberapa negara lain.⁹⁵ Kebijakan membangun bendungan secara masif ternyata dapat memicu konflik, seperti halnya pada pembangunan PLTA terbesar Cina yang terletak di Motuo, Great Bend dekat perbatasan India yang memiliki kapasitas pembangkit energi listrik dua kali lipat dari bendungan Three Gorges dan berpotensi membentuk bagian

⁹³ D, Tan., "8 Take Aways: 2 Degrees Celsius and Water" China Water Risk, 2012, <http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-takeaways-two-degrees-celsius-water/>. (Diakses pada 5 Desember 2013)

⁹⁴ J, Mochizuki dan Z, Zhang., "Environmental Security and its Implications for China's Foreign Relations" Social Science Research Network, (2011):11, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1808628, (diakses pada 21 Desember 2013).

⁹⁵ B. Chellaney dan A.J, Tellis, "A Crisis to Come? China, India and Water Rivalry" (Carnegie Endowment for International Peace, 2011), <http://carnegieendowment.org/2011/09/13/crisis-to-come-china-india-and-water-rivalry/54wg> (diakses pada 21 Desember 2013).

garis Barat (*Western line*) dari *South-North Water Diversion Project*.⁹⁶ Namun kebijakan dan strategi tersebut masih tidak cukup dalam mengatasi permasalahan air di Cina. Pemerintahan Cina mendorong perusahaan-perusahaannya untuk pergi keluar mencari sumber daya dengan menawarkan investasi berupa pinjaman yang diberikan perusahaan Cina dalam membantu pembangunan bendungan. Kebijakan luar negeri Cina tersebut tercantum dalam kebijakan '*Going Global*'. Dampak dari kebijakan Cina diatas, telah mengantarkan Cina sebagai pembangun terbesar dan penyedia dana pembangunan bendungan global, salah satunya proyek air di Pakistan.

Kebangkitan ekonomi Cina yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya menjadi bangsa yang lapar sumber daya dan energi. Wilayah sengketa kependudukan Pakistan pada Kashmir (PoK) merupakan tempat yang kaya akan sumber daya alam khususnya air dan mineral. Kehadiran Cina di PoK dapat diinterpretasi bahwa Cina ingin mendapatkan manfaat sumber daya alam PoK untuk kebutuhan peningkatan perekonomian Cina. Oleh sebab itu, dalam konteks sengketa perairan Indus dapat diidentifikasi bahwa Cina memiliki dua peranan yaitu peran sebagai pengembang infrastruktur dan peran persuasif yang dapat mempengaruhi intensitas konflikual dan kerjasama antara India-Pakistan pada sengketa perairan Indus.

Sebagaimana dalam teori hidropolitik kompleks pada bab sebelumnya, keterlibatan Cina sebagai pengembang infrastruktur air Pakistan, tidak terlepas

⁹⁶ Proyek South-North Water Diversion merupakan proyek transfer air dari selatan ke wilayah utara yang dimulai sejak tahun 2002 air melalui tiga kanal besar, dimana eastern dan central lines akan selesai pada tahun 2014, sedangkan western lines akan dibangun bendungan pada Great bend, sungai Yarlung TsangPo yang mengalir ke India menjadi sungai Brahmaputra.

dari hubungan diplomatik Cina-Pakistan yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan (*counterpoise*) pengaruh kekuatan India.⁹⁷ Terdapat dua kategori spesifik kepentingan Cina yaitu keamanan dan energi. Isu keamanan tidak terlepas dari tujuan ekonomi Cina yang secara otomatis membutuhkan stabilitas kawasan Asia Selatan. Menurut Hali dan Akhtar, Cina secara aktif mempromosikan etos bahwa “*economy is the new currency of security*”.⁹⁸ Sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh Cina dalam meningkatkan hubungan baik India-Pakistan bertujuan untuk memperoleh stabilitas (politik dan keamanan) kawasan yang dapat mendorong pertumbuhan investasi dan perkembangan ekonomi Cina di Asia Selatan.⁹⁹

Mengenai isu energi, Cina memandang bahwa geopolitik Pakistan sangat penting dan strategis bagi Cina terutama rute baru melalui pelabuhan Gwaddar yaitu akses rute laut tercepat dan teraman untuk impor minyak dan mineral yang menghubungkan Xinjiang ke Lautan Hindia.¹⁰⁰ Cina mengimpor 50 persen minyak dari Timur Tengah dan 20 persen dari Afrika melalui Selat Malaka. Rute perairan tersebut mudah terinterupsi oleh basis militer Amerika Serikat dan India dibawah wilayah otoritas *Proliferation Security Initiative* (PSI).¹⁰¹ Oleh sebab itu, Cina dengan mudah bersedia menempatkan investasi dan membantu perkembangan berbagai proyek infrastruktur air yang tergabung dalam proyek

⁹⁷ Amb Arif Kamal dalam Qandeel Siddique, “Deeper than the Indian Ocean? An Analysis of Pakistan-China Relations”, SISA Report no. 16 (Oslo, Februari 2014), 9.

⁹⁸ Siddique, “Pakistan-China Relations”, 18.

⁹⁹ Siddique, “Pakistan-China Relations”, 18.

¹⁰⁰ Siddique, “Pakistan-China Relations”, 19.

Pelabuhan ini dilengkapi dengan electronic eavesdropping posts yaitu sejenis teknologi penyadap untuk memonitor lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz dan Laut Arab.

¹⁰¹ Siddique, “Pakistan-China Relations”, 19.

*deep sea Gwaddar*¹⁰² (salah satunya proyek Neelum-jhelum yang terletak di wilayah PoK) dan *economic corridor*¹⁰³ untuk kebutuhan suplai energi Cina dengan tujuan untuk menciptakan jejaring akses sumber daya alam serta memperkuat kehadirannya di wilayah Asia Selatan. Selain itu, upaya diatas digunakan oleh Cina untuk menciptakan atmosfer yang lebih aman dalam meningkatkan sentimen pro-Cina dan menekan anti-Cina yakni kelompok-kelompok militan.

Ketika Cina memainkan peranannya sebagai pengembang infrastruktur bendungan, ada keuntungan yang diperolehnya antara lain sebagai berikut. Bagi setiap negara yang mengajukan bantuan dana dan keperluan infrastuktur pembangunan bendungan untuk tujuan agrikultur, sumber energi listrik, dan lainnya akan menjadi tujuan utama impor Cina terhadap produk-produk pertanian atau bahan keperluan industri. Pola perdagangan seperti ini dikenal dengan istilah impor pasokan air dalam bentuk virtual (*virtual water import*). Seperti halnya Cina membutuhkan serat kapas (*cotton lint dan cotton linter*), kain katun dan benang katun dari negara Pakistan.¹⁰⁴ Cara lain Cina mendapatkan suplai air virtual antara lain melalui proyek PLTA yang apabila telah beroperasi maka 85 persen dari hasil penjualan listrik masuk dalam rekening penampungan Bank Exim Cina sesuai dengan aturan pinjaman yang telah ditentukan.¹⁰⁵

¹⁰² Lihat hal 10 note 33

¹⁰³ Siddique, "Pakistan-China Relations", 19.

¹⁰⁴ W. Qiang, et. al, "Agricultural trade and virtual land use: The case of China's crop trade", Land Use Policy 33 (2013): 149, <http://sourcedb.igsnr.cas.cn/zw/lw/201303/P020130326514404914592.pdf> (Diakses pada 23 februari 2014).

¹⁰⁵ The new Great Walls, A Guide to China's Overseas Dam Industry, Second Edition, International Rivers, (November 2011):11, http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/intlivers_newgreatwalls_2012_0.pdf (diakses pada 12 Desember 2013).

Hal ini menjadi alasan mendasar Cina berkenan memberikan bantuan pinjaman baik pinjaman lunak maupun kredit pembeli ekspor komersial (*commercial export buyer's credit*) untuk pembangunan proyek air di Pakistan. Selain itu, dengan membantu pengembangan infrastruktur air di Pakistan memungkinkan perusahaan Cina mendapatkan pangsa pasar murah untuk akses minyak, mineral, bijih tembaga dari proyek Copper-Gold Saindak, proyek Lead-Zinc Duddar, dan proyek Batubara Thar&Badin yang diakses secara mudah dan aman melalui Gwaddar dan jalan raya lurus (*highway*) Karakoram.¹⁰⁶

Selanjutnya, peran persuasif Beijing dalam mendorong proses perdamaian India-Pakistan masih terus berlanjut. Cina menyambut baik peningkatan hubungan antara India dan Pakistan, karena menjadi suatu hal vital bagi kemakmuran regional dan perkembangan ekonomi Cina.¹⁰⁷ Pakistan menghargai model pendekatan India-Cina yang mengutamakan *win-win solution*. Sebagai aktor eksternal, Cina menganjurkan Pakistan untuk mengembangkan perekonomiannya dengan mempercepat hubungan baik meliputi hubungan dagang dengan India.¹⁰⁸

Pihak Cina percaya bahwa sengketa yang terjadi antara India-Pakistan (baik sengketa Kashmir maupun sengketa perairan Indus) dapat terselesaikan atau teredam melalui pengejaran kepentingan yang bersifat komersil. Perdana menteri Yousuf Raza Gilani mengatakan bahwa pembukaan perdagangan dengan India akan membantu membawa stabilitas kawasan sebagaimana Cina telah menasehati

¹⁰⁶ The new Great Walls, A Guide to China's Overseas Dam Industry, First Edition, International Rivers, (Juli 2008):6, http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/new_great_walls_report.pdf (diakses pada 12 Desember 2013).

¹⁰⁷ Rup Narayan Das dalam Gupta, "China Yearbook 2012", 43.

¹⁰⁸ Lisa Curtiz dan Derek Scissors dalam Siddique, "Pakistan-China Relations", 22.

Pakistan untuk mempromosikan hubungan perdagangan dengan India.¹⁰⁹ Beijing menyarankan bahwa seharusnya Pakistan melepaskan Kashmir sebagai wilayah yang dipersengketakan dan bersungguh sungguh fokus pada bagaimana memperbaiki keterpurukan ekonomi Pakistan.¹¹⁰

Secara eksplisit, Cina ingin mempertahankan perimbangan kekuatan di Asia Selatan dengan tidak membiarkan India terlalu mendominasi wilayah Asia Selatan.¹¹¹ Cina tidak lagi mendukung klaim Pakistan atas Kashmir dan tidak mengatakan apapun tentang menegakkan resolusi PBB dalam mendukung kasus Pakistan. Sebaliknya, Cina mengadopsi posisi yang sama dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menyarankan kedua pihak agar selalu menyelesaikan permasalahan melalui negosiasi. Selebihnya, terlepas dari sengketa Indus, Cina khawatir akan infiltrasi kelompok-kelompok ekstremis yang diduga dari Pakistan menuju wilayah Xinjiang Utara-Barat.

Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Cina, Hua Chunying mengatakan bahwa Pakistan dan India adalah negara yang penting di Asia Selatan, peningkatan hubungan antara kedua negara sangat vital terhadap pentingnya perdamaian, stabilitas, dan perkembangan regional.¹¹² “Sebagai negara tetangga sekaligus teman dari Pakistan dan India, Cina akan seperti sebagaimana selalu terjadi, yaitu mendukung Pakistan dan India secara tepat dalam menyelesaikan sengketa secara relevan melalui dialog damai.”¹¹³ Pejabat Cina juga menekankan

¹⁰⁹ Sanya Khetani, “Could The ‘China Model’ Finally Improve Relations Between India and Pakistan?”, 9 April 2012, <http://www.businessinsider.com/india-pakistan-china-model-2012-4?IR=T&> (Diakses pada 12 Mei 2014).

¹¹⁰ Siddique, “Pakistan-China Relations”, 9

¹¹¹ Siddique, “Pakistan-China Relations”, 9

¹¹² Anonim, “Cina ‘welcome’ India-Pakistan DGMOs meet”.

¹¹³ Anonim, “Cina ‘welcome’ India-Pakistan DGMOs meet”.

bahwa kedekatan Cina dengan Pakistan tidak diarahkan pada pihak ketiga selama dekade terakhir, karena Beijing juga ingin meningkatkan hubungan dengan India baik dibidang strategis maupun komersial.¹¹⁴

Sebagai negara pembangun dam terbesar, Cina memiliki komitmen untuk tidak turut mencampuri urusan internal dan eksternal negara yang bersangkutan.¹¹⁵ Negara Cina telah menyampaikan kepada India bahwa ia tidak berperan sebagai pemecah dalam hubungan India-Pakistan begitu pula dalam upaya memainkan peran sebagai mediator pada sengketa India-Pakistan. Dalam konteks isu terkait yang lebih besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Sun Weidong, pejabat kementerian Luar Negeri Cina bahwa aktifitas Cina dalam pengembangan ekonomi pada wilayah kependudukan Pakistan di Kashmir bukan berarti bahwa Cina turut meratifikasi klaim Pakistan atas wilayah Kashmir tersebut.¹¹⁶ Ia menegaskan pula bahwa sengketa itu antara India dan Pakistan, sehingga setiap kali muncul sengketa atau ketegangan, Cina tidak akan turut mengadili.¹¹⁷

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Cina memandang keterlibatannya dalam pembangunan infrastruktur semua proyek di Pakistan tanpa prasangka (pandangan atau persepsi) apapun terhadap sengketa India-Pakistan.¹¹⁸ Beijing sedang mencari perspektif baru untuk membangun kedekatan hubungan antara Cina-India-Pakistan. Usaha Beijing dalam memperkuat hubungan dengan kedua

¹¹⁴ Anonim, "Cina 'welcome'" India-Pakistan DGMOs meet".

¹¹⁵ The New Great Walls, "China's Ocerseas Dam", 6.

¹¹⁶ Rup Narayan Das dalam Gupta, "China Yearbook 2012", 43.

¹¹⁷ Rup Narayan Das dalam Gupta, "China Yearbook 2012", 43.

¹¹⁸ Rup Narayan Das dalam Gupta, "China Yearbook 2012", 43.

negara tidak harus dilihat dengan kecurigaan.¹¹⁹ Kecenderungan ini didasarkan perspektif kebijakan Cina dibawah Kebijakan 12 Rencana Lima Tahun (*12th five years plan*).¹²⁰

II.3 Pengaruh Keterlibatan Cina dalam Meningkatkan Posisi Tawar Pakistan

Pada sub pembahasan berikut akan dijelaskan indikator pengaruh keterlibatan Cina dalam meningkatkan posisi tawar Pakistan melalui dua indikator berikut. Pertama, total dagang dan bantuan Cina terhadap Pakistan dari tahun 2001-2007 dan 2008-2014. Kedua, perkembangan infrastruktur dan mekanisme kelembagaan yang dapat meliputi pembangunan bendungan secara sepihak, internasionalisasi, dan beberapa proyek yang sedang dibangun maupun sedang direncanakan dimasa yang akan datang.

II.3.1 Volume Perdagangan dan Bantuan Cina terhadap Pakistan

Berakhirnya sistem bipolaritas, perluasan gelombang kapitalisme mendapatkan momentum melalui globalisasi ekonomi.¹²¹ Globalisasi ekonomi telah melahirkan kondisi ketergantungan, sehingga salah satu cara agar dapat bertahan adalah membuka diri dengan meningkatkan kerjasama ekonomi secara bilateral maupun multilateral. Hal tersebut juga dilakukan oleh negara Cina dan

¹¹⁹ KJM Varma, "China for closer relations with India and Pakistan", 24 Juni 2011, <http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-China-India-Pak-ties-require-new-perspective/20110624.htm#1> (Diakses pada 12 mei 2014)

¹²⁰ Varma, "China", 1.

¹²¹ Menurut Kaum Marxis perluasan gelombang kapitalisme pertama kali mengambil bentuk imperialisme dan kolonialisme kemudian muncul dekolonialisasi di Asia dan Afrika Perluasan selanjutnya mengambil bentuk globalisasi ekonomi yang di pimpin oleh perusahaan transnasional raksasa. Robert Jackson dan George Sorensen. "Introduction to Internasional Relations", (New York: Oxford University Press, 1999), 241.

Pakistan. Cina merupakan partner dagang keempat terbesar, tempat impor kedua terbesar, dan pasar ekspor ketujuh terbesar di Pakistan. Ekspor utama Cina ke Pakistan meliputi produk teknologi tinggi, kimia, plastik, furnitur atau sejenis properti rumah lainnya. Sedangkan ekspor utama Pakistan ke Cina antara lain kapas, tekstil, produk akuatik, kulit, dan sebagainya.¹²²

Pada tahun 2001, Perdana Menteri Cina Zhu Rongji mengadakan kunjungan resmi ke Pakistan. Hasil dari kunjungan tersebut antara lain Kesepakatan antara ZTE dengan PTCL¹²³ kerjasama teknis dan ekonomi, kerjasama turisme, penyewaan proyek tembaga-emas Saindak, suplai lokomotif, suplai gerbong penumpang kereta api, serta jalur pipa minyak. Zhu Rongji mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut sangat penting untuk perkembangan Pakistan, sehingga pihak Cina mendukung penuh dan menyediakan bantuan atas proyek-proyek diatas khususnya proyek pada Gwadar dan Coastal Highway.¹²⁴

Kunjungan yang lainnya juga dilakukan oleh Presiden Musharraf pada bulan November 2003 kemudian dilanjutkan oleh Perdana Menteri Shaukat Aziz pada bulan Desember 2004 telah melakukan penandatanganan dokumen penting yaitu *Joint Declaration on Direction of Bilateral Relations* yang merupakan cetak

¹²² Professor Guo Andrew Wang, "China's Business Relations with Australia and Pakistan" (ppt) Dept. of International Trade, Zhejiang Gongshang University, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHsQFjAl&url=http%3A%2F%2Feconet.zjgsu.edu.cn%2Fandrew.wang%2Fzd%2F120418_China's%2520Trade%2520Relations%2520with%2520Australia%2520and%2520%2520Pakistan.ppt&ei=2FS-UoSII8OHrgLyYCIDQ&usq=AFQjCNH86eQ7pzTywty0wgTqWnWaA7HTOA&sig2=PlgvRqWZrYXKYZUgDsZ5Jg&bvm=bv.58187178.d.bmk (diakses pada 23 Desember 2013).

¹²³ Fazal ur Rahman, "Pakistan-China trade and investment relations" (2011) http://www.issi.org.pk/publication-files/1299822989_45060000.pdf (Diakses pada 3 Desember 2013).

¹²⁴ Proyek tersebut merupakan salah satu isi dari kerangka Five-Year Plan dimana Cina melihat potensi ekonomi besar di pelabuhan Gwaddar yang berfungsi menyediakan fasilitas hubungan fisik dengan Asia Selatan, Barat, dan sekitar Lautan India hingga Selat Malaka. Sekarang kontrol operasional pelabuhan tersebut berada dibawah Chinese Overseas Port Holdings Ltd.

biru untuk kerjasama ekonomi pada masa depan yang menekankan perkembangan ekonomi. Dalam kurun waktu yang sama, Pakistan mengumumkan status *Free Market Economy* untuk Cina.¹²⁵ Peningkatan volume dagang antara Cina dan Pakistan terus meningkat hingga pada tahun 2005 yang mencapai 4,5 milyar US\$. Namun kenyataanya, hal ini tentu lebih menguntungkan pihak Cina dengan kata lain Cina mengalami peningkatan ekspor yang signifikan sedangkan Pakistan mengalami banjir produk impor Cina.¹²⁶ Sebagian besar Pakistan mengekspor barang mentah ke Cina seperti kapas, tembaga, dan krom yang lebih bernilai tinggi daripada barang manufaktur ekspor Cina. Prosentase jumlah ekspor Cina ke Pakistan mencapai lebih 20 persen dari impornya. Sedangkan ekspor Pakistan ke Cina hanya sebesar 0,13 persen dari impor Cina.¹²⁷

Grafik 2.3 Jumlah Ekspor dan Impor Pakistan ke Cina



Pemerintahan Pakistan, t.t.,
http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/tdap.gov.pk/ContentPages/2552076842.pdf#page=1 (diakses pada 13 Desember 2013).

¹²⁵ Rahman, "Pakistan-China trade", 3.

¹²⁶ Aftab Maken, "FTA benefiting China more than Pakistan", The News, 12 Agustus 2011, <http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=62419&Cat=3>. (diakses pada 13 Desember 2013)

¹²⁷ Maken, "FTA benefiting China", 1.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, Pakistan berusaha mempengaruhi Cina untuk berinvestasi pada sektor industrial baik publik maupun privat. Namun hal tersebut tidak membawa kemajuan yang signifikan, sebab ada ketidaksamaan pertumbuhan dan perkembangan industri secara teknis dimana Cina memiliki kapabilitas produksi manufaktur beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan Pakistan. Sehingga Cina tidak tertarik melakukan investasi dengan komunitas bisnis Pakistan yang hanya dapat meningkatkan surplus ekspor pasar Cina bagi Pakistan. Selain itu, tingginya beberapa resiko ekonomi, politik, dan sosial dari lingkungan sekitar Pakistan kurang dapat memberi jaminan keamanan berinvestasi. Setidaknya, berdasarkan grafik 2.1 jumlah ekspor Pakistan ke Cina dapat terus meningkat walaupun jumlah impor dari Cina ke Pakistan empat kali dari jumlah ekspor Pakistan ke Cina.

Perkembangan yang cukup signifikan pada total volume perdagangan antara kedua negara terjadi setelah penandatanganan *China-Pakistan Free Trade Agreement* (CPFTA) pada tanggal 24 November 2006 yang secara efektif berlaku mulai 1 Juli 2007.¹²⁸ Cina dan Pakistan mengadakan *joint venture* dengan *Pak-China Investment Company Limited* (PCICL) tahun 2007 yang didukung oleh dukungan dari Menteri Keuangan Pakistan dan Bank Cina, CDB. Cina dan Pakistan juga mengembangkan zona ekonomi di Pakistan, dimana Pakistan harus menyediakan beragam insentif proyek yang menerima setidaknya 40 persen dana

¹²⁸ Shahid Yusuf, "Can Chinese FDI Accelerated Pakistan's Growth?" (Working Paper, International Growth Centre, Goerge Washington University, Februari 2013) <http://www.theigc.org/sites/default/files/Shahid%20Yusuf%20Final.pdf> (Diakses pada 5 Desember 2013)

dari investor.¹²⁹ Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka harus ada pengurangan tarif untuk barang yang diproduksi di zona ekonomi.¹³⁰

Usaha dalam memperkuat perdagangan hingga beberapa tahun kedepan, Cina dan Pakistan menandatangani *Agreement on Trade in Services* pada tanggal 21 Februari 2009. Hal ini terkait dengan penurunan total volume dagang antara Cina dan Pakistan tahun 2009 akibat krisis global yang hanya mencapai US\$ 5,037 juta.¹³¹ Walaupun terjadi penurunan akibat krisis ekonomi, tahun berikutnya volume dagang Cina-Pakistan dapat kembali meningkat sebagaimana dampak positif adanya FTA. Namun tetap saja keuntungan terbesar hanya dapat dinikmati oleh pihak Cina. Hal ini disebabkan karena perbedaan kapasitas industri yang mana Cina dapat menghasilkan produk manufaktur lebih unggul daripada Pakistan. Hal tersebut terbukti dengan jumlah ekspor Cina ke Pakistan adalah 20 persen lebih dari jumlah impornya.¹³²

Pada tahun 2010, ada pembaharuan Program Perkembangan sebanyak 36 proyek yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, energi, air, lingkungan, dan teknologi informasi komunikasi.¹³³ Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pihak Pakistan mendorong Cina untuk mengeksplor kesempatan ekonomi Pakistan. Hingga saat ini Pakistan merupakan satu satunya negara di Asia Selatan yang membuat FTA dan perjanjian pertukaran mata uang (*currency swap agreement*) dengan Cina. Pelaksanaan hasil perundingan FTA secara efektif dilakukan pada

¹²⁹ Pravakar Sahoo, "The Economic Relations of China and India with Pakistan: A Comparative Analysis", Vol. 19, No. 1, Asia-Pacific Development Journal, (Juni 2012), http://www.unescap.org/sites/default/files/chap-1-Pravakar_0.pdf (Diakses pada 23 Januari 2014).

¹³⁰ Sahoo, "The Economic Relations", 21.

¹³¹ Rahman, "Pakistan-China trade", 10.

¹³² Rahman, "Pakistan-China trade" 7.

¹³³ Siddique, "Pakistan-China Relations", 27.

bulan Januari 2012 meliputi eliminasi bea masuk, pengurangan tarif bahkan eliminasi tarif akan selesai pada periode lima tahun.¹³⁴ Pada tahun yang sama keseluruhan proyek Cina yang berada di Pakistan berjumlah 19,87 milyar dollar AS.¹³⁵

Agar dapat menstimulasi pertumbuhan dagang, pada 7 Mei 2013 Bank Negara Pakistan dan Bank Rakyat Cina (PboC) menyetujui penerapan perjanjian pertukaran mata uang (CSA) pada perdagangan antar kedua negara secara langsung, sehingga tidak membutuhkan dollar Amerika Serikat sebagai mata uang perantara dagang.¹³⁶ grafik 2.6 berikut menunjukkan peningkatan total volume dagang Cina-Pakistan yang terus meningkat namun sempat mengalami penurunan akibat krisis global. Total volume dagang kedua negara pada tahun 2015 ditargetkan harus mencapai 15 milyar dollar AS.

Grafik 2.6 Total volume dagang Cina-Pakistan



¹³⁴ Siddique, "Pakistan-China Relations", 29.

¹³⁵ Khalid Mahmood dalam Siddique, "Pakistan-China Relations", 32.

¹³⁶ Erum Zaidi, "Pak-China currency swap accord implemented" The News, 8 Mei 2013, <http://www.thenews.com.pk/Todays-News-3-175962-Pak-China-currency-swap-accord-implemented> (diakses pada 10 Januari 2014).

Hasil olahan Peneliti dari beberapa sumber berikut: Professor Guo An (Andrew) Wang, China's Business Relations with Australia and Pakistan (ppt) Dept. of International Trade, Zhejiang Gongshang University, China; Pakistan China Trade Relations, http://www.tdap.gov.pk/china_tab.php; Menteri Perdagangan Cina dan BeaCukai Cina, Pakistan Bilateral Trade Statistics from 1993 sampai 2008, 21 Mei 2009, <http://pk2.mofcom.gov.cn/aarticle/bilateralcooperation/labourlawhost/200905/20090506266956.html>; Kashgar Offers Golden Opportunities to Pakistani Traders: Ambassador Masood Khan, April 2011 dalam <http://www.nihao-salam.com/news-detail.php?id=NA==>; Pakistan-China Trade Crosses US\$ 12 b mark, 29 Januari 2013, dalam http://www.chinadaily.com.cn/world/2013-01/29/content_16185138.htm; Fazal ur Rahman, Pakistan-China trade and investment relations, http://www.issi.org.pk/publication-files/1299822989_45060000.pdf. (Diakses pada 3 Desember 2013).

II.3.2 Perkembangan Infrastruktur Proyek Air di Pakistan

Upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan, Pakistan meningkatkan kapasitas penyimpanan tenaga air sebagai strategi dasar negara Pakistan, dimana dukungan Cina dalam membantu pengembangan PLTA menjadi suatu hal yang penting.¹³⁷ Sejak tahun 2005 yang lalu, Pemerintahan Pakistan telah mengeluarkan Kebijakan Lingkungan Nasional yang mana salah satu area kebijakan tersebut adalah suplai air dan manajemen air yang menekankan titik fokus pada polusi di perairan tawar dan perairan pesisir, perubahan iklim, pengembangan kerangka hukum dan kebijakan, pengawasan kualitas air, sistem pengaliran, pengelolaan air dengan biaya murah, teknologi, dan sebagainya.¹³⁸

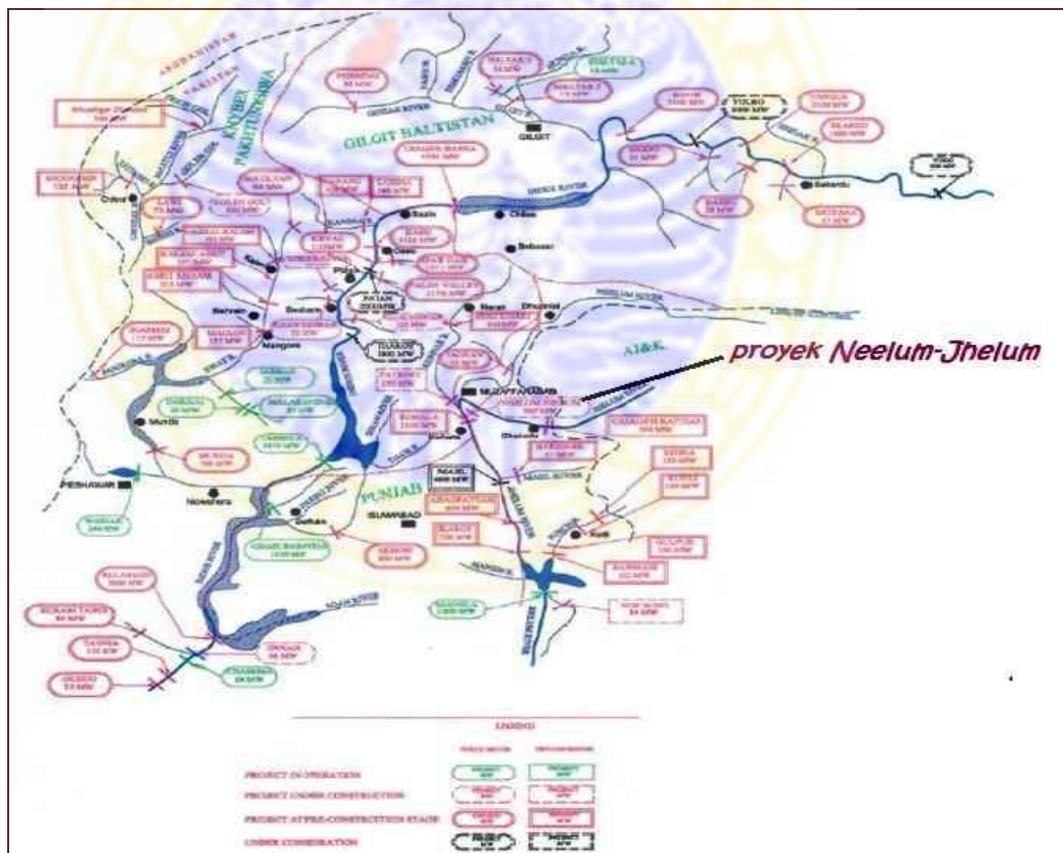
Kedekatan hubungan Pakistan dengan Cina masih menjadi pilar dari kebijakan luar negeri Pakistan. Perkembangan hubungan Cina dan Pakistan saat fokus pada isu perkembangan industri dan energi seperti PLTA, batubara, nuklir,

¹³⁷ Anonim, "China Extends Intensive Cooperation to Pak Water, Power Sector" Associated Press of Pakistan, http://www.app.com.pk/en/_index.php?option=com_content&task=view&id=124694&Itemid=252 (diakses pada 21 Februari 2014)

¹³⁸ Khalid Chandio, "Water Security: Pakistan and Regional Perspective", IPRI Journal XII, no. 1 (Winter, 2012):133, <http://ipripak.org/journal/winter2012/Opinion%202.pdf> (diakses pada 3 Maret 2014).

sains, teknologi, mineral, jasa. Syed Naveed Qamar, Menteri Air dan Tenaga mengatakan bahwa Cina satu satunya negara yang membantu Pakistan mengatasi krisis energi saat ini.¹³⁹ Sektor publik yang menangani pembangunan proyek PLTA di Pakistan antara lain WAPDA, SHYDO, HEB, AJ&K, dan Water and Power Department Gilgit-Baltistan. Sedangkan pada sektor privat ada Independent Power Producers (IPP), Private Power and Infrastructure Board (PPIB), Punjab Power Development Company Ltd (PPDCL), dan PPDB. Berikut letak proyek PLTA utama Pakistan dari beberapa provinsi dan sektor.

Gambar 2.1 Proyek-proyek PLTA Besar di Pakistan



¹³⁹ Anonim, "China Only Country to help Pakistan with energy crisis", 3 Agustus 2011, <http://www.pakistantoday.com.pk/2011/08/03/news/profit/%E2%80%98china-only-country-to-help-pakistan-with-energy-crisis%E2%80%99/?printType=article.htm> (Diakses pada 2 November 2013)

PPIB, N.A. Zuberi, *Hydropower Resources of Pakistan*, (PPIB, Februari 2011) <http://www.ppiib.gov.pk/HYDRO.pdf>. (Diakses pada 20 November 2013)

Pada kunjungan presiden Asif Ali Zardari pada tahun 2009 ke Cina, WAPDA dan Three Gorges Project Cooperation (TGPC) menandatangani MoU untuk kolaborasi pembangunan beberapa proyek air dan PLTA.¹⁴⁰ Pertama, bendungan Mangla 1000 MW yang telah selesai dibangun sejak 14 April 2011 lebih awal dari target penyelesaian sebelumnya yaitu Juni 2011.¹⁴¹ Kedua, bendungan Gomal Zam 17,4 MW dibangun dengan biaya US\$ 12,829 juta oleh Korporasi Sinohydro dan masih berada pada tahap akhir penyelesaian. Ketiga, bendungan Satpara 17,3 MW yang akan dijalankan oleh China Machine Building International Co. (CMIC) dan Central China Power Group Pvt. Ltd. (CCPG) telah selesai dibangun dan pembangkit listrik 3 telah beroperasi sejak bulan Mei 2013.¹⁴² Keempat, Kanal Kachhi dengan total panjang 500 km sepanjang Punjab dan Balochistan dengan kapasitas 6000 cusec memiliki tiga tahap pengembangan dimana tahap ketiga akan selesai pada 30 Juni 2015.¹⁴³

Kelima, bendungan Darawat sebagai tempat penyimpanan untuk irigasi dan generator yang masih pada tahap pembangunan.¹⁴⁴ Penandatanganan kontrak kesepakatan secara resmi dilakukan pada tanggal 9 Juli 2010 yang dihadiri oleh Perdana Menteri Pakistan dan Wakil Perdana Menteri Cina dengan menerapkan sistem kontrak *buyer of credit* yang diproses melalui Bank Ekspor-Import Cina

¹⁴⁰ Anonim, "China", 1.

¹⁴¹ WAPDA, "Mangla Dam Raising Project", <http://www.wapda.gov.pk/pdf/ManglaR1010.pdf>. (Diakses pada 22 November 2013).

¹⁴² WAPDA, "Satpara Dam Project", 31 Oktober 2013, <http://www.wapda.gov.pk/htmls/sataparapj.html>. (Diakses pada 23 November 2013)

¹⁴³ WAPDA, "Kachhi Canal Project", http://wapda.gov.pk/vision2025/htmls_vision2025/kcp.htm. (Diakses pada 23 November 2013)

¹⁴⁴ WAPDA, "Darawat Dam Project", 15 Juli 2013, <http://wapda.gov.pk/htmls/darawat.htm> (Diakses pada 23 November 2013)

dan Divisi Perekonomian Pakistan. Keenam, bendungan Ghabir yang masih akan diperbaharui kembali sehingga masih berada pada tahap penawaran untuk mendapatkan tambahan dana, walaupun dalam kesepakatan WAPDA dan TGPC telah ada korporasi Cina yang menawarkan bantuan melalui aplikasi *buyer of credit* Bank Ekspor-Import Cina.

Selain itu ada empat proyek bendungan skala besar yang berpotensi sebagai pembangkit listrik. Pertama, PLTA Duber Khwar 130MW yang meliputi pembangunan terowongan sepanjang 5.243 km. Namun pembangunan tersebut masih berada pada tahap dasar dan membutuhkan tambahan dana untuk mengatasi peningkatan biaya yaitu pembangunan struktur, perangkat pasir, penekan terowongan, tangki gelombang, dan sebagainya.¹⁴⁵ Kedua, PLTA Allai Khwar yang akan dibantu oleh Dongfang Electric Corporation (DEC) telah dapat dimanfaatkan sebagaimana rumah pembangkit listrik telah dioperasikan secara komersil sejak 25 Maret 2013 dan telah mampu menyuplai listrik sebesar 328.442 M Kwh secara nasional pada bulan Agustus 2013.¹⁴⁶

Ketiga, PLTA Jinnah memperoleh kesepakatan bantuan dari Dongfang Electric Corporation sebesar US\$ 128 juta. Status PLTA Jinnah dari unit 1 hingga unit 3 telah dapat dioperasikan secara komersil sejak tahun 2012, namun unit 4 hingga unit 8 masih dalam tahap pembangunan.¹⁴⁷ Keempat, PLTA Neelum-Jhelum 969 MW yang menjadi perdebatan terkait dengan percepatan

¹⁴⁵ WAPDA, "Duber Khawar Hydropower Project", 31 Oktober 2013, <http://www.wapda.gov.pk/htmls/duberkpj.html>. (Diakses pada 23 November 2013)

¹⁴⁶ WAPDA, "Allai Khawar Hydropower Project", 31 Oktober 2013, <http://www.wapda.gov.pk/htmls/allaikpj.html>. (Diakses pada 23 November 2013)

¹⁴⁷ WAPDA, "Jinnah Hydropower Project", 15 April 2013, http://wapda.gov.pk/vision2025/htmls_vision2025/jinnahhydropower.html. (Diakses pada 23 November 2013)

pembangunan lebih awal dari PLTA Kishanganga agar memperoleh hak aliran air. Biaya proyek meningkat dari awal kontrak karena dalam proses pembangunannya terjadi gempa bumi pada tahun 2005 sehingga meningkatkan biaya proyek sebesar US\$ 274.882 milyar dalam merubah dan memperkuat desain struktur bangunan.¹⁴⁸

Tabel 2.3 Investasi Cina pada Proyek PLTA Pakistan

Nama Proyek	Kapasitas penyimpanan (MAF)	Daya yang dihasilkan (MW)	Lokasi	Status
Mangla	1288	1644 (GWH)	AzadJammu Kashmir - Jhelum	Selesai 2009
Satpara	0,093	173	Gilgit Baltistan - Satpara Nuliah	Selesai 2012
Burji	-	7100	Gilgit Baltistan (GB)	Tahap Pemesanan/Pembangunan 2023
Kohala	-	1100	AzadJammu Kashmir (AJK)	Tahap Pemesanan/Pembangunan 2018
Diamer Basha	8,1	4500	GB	Tahap Pemesanan/Pembangunan 2020
Gomal Zam	1140	174	SWA-KPK	Tahap Pemesanan/Pembangunan 2013
Darawat	-	0,45 (Small/Medium Dam)		Tahap Pemesanan/Pembangunan
Ghabir	-	0,15 (Small/Medium Dam)		Tahap Pemesanan/Pembangunan
Duber Khwar	-	130	Tributari Indus	Tahap Pemesanan/Pembangunan 2012
Allai Khwar	-	121	Tributari Indus	Tahap Pemesanan/Pembangunan 2012
Jinnah	-	96	Indus-Punjab	Tahap Pemesanan/Pembangunan 2012
Neehim-Jhelum	-	969	AJK	Tahap Pemesanan/Pembangunan 2008
Dasu	-	4320	KPK-Indus	Tahap Pemesanan/Pembangunan 2027
Phandar				
Basu			Uji Kelayakan	
Harpo				
Munda	1290	740	FATA-KPK	Tahap Pemesanan/Pembangunan 2013
Yulbo	0,12	2800	Skardu	Tahap Perancangan (desk study)
Kachhi canal				Progres: tahap PC-I selesai 91,5 persen pada Juni 2012

Peneliti olah dari Development portfolio dalam <http://www.wapda.gov.pk/pdf/Development%20Portfolio.pdf>. (Diakses pada 23 November 2013).

¹⁴⁸ WAPDA. t.t. "Neelum Jhelum Hydropower Project" http://wapda.gov.pk/vision2025/htmls_vision2025_njhp.html (Diakses pada 23 November 2013)

Data diatas merupakan data bendungan yang melibatkan dana bantuan Cina pada proyek-proyek di Pakistan. terdapat satu bendungan lagi yang telah selesai dan dapat dioperasikan secara komersil sejak tahun 2010 yaitu Khan Khwar. Pada tahun 2009 pula, Menteri Air dan Tenaga dengan TGPC menandatangani MoU untuk pembangunan bendungan Bunji 7100MW dan Diamer Basha 4500MW yang menurut Syed Raghieb Abbas Shah kedua bendungan tersebut dapat membantu perkembangan perekonomian dan sosial di provinsi Gilgit-Baltistan.¹⁴⁹ Pada proyek Diamer Basha, Pakistan mengundang delegasi Cina untuk datang dalam memberi penawaran kompetitif dengan lima kontraktor besar lainnya. Kedua bendungan besar tersebut sedang berada pada proses revisi atas pengeluaran terakhir. Sedangkan kontrak pada bendungan Bunji sedang berada dalam proses pencairan dana dan kontrak kerja oleh TGPC sejak tahun 2009.

Perusahaan Cina juga bekerja pada lima proyek besar di Gilgit-Baltistan antara lain PLTA Dasu sebesar US\$ 7,8 milyar, PLTA Phandar sebesar US\$ 70 juta, PLTA Bashu sebesar US\$ 40,01 juta, PLTA Harpo sebesar US\$ 44,608 juta, dan PLTA Yulbo sebesar US\$ 6 milyar. PLTA Dasu, Phandar, Basu telah selesai uji kelayakan sedangkan PLTA Yulbo masih berada dalam tahap uji lapangan. Berdasarkan informasi resmi dari Water and Power Development Authority (WAPDA), Pakistan merencanakan untuk membangun beberapa proyek PLTA meliputi Patan Hydropower 2800 MW, Palas Valley Hydropower 665 MW, Spat Gah Hydropower 496 MW, Akhori Dam project 600 MW and Shyok Dam project

¹⁴⁹Anonim, "Blueprint of Bunji Dam Complete", 7 Mei 2013, <http://www.tribune.com.pk/story/545248/blueprints-of-bunji-dam-complete/> (Diakses pada 23 November 2013)

with capacity of 600 MW.¹⁵⁰ Sedangkan bendungan KuramTangi, perluasan Tarbela keempat, Keyal Khwar, dan Naulong sedang berada dalam proses penawaran dan akan mulai dibangun setelah tersedia dana.

Usaha Pakistan dalam meningkatkan posisi tawarnya untuk mengurangi dominasi India atas perairan Indus dicapai dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur air yang dapat berfungsi sebagai salah satu sarana vital bagi perkembangan perekonomian Pakistan. Aliran sumber dana alternatif sangat diperlukan untuk mempercepat perkembangan infrastruktur proyek, yang diperoleh melalui dukungan dan keterlibatan aktor eksternal yaitu Cina. Menurut Sekretaris Bidang Ekonomi Pakistan, Waqar Masood mengatakan bahwa Cina muncul sebagai rekan pengembangan dan kreditur terbesar bagi Pakistan sejak tiga tahun terakhir.¹⁵¹ Indikasi pengaruh aktor eksternal tersebut dalam meningkatkan posisi tawar Pakistan terbukti dengan adanya peningkatan total dagang beserta bantuan antara Cina-Pakistan dan perkembangan infrastruktur air Pakistan sebagai strategi mengurangi dominasi India atas aliran air Indus.

Hal ini mendorong kepercayaan diri Pakistan yang pertama dalam hal peningkatan perkembangan infrastruktur dalam membangun bendungan baru maupun memperbaharui kapasitas bendungan yang sudah beroperasi supaya dapat meredam bencana banjir dan memperoleh suplai air yang cukup untuk kebutuhan irigasi pertanian dan industri. Kedua, mendorong Pakistan lebih berani dalam

¹⁵⁰ Anonim, "Four Hydropower Project of 1619 Ready for Construction", Associated Press of Pakistan
http://app.com.pk/en/index.php?option=com_content&task=view&id=220555&Itemid=2
(Diakses pada 23 November 2013)

¹⁵¹ Anonim, "China bails out Pakistan in hydropower race with India", 26 Mei 2012, <http://asian-power.com/project/news/china-bails-out-pakistan-in-hydropower-race-india.htm> (Diakses pada 21 Desember 2013).

meningkatkan dialog damai dengan India mengenai pengajuan keberatan terhadap beberapa proyek bendungan yang akan dibangun pada cabang sungai sebelah barat. Pada kasus Kishanganga, Pakistan berani dan percaya diri untuk mengajukan kasus ini ke mekanisme penyelesaian sengketa tertinggi yaitu Pengadilan Arbitrase Internasional.



BAB III**PERUBAHAN INTENSITAS KONFLIKTUAL DAN INTENSITAS
KERJASAMA ANTARA INDIA DAN PAKISTAN**

Setelah membahas mengenai kondisi kekuatan asimetris yang terjadi antara India dan Pakistan, latar belakang keterlibatan Cina dalam pembangunan infrastruktur air Pakistan serta pengaruh keterlibatan Cina dalam meningkatkan posisi tawar Pakistan. Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai peristiwa dan interaksi antara India dan Pakistan tahun 2008-2014 setelah ada pengaruh keterlibatan Cina dalam usaha untuk meningkatkan posisi tawar Pakistan dan mengurangi dominasi India sebagai hidrohegemon. Pada sub pembahasan berikutnya, peneliti membandingkan peristiwa dan interaksi antara India dan Pakistan yang terjadi pada tahun 2001 hingga 2007 untuk mengetahui perubahan skala atau tingkat intensitas konfliktual dan intensitas kerjasama antara India dan Pakistan dalam sengketa Perairan Indus.

Setelah menjabarkan keseluruhan interaksi yang terjadi, peneliti menyajikan kembali peristiwa dan interaksi yang telah ada dalam tabel perbandingan dengan tujuan untuk mempermudah melihat perubahan intensitas konfliktual dan intensitas kerjasama India dan Pakistan. Pada pembahasan terakhir, peneliti menjelaskan pula mengenai pertimbangan rasionalitas antara India dan Pakistan dalam menghindari peperangan air demi keamanan akses air jangka panjang.

Proyek Neelum-Jhelum merupakan salah satu proyek besar dan strategis di wilayah kependudukan Pakistan di Kashmir (PoK) yang dalam proses pembangunannya terdapat campur tangan pihak Cina.¹⁵² Pada wilayah sengketa Jammu dan Kashmir terdapat aliran air yang sangat kuat dengan perkiraan potensi tenaga listrik air dari negara tersebut mencapai 20.000 MegaWatt.¹⁵³ Jika digabungkan dengan potensi tenaga listrik air dari Pakistan dapat mencapai 40.000 MegaWatt, dengan kata lain secara teknis negara Jammu dan Kashmir dapat meningkatkan 33 persen potensi tenaga listrik air Pakistan.¹⁵⁴

Keberadaan Cina dalam pembangunan berbagai infrastruktur di wilayah PoK dengan bantuan pengamanan militer Cina, dapat mempengaruhi intensitas sengketa India-Pakistan pada skala konflik yang lebih luas. Dalam pemikiran Pakistan terkonstruksi bahwa isu air menjadi isu utama dalam konflik J&K.¹⁵⁵ Hal ini disebabkan karena kebijakan Pakistan atas Kashmir sangat dipengaruhi oleh faktor air, jika Pakistan memperoleh setidaknya sebagian dari wilayah yang dipersengketakan maka Pakistan memperoleh suplai air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air Pakistan sekarang dan masa depan.¹⁵⁶ Oleh sebab itu beberapa interaksi yang terjadi dapat terkait dengan sengketa wilayah J&K saling berkorelasi sehingga dapat mempengaruhi interaksi sengketa air India-Pakistan sebagaimana esensi dasar konsep kompleksitas hidropolitik.

¹⁵² Gupta, "China Yearbook 2012", 112.

¹⁵³ Gitanjali Bakshi dan Sahiba Trivedi, "The Indus Equation", (Strategic Foresight Group, 2011), http://www.strategicforesight.com/publication_pdf/10345110617.pdf (diakses pada 14 Desember 2013).

¹⁵⁴ Bakshi dan Trivedi, "The Indus Equation", 5.

¹⁵⁵ Medha Bisht, "The Politics of Water Discourse in Pakistan", ICRIER Policy Series, No.4, (Agustus 2011), 8 http://www.icrier.org/pdf/Policy_Series_No_4.pdf (diakses pada 21 Desember 2013).

¹⁵⁶ Bisht, "The Politics of Water", 8.

III.1 Peristiwa dan Interaksi antara India-Pakistan tahun 2008-2014

III.1.1 Intensitas Konflikual

Dukungan Pakistan terhadap aktifitas pemberontakan berhenti setelah peristiwa 9/11.¹⁵⁷ Namun perjuangan pemberontak terus berlanjut hingga musim panas tahun 2010 dan menjadi aksi protes terbesar melawan kontrol India di Kashmir terhitung sejak awal tahun 1990.¹⁵⁸ Pada tahun 2013 untuk pertama kalinya sejak tahun 2004 perdagangan lintas batas secara bersamaan ditutup setelah peristiwa penembakan antar lintas batas. Setelah kedua Kepala Pemerintahan bertemu di New York pada 29 September 2013, mereka setuju untuk menginstruksikan para pejabat militer agar bekerjasama mengembangkan mekanisme dalam menghentikan pelanggaran gencatan senjata.¹⁵⁹ Keputusan ini didasarkan sebagaimana penasehat keamanan nasional India, Shiv Shankar Menon yang mengatakan bahwa kedua negara mengakui perdamaian dan ketenangan di Garis Kontrol merupakan prasyarat normalisasi hubungan India-Pakistan.¹⁶⁰ Sebagai upaya mempertahankan hubungan dagang antara kedua negara, Nawaz Sharif meminta bantuan ADB untuk mengatur sistem kesepakatan dagang dan lalu lintas masuk perbatasan Attari-Wagah.

¹⁵⁷ Mr. Khalid Mahmood, "Pakistan-India Relations – A Pakistani Narrative", PILDAT (Desember 2010):1-16 <http://www.pildat.org/publications/publication/FP/PakistanIndiaRelations-APakistaniNarrative.pdf> (Diakses pada 10 Februari 2014).

¹⁵⁸ Mahmood, "Pakistan-India Relations", 1-16.

¹⁵⁹ ICRIER, "Indian and Pakistani Prime Ministers meet in New York", 29 September 2013, <http://indiapakistantrade.org/recentDevelopments.html#NDMANawaz> (Diakses pada 10 April 2014)

¹⁶⁰ ICRIER, "Indian and Pakistani Prime".

Dalam kurun waktu 2008-2014, terjadi kembali serangan bom yang besar di Mumbai pada 26 November 2008 dengan jumlah 177 orang korban meninggal. Setelah serangan bom di Mumbai, pihak India menunda proses dialog bahkan menuduh *Inter Service Intelligent* (ISI) Pakistan mensponsori kelompok ‘Laskhar e Tayyaba’ (LeT). Namun respon pihak India setelah serangan bom di Mumbai berbeda ketika serangan bom di Parlemen India pada 13 Desember 2001. Pemerintahan India, Manmohan Singh memutuskan untuk menghindari beberapa langkah ekstrim yang tidak dapat memberi jalan keluar seperti memutus hubungan komunikasi dan dagang, tidak menarik Komisaris Tinggi, mengurangi staff pada Komisaris Tinggi, mobilisasi pasukan ke perbatasan Pakistan.¹⁶¹ Dialog mengenai permasalahan air yang dimulai pada tahun 2003 hingga 2008 terganggu serangan bom di Parlemen India 2001 dan Mumbai 2008. Namun tetap dilanjutkan kembali pada tahun 2011, Manmohan Singh masih tetap dengan keputusannya untuk melanjutkan interaksi damai dengan Pakistan.¹⁶²

Setelah adanya insiden pelanggaran gencatan senjata disepanjang Garis Kontrol, kedua negara menunda pertemuan tingkat Menteri yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 28-29 Januari 2013.¹⁶³ Penundaan pertemuan ini terkait dengan ketegangan situasi setelah pelanggaran gencatan senjata dan terhitung terburuk sejak diberlakukannya gencatan senjata tahun 2003. Situasi ketegangan juga mempengaruhi Menteri Perdagangan Pakistan, Makhdoom Amin Fahim

¹⁶¹ Dr. Hasan Askari Rizvi, “Pakistan-India Relations, Post-Mumbai Deadlock and The Way Forward”, PILDAT (Desember 2010):10 <http://www.pildat.org/publications/publication/FP/PakistanIndiaRelations-PostMumbaiDeallockandTheWayForward.pdf> (diakses pada 23 Desember 2013).

¹⁶² Alam, et. al, “Re-Imagining the Indus”. 35,

¹⁶³ Anonim, “India Pakistan water talks put off due to tension”, The Economic Times, Januari 2013, http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-01-27/news/36577245_1_india-pakistan-neighbours-over-ceasefire-violations-islamabad (Diakses pada 26 Februari 2014).

yang membatalkan kunjungan ke India untuk menghadiri pertemuan bisnis di Agra.

Pada tahun 2008, Pakistan menuding bahwa India melakukan pengisian bendungan Baglihar sejak tanggal 19 Agustus 2008 hingga 28 Agustus 2008 sebesar 200.000 cusec. Sebagai akibatnya, aliran air dari sungai Chenab turun dibawah 55.000 cusecs pada bulan September dan Oktober yang mengurangi pematangan padi.¹⁶⁴ Pakistan kembali menuding India sebagai penyebab dari kegagalan panen Pakistan, namun kedua pihak pada akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui dialog damai. Hingga akhirnya tercapai kesepakatan pada bulan Juni 2010 pada pertemuan Komisi Indus Pakistan dimana India mengakui kesalahannya dan berjanji akan lebih berhati hati pada masa yang akan datang.¹⁶⁵ Pihak Pakistan menerimanya dengan semangat kerjasama dan kemauan baik sesuai dengan aturan perjanjian Indus.

Pada tanggal 29-31 Maret 2010 di Lahore Komisi Air Indus kembali mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan pembangunan bendungan namun tidak dapat mencapai pemecahan masalah. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2010 diadakan kembali pertemuan dimana Pakistan kembali mengajukan keberatan mengenai isu PLTA Kishanganga dengan klaim bahwa proyek tersebut akan mengganggu proyek PLTA Neelum-Jhelum yang didesain dapat menghasilkan kekuatan listrik sebesar 969 Megawatt.

¹⁶⁴ Zubai A Dar, "A Rivers and A Turbine", http://www.india-seminar.com/2013/643/643_zubair_a_dar.htm (Diakses pada 1 Juni 2014).

¹⁶⁵ Shafqat Kakakhel, "Indus Water Treaty: Negotiation, Implementation, New Challenges, and Future Prospects", 10 Mei 2014, <http://www.criterion-quarterly.com/the-indus-waters-treaty-negotiation-implementation-new-challenges-and-future-prospects/> (Diakses pada 1 Juni 2014).

III.1.2 Intensitas Kerjasama

Pembangunan transportasi dan komunikasi antara India-Pakistan melintasi garis kontrol perbatasan (LoC), telah ada sejak tahun 2005. Dalam perkembangannya pada tahun 2008 terjadi peningkatan perpindahan lintas batas LoC seperti peningkatan penerbangan dari 12 hingga 28 kali dalam seminggu, dikeluarkannya ijin visa *triple entry* untuk perjalanan melintasi LoC, dan peningkatan frekuensi layanan bus Srinagar-Muzaffarabad dari dua kali dalam seminggu menjadi tiap minggu.¹⁶⁶ Pada tahun yang sama kedua pihak menyetujui untuk memfasilitasi hubungan tetap antara IDSA (New Delhi) dan ISS (Islamabad) sebagai sarana komunikasi lembaga akademis.

Pada tingkat masyarakat sipil, muncul kampanye gerakan perdamaian ‘Aman ki Asha’ India-Pakistan pertama kali diluncurkan pada kampanye 1 Januari 2010 yang dipelopori oleh perusahaan Times of India dan Jung Group Pakistan berupaya memfasilitasi ruang dialog antara kedua pemerintahan dan interaksi hubungan antar individu kedua negara. Inisiatif gerakan ini memiliki tiga tujuan yaitu sebagai pertukaran budaya, penyelesaian konflik, dan komersil.¹⁶⁷ Program Aman Ki Asha telah memperoleh pengakuan internasional dan berbagai bantuan dari Parlemen Inggris dan para Duta Besar dari Amerika Serikat, Perancis, serta Jerman.

¹⁶⁶ Sajad Padder, “The Composite Dialogue between India and Pakistan: Structure, Process, and Agency”, (Working Paper No. 65, Hiedelberg University, Februari 2012) http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/13143/1/Heidelberg_Papers_65_Padder.pdf (Diakses pada 24 Desember 2013).

¹⁶⁷ Anonim, “Aman Ki Asha”, Times of India Group, <http://www.timesgroup.com/initiatives/national/aman-ki-aasha.html> (diakses pada 23 Februari 2014).

Pada pertemuan Komisi Perairan Indus bulan Juli 2010, kedua negara menyetujui penggunaan sistem telemetri untuk merekam dan mentransfer data tepat waktu.¹⁶⁸ Penggunaan sistem telemetri ini yang dapat membantu memperbaiki *confidence building measure* dan meminimalisasi ketidakpastian mengenai aliran air pada Sungai sebelah Barat. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyepakati penyelidikan bersama dan survei pemantauan pencemaran sungai Jehlum dan sungai Ravi.¹⁶⁹

Pada tahun yang sama Pakistan mengalami bencana alam berupa banjir besar yang menelan banyak korban jiwa meninggal. India segera merespon dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Pakistan. Namun Pakistan meminta bahwa bantuan dari India harus disalurkan melalui badan dunia sehingga bantuan tersebut menjadi bantuan dari masyarakat internasional. Menanggapi hal tersebut India menyerahkan cek sebesar 20 juta dollar AS kepada Ban Ki Moon, Sekjen PBB untuk bantuan dan rehabilitasi banjir di Pakistan India.¹⁷⁰ Menurut Hardeep Singh Puri, utusan India untuk PBB bantuan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Pakistan disaat mereka membutuhkan.¹⁷¹ Tidak hanya itu, bantuan lebih juga ditawarkan oleh India saat Menteri Luar Negeri SM Khrisna menelpon Menteri Luar Negeri Sheh Mehmood Qureshi dan mengatakan bahwa pemerintahan India menawarkan bantuan sebesar US\$ 5 juta untuk korban

¹⁶⁸ ISSRA, "Pakistan's Water Security", 38.

¹⁶⁹ ISSRA, "Pakistan's Water Security", 38.

¹⁷⁰ Anonim, "India Hands Over \$ 20 million for Pakistan Flood Relief", The Hindu, 18 September 2010, <http://www.thehindu.com/news/national/india-hands-over-20-million-for-pakistan-flood-relief/article696893.ece>. (Diakses pada 16 Maret 2014).

¹⁷¹ Anonim, "India Hands over", 1.

banjir Pakistan, yang menyebabkan kerusakan besar pada kehidupan dan properti.¹⁷²

Perdana Menteri Pakistan mengunjungi Mohali pada tanggal 30 Maret 2011 untuk memenuhi undangan Perdana Menteri India yaitu menonton semifinal *Cricket World Cup* antara India dan Pakistan.¹⁷³ Pada Agustus 2011, Menteri Luar Negeri India S. M. Krishna mengatakan bahwa India ingin membangun hubungan dengan Pakistan, mengurangi penurunan kepercayaan, dan bergerak menuju persahabatan. Hal tersebut disambut baik oleh pihak Pakistan yaitu Menteri Luar Negeri Pakistan Hina Rabbani Khar pada bulan September 2011, dalam Dewan Umum PBB mengatakan bahwa Pakistan ingin tiada henti-hentinya berdialog dengan India.¹⁷⁴ Pemegang otoritas kriket India, memutuskan bahwa Pakistan terpilih menjadi tuan rumah dalam seri pertama pada akhir tahun 2012.

Tahun 2012 merupakan tahun bagi India dan Pakistan untuk mencoba membangun hubungan baik secara intensif kembali melalui rute ekonomi. Pada tanggal 15 Februari 2012 kunjungan Delegasi Dagang India ke Pakistan telah menandatangani beberapa persetujuan, pertama *Customs Co-operation Agreement* yang bertujuan untuk mengeliminasi hambatan yang tidak diperlukan pada masing-masing pelabuhan. Kedua, *Mutual Recognition Agreement* yakni untuk mengevaluasi produk dan jasa dengan menerima sertifikat akreditasi secara internasional. Ketiga, memperbaiki *Trade Grievances Agreement* yang ditujukan

¹⁷² Anonim, 13 Agustus 2010, "India offers \$ 5M in aid to Pakistan in 'hour of need'", <http://tribune.com.pk/story/39008/india-offers-5m-in-aid-to-pakistan/> (Diakses pada 10 Februari 2014).

¹⁷³ UDGHOSH, "India's Foreign Policy with Pakistan", Information Dossier, (2013):1-32, <http://NSC-Information-Dossier.pdf> (diakses pada 2 Januari 2014).

¹⁷⁴ UDGHOSH, "India's Foreign Policy with Pakistan", 1-32.

untuk mendesain hukum terkait dengan isu perselisihan dagang.¹⁷⁵ Pada 29 Februari 2012 Kabinet Pakistan menyetujui bahwa hanya 15 persen total item yang tidak bisa diperdagangkan.¹⁷⁶ Pengurangan daftar negatif tersebut sangat diapresiasi oleh komunitas bisnis Pakistan.

Pada bulan maret 2012, Pakistan setuju untuk memberikan status MFN kepada India dalam negosiasi dagang bilateral atas mandat WTO.¹⁷⁷ Namun hal pemberian status MFN untuk India masih tertunda hingga Januari 2013. Pada 21 Maret 2014, Pakistan memutuskan untuk mengumumkan status MFN bagi India setelah Pakistan menerima konsensi dagang dari India.¹⁷⁸ Pakistan memotong bea masuk sebesar 7,5 persen ada enam bulan pertama setelah pemberian status MFN, dan turun hingga 5 persen dalam waktu satu tahun.¹⁷⁹ Pimpinan pemerintahan koalisi Partai Rakyat Pakistan sebelumnya telah mengurangi daftar negatif item barang. Sehingga saat ini setidaknya ada 5.000 barang yang bisa diperdagangkan antara India dan Pakistan.¹⁸⁰ Pakistan mendapatkan keuntungan akses pasar besar ke India untuk ekspor Polimer, HS code 29025000, dan potongan kuningan.¹⁸¹

Perdagangan bilateral antara India-Pakistan meningkat dalam beberapa periode waktu, sebagaimana grafik 2.1 total dagang antara kedua negara

¹⁷⁵ UDGHOSH, "India's Foreign Policy with Pakistan", 1-32.

¹⁷⁶ UDGHOSH, "India's Foreign Policy with Pakistan", 1-32.

¹⁷⁷ Prabir De, et. al., "What Does MFN Trade Mean for India and Pakistan?", (Policy Research Working Paper, 6483, Juni 2013) <http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6483> (Diakses pada 10 Februari 2014).

¹⁷⁸ Anonim, "Pakistan may grant India MFN status on Friday", Dawn, 18 Maret 2014, tersedia dalam <http://www.dawn.com/news/1093810/pakistan-may-grant-india-mfn-status-on-friday.htm>. (Diakses pada 24 Maret 2014).

¹⁷⁹ Anonim, "MFN status", 1

¹⁸⁰ Omer Farooq Khan, "Pakistan to grant MFN status to India", TNN, 8 September 2013, <http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Pakistan-to-grant-MFN-status-to-India/articleshow/22407883.cms> (Diakses pada 10 Februari 2014).

¹⁸¹ De, et. al, "MFN Trade".

meningkat pesat sejak tahun 2006-2008. Selama tiga tahun setelah aksi teror Mumbai, tidak ada langkah-langkah proaktif yang diambil kedua pemerintah seperti memblokir perdagangan sebagaimana tanggapan ketika serangan bom di Parlemen tahun 2001.¹⁸² Sebaliknya, pada tahun yang sama 2008 kedua pemerintahan mengizinkan perdagangan dan perjalanan lintas batas disepanjang garis kontrol Jammu dan Kashmir.¹⁸³ Pada bulan Februari 2011 mereka melanjutkan kembali perundingan damai membahas kesepakatan untuk menghapus larangan impor dari India sebagai cara normalisasi hubungan dagang kedua negara.¹⁸⁴ Berdasarkan Kebijakan Perdagangan Pakistan 2008/2009, solar dan bahan bakar minyak telah ditambahkan kedalam daftar positif dan ada konsesi yaitu bebas bea masuk, impor gas alam (CNG) 25 bus dari India.¹⁸⁵ Komite Koordinasi Ekonomi Kabinet Pakistan mengizinkan Menteri Perdagangan untuk memulai dagang dengan India melalui rute Wagah Attari dan meningkatkan jumlah item barang secara bertahap pada bulan Maret 2009.¹⁸⁶

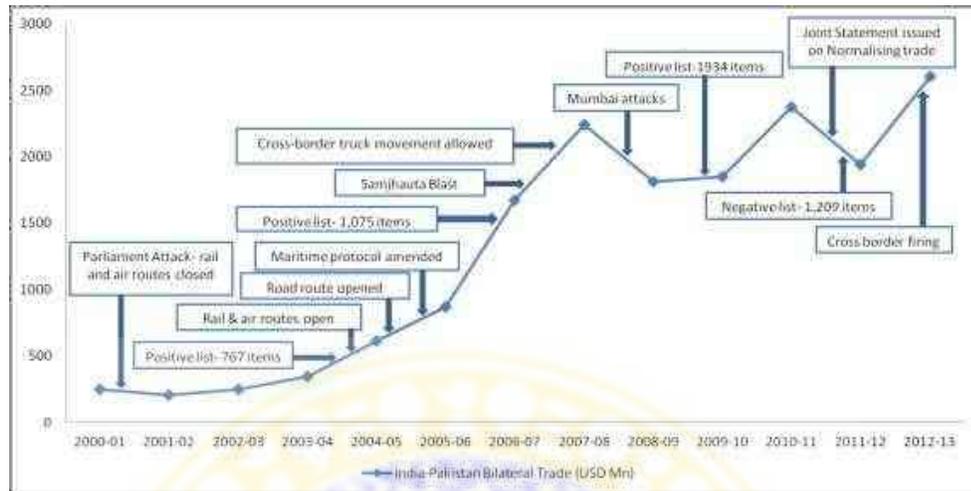
¹⁸² Nisha Taneja, et. al., September 2013, "Normalizing India Pakistan Trade", ICRIER. http://www.icrier.org/pdf/working_paper_267.pdf.pdf (Diakses pada 10 Februari 2014).

¹⁸³ Taneja, "India Pakistan Trade".

¹⁸⁴ Yu Zhixiao, 8 April 2012, "Improved Pakistan-India ties to boost regional peace, stability", http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2012-04_08/c_131513350.htm (Diakses pada 29 Oktober 2013).

¹⁸⁵ Sahoo, "The Economic Relations".

¹⁸⁶ Sahoo, "The Economic Relations".

Grafik 3.1 Perdagangan Bilateral India-Pakistan

Pravakar Sahoo, "The Economic Relations of China and India with Pakistan: A Comparative Analysis", *Asia-Pacific Development Journal* Vol. 19, No. 1, Juni 2012.

Pada bulan April 2012 Asif Ali Zardari, Presiden Pakistan dan Manmohan Singh, Perdana Menteri Pakistan menyetujui bahwa peningkatan hubungan ekonomi antara dua negara tidak akan terganggu oleh isu Kashmir dan Indus. Pakistan memutuskan untuk meniru model hubungan ekonomi Cina-India yang dapat mencapai puncaknya walaupun kedua negara tersebut mengalami penundaan penyelesaian sengketa perbatasan dan air.¹⁸⁷ Pada tanggal 13 April 2012, Menteri Dalam Negeri India dan Menteri Perdagangan Pakistan meresmikan operasionalisasi pos cek terintegrasi atau *Integrated Check Post* di Attari untuk meningkatkan proses pengangkutan dan pemeriksaan lalu lintas kargo. India dan Pakistan menandatangani perjanjian liberalisasi visa pada 8 september 2012, yang

¹⁸⁷ Anonim, "Pakistan finds Sino-India trade template attractive", *The Economic Times*, 9 April 2012, http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/persen/20and/persen/20nation_PM-Manmohan-Singh-to-get-free-water-power-post-elections/articleshow/34820499.cms (Diakses pada 15 Februari 2014).

diwakili oleh Menteri Luar Negeri India, SM Krishna dan Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rehman Malik.¹⁸⁸

Perjanjian Liberalisasi Visa ini menggantikan perjanjian larangan atau batasan visa 39 tahun yang lalu. Namun untuk saat ini masih belum ada penerbitan visa *non-diplomatic*. Setiap orang yang membuka aplikasi visa harus diterbitkan maksimal 45 hari. Seseorang dapat mengunjungi lima tempat sekaligus dan untuk usia diatas serta dibawah 12 tahun sebagaimana pengusaha terkemuka akan dibebaskan dari laporan polisi Menteri Dalam Negeri.¹⁸⁹ Visa masuk tunggal (*single-entry*) tidak boleh digunakan selama lebih dari tiga bulan dalam satu waktu dan lima tempat. Visa pengunjung tidak boleh digunakan lebih dari satu tahun kecuali ada keperluan bisnis. Kategori kedua, visa pengunjung bisa berlaku lebih dari dua tahun apabila diatas usia 65 tahun, pasangan dari salah satu negara, dan anak anak dibawah 12 tahun. Sedangkan visa turis hanya berlaku 30 hari melalui pemandu tur dan terdaftar oleh kedua pemerintah.

Pada tanggal Desember 2013 dalam *final award*, pengadilan arbitrase internasional memutuskan memberi ijin pada India untuk meneruskan pembangunan proyek Kishanganga, walaupun pihak Pakistan tetap mengajukan keberatan.¹⁹⁰ Hal ini terjadi karena Pakistan tidak dapat menyediakan data terbaru

¹⁸⁸ Anonim, "India and Pak sign new liberalized visa Agreement", 8 September 2012, http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-09-08/india/33695663_1_visa-agreement-group-tourist-visitor-visa (Diakses pada 15 Februari 2014).

¹⁸⁹ Anonim, "India and Pak", 1.

¹⁹⁰ Anonim, "India allowed to go ahead with J&K's Kishanganga project", Times of India, 21 Desember 2013, <http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-allowed-to-go-ahead-with-JKs-Kishanganga-project/articleshow/27738180.cms.htm>. (Diakses pada 24 Maret 2014).

mengenai penggunaan agrikultur dari Sungai Kishanganga/Neelum.¹⁹¹ Walaupun kemenangan Kishanganga merupakan kemenangan diplomatik India atas strategi India untuk mendapatkan sumber daya air di negara Jammu dan Kashmir. Namun pada proses negosiasi ketika India mengajukan aliran minimum yang harus dipertahankan sebesar 4,25 cumecs¹⁹² dan Pakistan mengajukan 10 cumecs hasil pengadilan menetapkan bahwa India harus mempertahankan minimal 9 cumecs aliran air untuk Pakistan.¹⁹³ Pakistan menyambut baik hasil keputusan sidang sebagaimana pendapat Menteri Air, Khwaja yang mengatakan bahwa ini adalah 'kemenangan besar' bagi Pakistan karena pengadilan Arbitrasi Internasional menerima hak Pakistan sebagai negara riparian sungai Kishanganga sebagaimana hak atas aliran air Jhelum dan Chenab, keputusan ini akan menyelamatkan hak air Pakistan dimasa depan dimana India tidak bisa mengambil air pada tingkat yang sangat rendah di bendungan.¹⁹⁴

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti pertemuan antara Perdana Menteri di New York pada 29 September 2013 yang membahas mengenai mekanisme efektif untuk memulihkan gencatan senjata disepanjang Garis Kontrol dan mengenai permasalahan penggunaan aliran air Indus terutama pengajuan

¹⁹¹ Zafar Bhutta, "Kishanganga project: Victory claims cloud final arbitration award, 22 Desember 2013", <http://tribune.com.pk/story/648986/kishanganga-project-victory-claims-cloud-final-arbitration-award/.htm>. (Diakses pada 24 Maret 2014).

¹⁹² Cumec adalah satuan laju aliran air standar internasional dalam setiap meter kubik air per detik (m³). Satuan ini lebih besar daripada satuan cusec.

¹⁹³ "In The Matter of The Indus Waters Kishanganga Arbitration" Final Award, tersedia dalam https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pca-cpa.org%2Fshowfile.asp%3Ffil_id%3D2471&ei=WX6pU7_pCMvn8AWOt4J4&usq=AFOjCNFIMAN8OaAnDlnzWMAne-WDLWsAHA&sig2=Gakng354JlzfVMC_48qbw&bvm=bv.69620078.d.dGc (diakses pada 18 Juni 2014).

¹⁹⁴ Rajeev Sharma, 22 Desember 2013, "J&K water dispute: India registers diplomatic victory over Pak", <http://www.firstpost.com/world/jk-water-dispute-india-registers-diplomatic-victory-over-pak-1301075.html> (Diakses pada 24 Maret 2014).

keberatan Pakistan atas empat proyek bendungan yang akan dibangun pada cabang-cabang sungai sebelah barat, antara lain Ratle 850 MW, Miyar 120 MW, Lower Kalnai 48 MW dan Pakal Dul 1000 MW.¹⁹⁵ Pada tanggal 24 Desember 2013 kedua pihak sepakat mengadakan pertemuan antar Direktur Jenderal Operasi Militer (DGMOs).¹⁹⁶ Namun sebelumnya mereka telah berhubungan melalui kontak hotline telah setuju untuk menormalkan situasi di sepanjang Garis Kontrol melalui *flag meetings* tingkat lokal antara Pasukan Keamanan Pakistan Rangers dan Pasukan Keamanan Perbatasan India. Upaya dari kedua negara dalam mengadakan dialog damai setelah insiden tersebut, disambut baik oleh Cina, sebagaimana pendapat Menteri Luar Negeri Cina mengatakan “*we welcome the efforts made by Pakistan and India for a ceasefire at the Line of Control in Kashmir*”.¹⁹⁷

Pada tanggal 29 Maret 2014, Mobin Solut Direktur ISGS Pakistan sedang menegosiasikan harga impor LNG dari India agar tidak melebihi 16-17 dolar tiap MMBTU (satuan per juta unit panas).¹⁹⁸ Dalam negosiasi tersebut India mengusulkan pula untuk meletakkan pipa sepanjang 110 km dari Jalandhar ke perbatasan Wagah melalui Amritsar untuk memudahkan Pakistan memasok gas alam India.¹⁹⁹ Kesepakatan perdagangan listrik antara India-Pakistan semakin nyata setelah Bank Dunia menawarkan bantuan atas studi uji kelayakan dan

¹⁹⁵ Vishwa Mohan, 21 September 2013, “Indo-Pak talks on river water issues to begin on Sunday, <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Indo-Pak-talks-on-river-water-issues-to-begin-on-Sunday/articleshow/22860621.cms> (Diakses pada 24 Maret 2014)

¹⁹⁶ Anonim, 17 Desember 2013, “India Pakistan DGMOs to meet on December 24”, The Hindu, <http://www.thehindu.com/news/international/south-asia/india-pakistan-dgmos-to-meet-on-december-24/article5470518.ece> (Diakses pada 12 Mei 2014).

¹⁹⁷ Anonim, “India Pakistan DGMOs”, 1.

¹⁹⁸ ICRIER, “Pakistan delegation”.

¹⁹⁹ ICRIER, “Pakistan delegation”.

pemasangan garis transmisi Pakistan untuk mengimpor 1200 MW listrik dari India.²⁰⁰ India akan mengirimkan 500 MW sebagai langkah awal ekspor energi ke Pakistan, setelah penyelesaian proyek pada tahun 2016 mendatang.²⁰¹

Proyek impor energi dari India ke Pakistan tersebut, sangat didukung oleh Bank Dunia selain untuk memenuhi kebutuhan energi Pakistan, proyek ini dapat meningkatkan hubungan baik pada kedua pihak dalam menghadapi permasalahan kelangkaan energi bersama. Pakistan juga menandatangani kesepakatan dengan perusahaan India Energi Biomasa Universal untuk membangun pembangkit listrik biomasa sebesar 15 MW di Punjab, Pakistan. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai, pembangkit tersebut akan diserahkan kepada Pakistan setelah pemasangan dan dapat berfungsi selama dua tahun untuk membantu Pakistan menghadapi krisis energi.

²⁰⁰ Anonim, "Pakistan to import electricity from India: Report", The Economics Times, 20 Maret 2014, http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-03-20/news/48402219_1_feasibility-study-electricity-mahatma-gandhi-power.htm. (diakses pada 24 Maret 2014).

²⁰¹ Anonim, "import electricity", 1.

III.2 Peristiwa dan Interaksi antara India Pakistan tahun 2001-2007

III.2.1 Intensitas Konflik

Pada kurun waktu 2001 hingga menjelang 2007 merupakan periode peningkatan ketegangan antara India dan Pakistan. Pada 1 Oktober 2001, setelah dua serangan teroris yang menghancurkan di Kashmir India yang menewaskan 35 orang.²⁰² Sebulan setelahnya tepatnya pada tanggal 13 Desember 2001 teroris menyerang Parlemen India, Pakistan dan India meningkatkan tingkat kewaspadaan yang menempatkan pasukan mereka pada titik konflik. Sepanjang tahun 2001 hingga 2007 terjadi hingga delapan belas aksi bom teroris dengan menargetkan beberapa tempat di India setiap tahun.²⁰³

Akibat dari serangan teroris dan dugaan Pakistan mendukung (bahkan membiayai) aksi kelompok teroris tersebut, pada bulan Desember 2001 hingga Juni 2002 India mengancam Pakistan bahwa India akan menarik diri dari Perjanjian Perairan Indus (*Indus Water Treaty*).²⁰⁴ Tidak hanya itu, Komite Kabinet India mengancam memotong pasokan air Pakistan agar Pakistan menghentikan dalam membantu kelompok-kelompok ekstremis di Kashmir.²⁰⁵ Sebaliknya, dalam menghadapi ancaman India, Pakistan menyatakan bahwa siap menggunakan senjata nuklir selama krisis air.²⁰⁶

²⁰² Anonim, "Major attack and blasts in India since 2001", Reuters, 25 Agustus 2007, <http://in.reuters.com/article/2007/08/25/idINIndia-29149720070825> (Diakses pada 2 Januari 2014).

²⁰³ Anonim, "Major Attack", 1.

²⁰⁴ Pearce dalam Anonim, "Indus Water treaty".

²⁰⁵ Rashid dalam Anonim, "Indus Water treaty".

²⁰⁶ Wirsing, R.G and Jasparro, C., "Spotlight on Indus River Diplomacy: India, Pakistan, and the Baglihar Dam Dispute". Asia-Pacific Center for Security Studies, (2006),

India merespon aksi teroris tersebut dengan mengerahkan rudal berkemampuan nuklir ke perbatasan barat dan menolak mengalah dibawah tekanan Amerika Serikat untuk mengadakan pembicaraan dengan Pakistan setelah serangan bom.²⁰⁷ Perdana Menteri Vajpayee, Kepala Militer Jendral Padmanabhan, dan Kabinet menyetujui Operasi Parakram dengan melibatkan mobilisasi pasukan militer sebanyak 500.000 di perbatasan Pakistan bersiap memulai peperangan.²⁰⁸ Mobilisasi pasukan tersebut menjadi mobilisasi terbesar India sejak tahun 1971.²⁰⁹ Pakistan merespon tindakan India dengan melakukan hal serupa sebagaimana India. India menuntut Pakistan untuk menutup semua dukungannya pada pemberontak Kashmir dan menyerahkan 20 teroris yang diduga tinggal di Pakistan. Pemerintahan India juga memutuskan untuk tidak melintasi perbatasan Pakistan.

Pada tanggal 11 Januari 2002, Kepala Militer India mendeklarasikan bahwa mobilisasi India telah lengkap dan pasukannya telah siap untuk perang.²¹⁰ Hal tersebut justru akan memperburuk kondisi *hydropolitical complexes* yang dapat mengarah pada deklarasi perang. Karena, berdasarkan sumber dari Menteri Pertahanan Pakistan, peristiwa ini berdampak pada berkurangnya aliran air sebesar 50 sampai 70 persen pada kanal pertahanan Pakistan yang terletak di hulu

<http://www.apcss.org/Publications/APSSS/IndusRiverDiplomacy.Wirsing.Jasparro.pdf>. (Diakses pada 2 Januari 2014)

²⁰⁷ Lalit K Jha, "After 2001 Parliament attack, India deployed nuclear missiles on border", 29 Oktober 2011, <http://www.dnaindia.com/world/report-after-2001-parliament-attack-india-deployed-nuclear-missiles-on-border-1604580> (25 Desember 2013).

²⁰⁸ Sandeep Bhardwaj, 17 Juli 2013, "The 2001-2002 India-Pakistan Standoff (Operation Parakram): A Dangerous Experiment", <http://revisitingindia.com/2013/07/17/the-2001-2002-india-pakistan-standoff-operation-parakram-a-dangerous-experiment/> (diakses pada 3 Maret 2014).

²⁰⁹ Bhardwaj, "India-Pakistan Standoff", 1.

²¹⁰ Bhardwaj, "India-Pakistan Standoff", 1.

dan hilir sungai Chenab yang digunakan sebagai lokasi strategis untuk mencegah mobilisasi pasukan artileri India.²¹¹

Dampak lain dari serangan bom Parlemen yaitu India menghentikan perdagangan melalui jalur udara dan darat antara 2001 dan 2004 menyusul serangan terhadap parlemen India pada Desember 2001. Perdagangan antara kedua negara dibuka kembali dengan mengikuti ketentuan berikut; pembatasan protokol maritim sampai tahun 2005 yang hanya mengizinkan kapal-kapal berbendera India dan Pakistan yang membawa kargo dan tidak mengizinkan kapal yang sama berlayar ke negara dunia ketiga untuk membawa kiriman melalui masing-masing pelabuhan. Pada tahun yang sama, tidak ada jalur perdagangan darat, hanya ada satu jalur rel untuk pergerakan kargo antara kedua negara.

Kekhawatiran Pakistan mengenai pengisian Baglihar pun meningkat, pada tanggal 4 April 2002 Pakistan kembali mengajukan keberatan kepada India.²¹² Dua tahun berikutnya, India dan Pakistan menggelar beberapa pertemuan yang membahas desain proyek namun tanpa memperoleh hasil keputusan apapun. Sehingga pada tahun 2005, Pakistan meminta Bank Dunia, untuk menghentikan proyek Baglihar di India. Pada bulan April 2005 Bank Dunia menunjuk Ahli Netral untuk menyelesaikan secara damai keberatan masing-masing pihak yang diajukan kepada Bank Dunia.²¹³ Pada tahun 2007 Ahli Netral tersebut menyimpulkan bahwa proyek Baglihar tidak akan mengganggu aliran air ke

²¹¹ Zafar Choudhary, "Baglihar and Other Chestnuts", Countercurrents.org, 26 februari 2007, <http://www.defence.pk/forums/strategic-geopolitical-issues/48309-pakistan-india-water-disputes-24.html> (diakses pada 12 Januari 2014).

²¹² Dar, "A Rivers".

²¹³ Abbasi, "Indus Water Treaty".

Pakistan sehingga Bank dunia mengizinkan pembangunan proyek tersebut karena memang telah menjadi hak milik negara riparian hulu untuk memanfaatkan sumber daya air untuk membangun PLTA. Namun Bank Dunia memberi syarat kepada India bahwa ia harus merubah struktur dasar bendungan agar tidak mengurangi jumlah kuota aliran air ke Pakistan terutama saat musim kemarau.²¹⁴

Sebelumnya sejak tahun 1994 sampai 2006 Komisi Air Indus juga telah mengadakan lima pertemuan membahas mengenai desain proyek Baglihar. Sebagai hasilnya, kedua pihak menyepakati pengurangan tinggi bendungan Baglihar sebesar 40 meter. Namun isu tersebut kembali memuncak ketika tahun 2006 proyek bendungan Baglihar menjadi proyek pengalihan air sungai (*run off river*). Mengetahui hal tersebut, bulan Juni 2006 Pakistan mengajukan kembali keberatan terhadap proyek Baglihar kepada Ahli Netral.

Sedangkan untuk proyek Kishanganga, Pakistan mulai mengajukan keberatan mengenai desain Kishanganga 900 MW pada bulan Juni 2004 yang pasti akan mengganggu penggunaan agrikultur di wilayah Azad Kashmir dan pembangunan proyek Neelum-Jhelum. Selama tahun 2004-2005 kedua pihak menggelar pertemuan dan dialog namun tidak pula mencapai kesepakatan.²¹⁵ Pada bulan April 2006 India mengubah desain proyek Kishanganga sebagai proyek pengalihan air. Pada bulan Juni-Agustus di tahun yang sama Pakistan kembali mengajukan keberatan, sehingga digelar beberapa pertemuan inklusif pada Komisi Indus sejak Mei 2007 hingga Juli 2008.²¹⁶ Karena belum mencapai jalan keluar, pada bulan Mei 2010 masalah tersebut diajukan ke Pengadilan Arbitrase

²¹⁴ Abbasi, "Indus Water Treaty".

²¹⁵ Kakakhel, "Indus Water Treaty".

²¹⁶ Kakakhel, "Indus Water Treaty".

Permanen (PCA) atau Pengadilan Arbitrase Internasional yang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa tertinggi berdasarkan aturan perjanjian Indus antara India dan Pakistan.

III.2.2 Intensitas Kerjasama

Antara tahun 2001-2007 India dan Pakistan juga telah membangun transportasi bersama sebagai salah satu hasil nyata dalam serangkaian proses dialog gabungan (*Composite Dialogue*) yang diadakan kembali pada Juni 2004. antara lain layanan angkutan darat sebagai berikut. Layanan bus yang pertama kali melintasi garis kontrol dibangun sejak 7 April 2005 yaitu antara Srinagar dan Muzaffarabad.²¹⁷ Pembangunan jalur kereta api antara Munabao di Rajasthan dan Khokhrapar di Sindh yang dimulai beroperasi pada 18 Februari 2006. Layanan Samjhauta Express yang menghubungkan Delhi dan Lahore kembali dilanjutkan pada tahun 2005, dan terus beroperasi walaupun setelah peristiwa pembakaran Samjhauta Express pada tahun 2007.²¹⁸ Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya dibuka jalur truk darat antara kedua negara di perbatasan Wagah-Attari. Pembukaan perbatasan untuk tujuan perdagangan menjadi langkah awal kedua negara untuk normalisasi hubungan melalui hubungan dagang.

Kebuntuan militer selama 10 bulan setelah serangan teroris di Parlemen India, pada 26 November 2003 kedua negara kembali mencairkan hubungan dengan hasil gencatan senjata di sepanjang Garis Kontrol.²¹⁹ Pada tanggal 10-11 Agustus 2004 kedua negara sepakat melakukan penandatanganan Mekanisme

²¹⁷ Padder, "The Composite Dialogue".

²¹⁸ Padder, "The Composite Dialogue".

²¹⁹ Padder, "The Composite Dialogue".

Institusional Anti Teroris dan Perdagangan Obat Bersama, sebagai sarana dalam melembagakan kerjasama pada bidang tersebut.²²⁰ Mekanisme Gabungan anti terorisme diperkuat dengan adanya Deklarasi Havana dengan pertemuan pertama diadakan pada bulan Maret 2007 membahas mengenai insiden Samjhuata Express.

Berbagai putaran pertemuan tingkat Menteri mengenai program pertukaran kebudayaan dan turis banyak digelar pada tahun 2004 hingga 2006, namun belum pernah memperoleh hasil yang cukup signifikan.²²¹ Peningkatan gerakan kampanye kebudayaan tingkat masyarakat kedua negara baru terjadi pada tahun 2010 setelah kampanye 'Aman ki Asha' 2010, program 'Exchange fo Change' 2010, dan menguatnya aturan liberalisasi visa 2012. Dalam hal isu kemanusiaan Menteri Dalam Negeri India dan Pakistan juga menandatangani persetujuan tentang pembebasan tahanan pada tanggal 30 Agustus 2005. Pada akhir 2011-awal 2012 kedua negara sepakat membentuk Komite Tahanan sebagai sarana untuk meningkatkan efektifitas mekanisme pembebasan tahanan.²²²

Perubahan intensitas konfliktual dan intensitas kerjasama yang terjadi antara India dan Pakistan pada tahun 2008-2014 setelah adanya keterlibatan Cina dalam membantu penyediaan dana dan pengembangan proyek Neelum-Jhelum juga dipengaruhi oleh pertimbangan rasionalitas pada India dan Pakistan. Pertimbangan rasionalitas tergantung pada konstruksi rasionalitas elit-elit politis yang terkait terhadap kondisi sumber daya air, penggunaan kompetitif, dan isu konflik lain yang lebih luas. Kemungkinan peningkatan perdebatan mengenai proyek Kishanganga pada sengketa perairan Indus sejak tahun 2011 hingga 2013

²²⁰ Padder, "The Composite Dialogue".

²²¹ Padder, "The Composite Dialogue".

²²² Padder, "The Composite Dialogue".

setelah hasil keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional yang mengizinkan India melanjutkan proyek Kishanganga, tidak mempengaruhi keputusan Pakistan untuk segera melancarkan peperangan air.²²³ Sebagaimana pula yang telah diungkapkan oleh Shah Mahmood Qureshi pada Konferensi Nasional April 2010 menungkapkan bahwa pemerintahan Pakistan sendiri telah mengakui bahwa selama ini salah dalam mengatur dan memanfaatkan pasokan air. Pertimbangan dasar rasionalitas juga muncul dari pihak India sebagaimana diungkapkan oleh G. Ranganathan, Komisioner Indus bahwa India dan Pakistan sama sama mengalami kelangkaan air, dan masalah ini adalah masalah bersama bagi India dan Pakistan maka seharusnya tidak mengarahkan kedua negara untuk melakukan peperangan.²²⁴ Perubahan dalam intensitas kerjasama dan konflikual antara India dan Pakistan dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut ini.

²²³ Ashraf Javed, "No Pak-India Water War: Ranganathan" *The Nation*, 11 Februari 2011, <http://www.nation.com.pk/politics/11-Feb-2010/No-PakIndia-water-war-Ranganathan> (Diakses 21 Desember 2014).

²²⁴ Javed, "No Pak-India", 1.

3.1 Tabel Perbandingan Intensitas Konflikual

	Skala	Indikator	Tahun 2001-2007	Tahun 2008-2014
Intensitas Konflikual	-7	Formal Declaration of War	-	-
	-6	Using nuclear weapons; full-scale air, naval, or land battles; invading or occupying territory; massive bombing of civilian areas; capturing of soldiers in battle; large scale bombing of military installations; chemical or biological warfare.		
	-5	Limited air, sea, or border skirmishes; border police acts; annexing territory already occupied; seizing material of target country; imposing blockades; assassinating leaders of target country; materially supporting subversive activities against target country.	11 Jan' 02, Kepala Militer India mendeklarasikan bahwa mobilisasi India dalam Operasi Parakram telah lengkap dan pasukannya telah siap perang	Januari 2013: pelanggaran garis lintas batas (LoC)
	-4	Inciting riots or rebellions (providing training or financial aid for rebellions); encouraging guerilla activities against target country; limited and sporadic terrorist actions; kidnapping or torturing foreign citizens or prisoners of war; giving sanctuary to terrorists; breaking diplomatic relations; attacking diplomats or embassies; expelling military advisors; executing alleged spies; nationalizing companies without	13 Des'01: akibat Serangan bom di Parlemen India menarik Komisaris Tinggi, mengurangi staff pada Komisaris Tinggi.(*) pemberontakan	26 Nov'08: Serangan bom di Mumbai 2010: pemberontakan dan protes melawan kontrol India di Kashmir

	compensation.		
-3	Increasing troop mobilization; boycotts; imposing economic sanctions; hindering movement on land, waterways, or in the air; embargoing goods; refusing mutual trade rights; closing borders and blocking free communication; manipulating trade or currency to cause economic problems; halting aid; granting sanctuary to opposition leaders; mobilizing hostile demonstrations against target country; refusing to support foreign military allies; recalling ambassador for emergency consultations regarding target country; refusing visas to other nationals or restricting movement in a country; expelling or arresting nationals or press; spying on foreign government officials; terminating major agreements. <i>Unilateral construction of water projects against another country's protests; reducing flow of water to another country, abrogation of a water agreement.</i>	<p>Mobilisasi pasukan besar besaran dalam Operasi Parakram, (*)</p> <p>pembatasan protokol maritim sampai tahun 2005 yang hanya mengizinkan kapal-kapal berbendera India dan Pakistan yang membawa kargo dan tidak mengizinkan kapal yang sama berlayar ke negara dunia ketiga untuk membawa kiriman melalui masing-masing pelabuhan. Pada tahun yang sama, tidak ada jalur perdagangan darat, hanya ada satu jalur rel untuk pergerakan kargo antara kedua negara.</p> <p>Perjanjian Larangan atau Pembatasan Visa selama 39 tahun yang lalu</p>	2013: perdagangan lintas batas secara bersamaan ditutup setelah peristiwa penembakan lintas-batas garis kontrol (LoC)
-2	Threatening retaliation for acts; making threatening demands and accusations; condemning strongly specific actions or policies; denouncing leaders, system, or ideology; postponing visits by heads of state; refusing participation in meetings or summits; leveling strong propaganda attacks; denying support; blocking or vetoing policy or proposals in the UN	<p>Desember 2001 hingga Juni 2002 India mengancam Pakistan bahwa India akan menarik diri dari Perjanjian Perairan Indus (<i>Indus Water Treaty</i>) (*)</p> <p>Pakistan menyatakan bahwa siap menggunakan senjata nuklir selama krisis air (*)</p> <p>September 2008: Pakistan mengancam akan</p>	<p>Menunda dialog mengenai permasalahan air yang dimulai pada tahun 2003 hingga 2008 (*)</p> <p>Setelah adanya insiden pelanggaran gencatan senjata disepanjang Garis Kontrol, kedua negara menunda pertemuan tingkat Menteri yang dijadwalkan akan digelar pada tanggal 28-29 Januari 2013 (*)</p>

		or other international bodies. <i>Official interactions only.</i>	meminta intervensi Bank Dunia karena India tidak segera menanggapi keluhan Pakistan secara berulang ulang mengenai aliran air Chenab (*)	Menteri Perdagangan Pakistan, Makhdoom Amin Fahim yang membatalkan kunjungan ke India untuk menghadiri pertemuan bisnis di Agra.
	-1	Objecting in a low-key way to policies or behaviour; communicating dissatisfaction through a third party; failing to reach an agreement; refusing protest note; denying accusations; objecting to explanation of goals, position, etc., requesting changes in policy. <i>Both unofficial and official, including diplomatic notes of protest.</i>	2005,Pakistan meminta Bank Dunia, untuk menghentikan pembangunan Baglihar di India (*)	Pakistan kembali mengajukan keberatan atas bendungan Baglihar dan Kishanganga (*)

Keterangan:

(*) : berhubungan dengan sengketa air

3.2 Tabel Perbandingan Intensitas Kerjasama

	Skala	Indikator	Tahun 2001-2007	Tahun 2008-2014
Intensitas Kerjasama	1	Organizing meetings of high officials; conferring about problems of mutual interest; inviting junior officials for talks; issuing joint communiques; appointing ambassadors; announcing ceasefires; allowing non-governmental exchanges; proposing talks; tolerating public non-governmental support of the regime; exchanging prisoners of war; requesting support for policy; stating or explaining policy.	26 November 2003 kedua negara kembali mencairkan hubungan dengan hasil gencatan senjata di sepanjang Garis Kontrol	Agustus 2011, Menteri Luar Negeri India S. M. Krishna mengatakan bahwa India ingin membangun hubungan dengan Pakistan, mengurangi penurunan kepercayaan, dan bergerak menuju persahabatan. Hal tersebut disambut baik oleh pihak Pakistan yaitu Menteri Luar Negeri Pakistan Hina Rabbani Khar pada bulan September 2011, dalam Dewan Umum PBB mengatakan bahwa Pakistan ingin tiada henti-hentinya berdialog dengan India
	2	Officially supporting policies, raising legations to embassies; reaffirming friendship; asking for help against third parties; apologizing for unfavorable actions or statements; allowing entry of press correspondents; asking for aid or expressing thanks for it; resuming broken diplomatic or other relations.	1994 sampai 2006 Komisi Air Indus mengadakan lima pertemuan yang menghasilkan pengurangan tinggi bendungan sebesar 40 meter (*)	Dialog air tahun 2003 hingga 2008 kembali dilanjutkan pada tahun 2011 (*) 24 Desember 2013 kedua pihak sepakat mengadakan pertemuan antar Direktur Jenderal Operasi Militer (DGMOs). menormalkan situasi di sepanjang Garis Kontrol melalui <i>flag meetings</i> tingkat lokal antara Pasukan Keamanan Pakistan Rangers dan Pasukan Keamanan Perbatasan India.

3	<p>Starting diplomatic relations; establishing technological or scientific communication; proposing or offering economic or military aid; recognizing the government; organizing visits by the head of state; opening borders; conducting or enacting friendship agreements; conducting cultural or academic agreements or exchanges.</p> <p><i>Agreements to set up co-operative working groups</i></p>	<p>2007, untuk pertama kalinya dibuka jalur truk darat antara kedua negara di perbatasan Wagah-Attari (*)</p>	<p>Maret 2011 Perdana Menteri Pakistan mengunjungi Mohali untuk memenuhi undangan Perdana Menteri India yaitu menonton semifinal <i>Cricket World Cup</i> antara India dan Pakistan</p>
4	<p>Making financial loans or grants; agreeing to economic pacts; giving industrial, cultural, or educational assistance; conducting trade agreements or granting Most-Favored-Nation status; establishing common transport or communication networks; selling industrial/ technological surplus supplies; providing technical expertise; ceasing economic restrictions; repaying debts; selling non-military goods; giving disaster relief. <i>Legal, co-operative actions between nations that are not treaties; co-operative projects for watershed management, irrigation, poverty-alleviation.</i></p>	<p>10-11 Agustus 2004 kedua negara sepakat melakukan penandatanganan Mekanisme Institusional Anti Teroris dan Perdagangan Obat Bersama</p>	<p>21 Maret 2014: Pakistan akan mengumumkan pemberian status MFN kepada India (*)</p> <p>Agustus 2010: Bantuan untuk korban banjir Pakistan (*)</p> <p>Februari 2012: penandatanganan <i>Customs Co-operation Agreement, Mutual Recognition Agreement, Trade Grievances Agreement</i> mengurangi daftar negatif item barang (*)</p> <p>Juli 2010, kedua negara menyetujui penggunaan sistem telemetri untuk merekam dan mentransfer data tepat waktu (*)</p> <p>Pada tanggal 13 April 2012, Menteri Dalam Negeri India dan Menteri Perdagangan Pakistan meresmikan operasionalisasi pos cek terintegrasi atau <i>Integrated Check Post</i> di Attari untuk meningkatkan proses pengangkutan dan pemeriksaan lalu lintas kargo (*)</p> <p>India dan Pakistan menandatangani perjanjian</p>

			liberalisasi visa pada 8 september 2012, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri India, SM Krishna dan Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rehman Malik
5	Selling nuclear power plants or material; providing air, naval, or land facilities for bases; giving technical or advisory military assistance; granting military aid; sharing highly advanced technology; intervening with military support at the request of government; concluding military agreements; training military personnel; formulating joint programmes and plans to initiate and pursue disarmament.		<p>Kesepakatan perdagangan listrik antara India-Pakistan, Bank Dunia menawarkan bantuan atas studi uji kelayakan dan pemasangan garis transmisi Pakistan untuk mengimpor 1200 MW listrik dari India (*)</p> <p>Pakistan juga menandatangani kesepakatan dengan perusahaan India Energi Biomasa Universal untuk membangun pembangkit listrik biomasa sebesar 15 MW di Punjab, Pakistan. pembangkit tersebut akan diserahkan kepada Pakistan setelah pemasangan dan dapat berfungsi selama dua tahun untuk membantu Pakistan menghadapi krisis energi. (*)</p>
6	Fighting a war jointly; establishing a joint military command or alliance; conducting joint military manoeuvres; establishing an economic common market; joining or organizing international alliances; establishing joint programmes to raise the global quality of life.		
7	Voluntary unification into one nation: <i>Merging voluntarily into one nation or state, forming one nation with one legally binding government.</i>	-	-

Keterangan

(*) : berhubungan dengan sengketa air

BAB IV

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa strategi perimbangan kekuatan melalui *hard power* menjadi tidak efektif karena telah terbukti gagal untuk mencapai pengaturan kerjasama penggunaan air bersama dan memperburuk kondisi konflik yang sedang terjadi. Sebaliknya, dengan menggunakan strategi perimbangan kekuatan melalui *soft power*, sebagaimana dalam konsep kompleksitas hidropolitik salah satunya melalui dukungan aktor eksternal dalam menyediakan dana alternatif untuk perkembangan infrastruktur bagi riparian lemah. Dorongan Cina dalam mempersuasi Pakistan untuk membuka hubungan yang lebih liberal dan komersil merupakan salah satu cara mempromosikan kerjasama dalam kondisi kompleksitas hidropolitik. Namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan muncul hubungan konfliktual dan kompetitif antara kedua negara tersebut.

Beberapa pengaruh yang dapat diberikan oleh aktor eksternal ketika bertindak sebagai penyedia dana alternatif dan membuka akses transfer teknologi antara lain sebagai berikut. Sebagaimana dalam kompleksitas hidropolitik dengan adanya sumber pendanaan alternatif maupun akses teknologi dari Cina, dapat membantu perkembangan dan pembangunan infrastruktur berbagai proyek dalam meningkatkan pelayanan publik maupun meningkatkan stabilitas ekonomi-politik. Hal ini menjadi langkah awal untuk menyeimbangkan kekuatan asimetris salah satunya melalui peningkatan perekonomian sebagai upaya mengurangi dominasi India sebagai hidro-hegemon. Pengaruh yang diberikan oleh Cina ketika

memainkan peranannya sebagai penyedia dana dan pengembang infrastruktur proyek air Pakistan ternyata secara tidak langsung telah meningkatkan posisi tawar Pakistan. Hal tersebut diketahui melalui bentuk peningkatan kepercayaan diri Pakistan untuk meningkatkan dialog damai dengan India mengenai pengajuan keberatan terhadap beberapa proyek bendungan yang akan dibangun pada cabang sungai sebelah barat melalui Komisi Permanen Indus serta keberanian Pakistan mengajukan kasus Kishanganga dan menghadapi argumen India dihadapan Pengadilan Arbitrase Internasional.

Pengaruh lain yang dapat diberikan oleh Cina sebagai aktor eksternal adalah melalui peran persuasif yaitu memberi saran kepada Pakistan untuk bersungguh-sungguh memperbaiki perekonomiannya dan mempercepat hubungan baik yang lebih liberal dengan India. Karena pihak Cina percaya bahwa sengketa yang terjadi antara India dan Pakistan dapat teredam melalui pencapaian kepentingan yang bersifat komersil, sebagaimana hubungan dagang antara India-Cina yang dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2008-2013 terjadi peningkatan volume dagang antara India dan Pakistan (lihat grafik 3.1 bab III 72), pengumuman pemberian status MFN dari Pakistan untuk India, liberalisasi visa, dan sebagainya. Beberapa isu lain yang terkait dengan indikator intensitas sengketa seperti insiden serangan bom di Mumbai, tidak ada langkah-langkah proaktif lagi yang diambil oleh pemerintah India seperti memblokir perdagangan, memutuskan jalur komunikasi, menarik Komisararis Tinggi, mengurangi staff pada Komisararis Tinggi, dan mobilisasi pasukan ke perbatasan Pakistan sebagaimana tahun 2001-2002.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel perbandingan intensitas konflikual dan intensitas kerjasama pada bab 3 sebelumnya, terlihat ada peningkatan intensitas kerjasama yang semula pada tahun 2001-2007 hanya sampai pada tingkat 4 namun pada tahun 2008-2014 dapat mencapai tingkat 5. Setidaknya, terdapat pembatasan kekerasan fisik, struktural, dan budaya dan perubahan sikap yang rasional dalam membangun kerjasama antara India dan Pakistan. Karena penggunaan kekerasan yang berujung pada peperangan (*water wars*) hanya menyebabkan kerugian besar dalam berbagai sektor khususnya dalam mendapatkan keamanan akses suplai air dalam jangka waktu lama dan kestabilan ekonomi-politik. Dengan demikian, pada akhirnya kedua negara harus menggunakan dasar pertimbangan rasionalitas untuk tidak segera melancarkan peperangan demi memperebutkan sumber daya air.

Sebagaimana dalam teori Rasionalitas Air, peningkatan kerjasama yang terjadi antara India-Pakistan juga sangat bergantung pada persepsi Cina. Pada Bab II, Cina telah terbukti memainkan perannya baik peran persuasif maupun sebagai pengembang infrastruktur proyek air Pakistan yang memegang komitmen sebagai pembangun bendungan untuk tidak memposisikan diri sebagai pihak ketiga atau pemecah hubungan India-Pakistan. Sehingga keterlibatan Cina dalam pembangunan infratstruktur Pakistan di PoK tanpa memandang dan mengadili sengketa yang sedang terjadi diantara India dan Pakistan, justru mendorong peningkatan hubungan dagang dan pengejaran kepentingan yang bersifat komersil untuk meredam sengketa yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bahry, Donna L, “Crossing Border: The Practice of Comarative Research”, dalam Jarol B. Manheim dan Richard C.Rich, *Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Sciences*. London: Longman Publisher, 1995.
- Buzan dan Waever, 2003 dalam Khrisna-Hensel, Sai Felicia ed. New Security Frontiers-Critical Energy and The Resource Challenge, *Global Interdisciplinary Studies Series*, ASHGATE, 2012.
- Lukes, *Power - A Radical View*, 2 th ed., Hampshire: Palgrave Mcmilan, 2005.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Skinner, Frank. *Pricing and Hedging Interest and Credit Risk Sensitive Instrumens*. Elsevier, 2005.
- Xu, Jiuping, et.al., *Proceedings Of The Sixth International Conference On Management Science And Engineering Management*. London:Springer-Verlag, 2013.
- Zeitoun, Mark, dan Woodhouse, M., “Hydro-hegemony and International Water Law: Grappling with the gaps of Power and Law” *Water*, Vol. 2, 2008.

Thesis/Dissertasi:

- Alam, Undula Z. “Water Rationality: Mediating the Indus Water Treaty”, master’s thesis, University of Durham, September 1998, <http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/MEDIATING%20THE%20INDUS%20WATER%20TREATLY.pdf> (diakses pada 12 Desember 2013).
- Barret, S. “Conflict and Cooperation in Managing International Water Resources”, CSERGE (Working Paper London Business School and

Centre for Social and Economic Research on the Global Environment
University College London and University of East Anglia.

- Carles, Alexis. “Power asymmetry and conflict over water resources in the Nile River Basin: the Egyptian hydro-hegemony” PhD diss., King’s College London, 2006,
http://proth2o.act.be/VIRTUELE_BIB/Water_in_de_Wereld/CON-Waterconflicten_en_rampen/W_CON_E5_Power_assymetry.pdf (Diakses pada 12 Desember 2013).
- Petheram, Lucy “Dam it?: Hydropolitics in the changing political context of Nepal”, master’s thesis, University of Otago, November 2010,
<http://otago.ourarchive.ac.nz/bitstream/handle/10523/1664/PetheramLucy2010MA.pdf> (diakses pada 24 Desember 2013).
- Sarfraz, Hamid “Revisiting the 1960 Indus Water Treaty”, *Water International*, Vol. 38, No. 2 (Routledge, April 2013), 209,
http://www.waterlawandgovernance.org/sites/default/files/documents/revisiting_the_1960_indus_waters_treaty_water_international.case_study.pdf (diakses pada 12 Desember 2013).
- Warner, James “Mind the GAP – Working with Buzan: the Illisu Dam as a security Issue” Occasional Paper 67, SOAS Water Issues Study Group, School of Oriental and African Studies/King’s College : London, 2004a.
- Warner, Jeroen “Hydrohegemony as layered cake: Hydro-hegemonic strategies – the case of Turkey”. Second workshop Hydro-Hegemony, Goodenough College, London, 6-7 Juni, 2006.
- Yoffe, Shira B. “Basin At Risk: Conflict and Cooperation Over International Freshwater Resources”, PhD diss., Oregon State University, 12 Oktober 2001,
http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/9693/Yoffe_Shira_B_2001_pt1.pdf?... (15 Desember 2013).

Jurnal Online:

- Anonim, “Indus Water Treaty and Resolution of Water Conflicts Between Two Nuclear Nations (India and Pakistan)”, (2010), <http://www.feem-web.it/ess/ess12/files.papers/hayat.pdf>. (diakses pada 2 Oktober 2013).
- Anonim, “Growth Resuming Dangers Remain” *IMF World Economic Outlook*, (April 2012), <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/pdf/text.pdf> (Diakses pada 21 Maret 2014).
- The new Great Walls, “A Guide to China’s Overseas Dam Industry”, First Edition, *International Rivers*, (Juli 2008):6, http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/new_great_walls_report.pdf (diakses pada 12 Desember 2013).
- The new Great Walls, “A Guide to China’s Overseas Dam Industry”, Second Edition, *International Rivers*, (November 2011):11, http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/intrivers_newgreatwalls_2012_0.pdf (diakses pada 12 Desember 2013).
- Abbasi, Mr. Arshad H. Indus Water Treaty between Pakistan and India Pakistan, (PILDAT, Januari 2012), http://www.pildat.org/publications/publication/FP/IndusWaterTreatybetweenPakistanAndIndia_PakIndiaDialogueIII.pdf (Diakses pada 8 Desember, 2013).
- Alam, Rafay et. al, “Re-Imagining the Indus” (Observer Research Foundation & Lahore University of Management Sciences, Oktober 2011), <http://orfonline.org/cms/export/orfonline/documents/other/indus.pdf> (Diakses pada 23 maret 2014).
- Askari Rizvi, Dr. Hasan. “Pakistan-India Relations, Post-Mumbai Deadlock and The Way Foward”, PILDAT (Desember 2010):10 <http://www.pildat.org/publications/publication/FP/PakistanIndiaRelations-PostMumbaiDeallockandTheWayForward.pdf> (diakses pada 23 Desember 2013).

- Bakshi, Gitanjali dan Trivedi, Sahiba. "The Indus Equation", (Strategic Foresight Group, 2011):1-42
http://www.strategicforesight.com/publication_pdf/10345110617.pdf
 (diakses pada 14 Desember 2013).
- Bisht, Medha. "The Politics of Water Discourse in Pakistan", *ICRIER Policy Series*, No.4, (Agustus 2011),1-17
http://www.icrier.org/pdf/Policy_Series_No_4.pdf (diakses pada 21 Desember 2013).
- Chandio, Khalid. "Water Security: Pakistan and Regional Perspective", *IPRI Journal* XII, no. 1 (Winter, 2012):132-8,
<http://ipripak.org/journal/winter2012/Opinion%202.pdf> (diakses pada 3 Maret 2014).
- De, Prabir et. al, , What Does MFN Trade Mean for India and Pakistan?, (Policy Research Working Paper, 6483, Juni 2013)
<http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6483> (Diakses pada 10 Februari 2014).
- De Stefano, Lucia, et. al, "Updating the International Water Events Database revised", *The United Nations World Water Assessment Programme*,
<http://www.unesdoc.unesco.org/images/0018/001818/181890e.pdf>
 (Diakses pada 8 Desember 2013).
- Gupta, Rukmani, "China Yearbook 2012", (IDSA, 2013),
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fidsa.in%2Fsystem%2Ffiles%2Fbook_ChinaYearbook2012.pdf&ei=lo23U_uHNsyUuASUioDYCQ&usg=AFQjCNFA8Uhi-LEBfHJrJvr-YFkpBEzRgw&sig2=FW3bl2EUtmK-Vo0uyCTLjw (diakses pada 9 September 2013).
- Hussain, Nazia. "Water: The New Dimension in India-China Relations", *Centre for Development and Peace Studies*,
<http://cdpsindia.org/pdf/water%20war.pdf>. (Diakses pada 12 November 2013)

- ISSRA, “Pakistan’s Water Security Dilemma: Revisiting the Efficacy of Indus Water Treaty” (Margalla Papers, Vol. XV, Issue I, 2011), 1-96 http://www.ndu.edu.pk/issra_pub/Margalla_Papers_Special_Edition_2011.pdf (diakses pada 23 Februari 2014).
- IDSIA, “Water Security For India: The External Dynamics” *Task Force Report*, (New Delhi, 2010), 40. http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/book_WaterSecurity.pdf (diakses pada 9 September 2013).
- IISD, “An Environmental Impact Assessment of China’s WTO Accession-An Analysis of Six Sectors” (IDSIA, 2004), <http://www.cbd.int/impact/case-studies/cs-impact-cciced-eia-en.pdf>. (Diakses pada 5 Desember 2013).
- Jarayam, Dhanasree “Environmental Change and Ripples for Water Security in Southern Asia”, NTS Alert (Juli 2012): 4. http://www.rsis.edu.sg/nts/HTML-Newsletter/Alert/pdf/NTS_Alert_jul_1201.pdf (diakses pada 3 Januari 2014).
- Kehl, Jenny R. “hydropolitical complexes and asymmetrical power – conflict, cooperation, and governance of international river systems”, *Journal of World-Systems Research* Vol. XVII, No. 1 (Spring, 2011):218-35. <http://www.jwsr.org/wp-content/uploads/2013/02/Kehl-vol17n1.pdf> (diakses pada 21 November 2013).
- Mahmood, Mr. Khalid. “Pakistan-India Relations – A Pakistani Narrative”, PILDAT (Desember 2010):1-16 <http://www.pildat.org/publications/publication/FP/PakistanIndiaRelations-APakistaniNarrative.pdf> (Diakses pada 10 Februari 2014).
- Padder, Sajad. “The Composite Dialogue between India and Pakistan: Structure, Process, and Agency”, (Working Paper No. 65, Hiedelberg University, Februari 2012) http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/13143/1/Heidelberg_Papers_65_Padder.pdf (Diakses pada 24 Desember 2013).

- Qiang, W., et. al, “Agricultural trade and virtual land use: The case of China’s crop trade”, *Land Use Policy* 33 (2013): 149, <http://sourcedb.igsnr.cas.cn/zw/lw/201303/P020130326514404914592.pdf> (Diakses pada 23 februari 2014).
- Rahman, Fazal ur. “Pakistan-China trade and investment relations”, http://www.issi.org.pk/publication-files/1299822989_45060000.pdf (Diakses pada 3 Desember 2013).
- Sahoo, Pravakar. “The Economic Relations of China and India with Pakistan: A Comparative Analysis”, Vol. 19, No. 1, *Asia-Pacific Development Journal*, (Juni 2012)”1-35, http://www.unescap.org/sites/default/files/chap-1-Pravakar_0.pdf (Diakses pada 23 Januari 2014).
- Siddique, Qandeel. “Deeper than the Indian Ocean? An Analysis of Pakistan-China Relations”, *SISA Report* no. 16 (Oslo, Februari 2014):1-44, http://strategiskanalyse.no/Publikasjoner/persen/202014/2014-02-27_SISA16_Sino-Pak_QS.pdf (diakses pada 5 April 2014).
- Taneja, Nisha., et. al., September 2013, “Normalizing India Pakistan Trade”, *ICRIER*. http://www.icrier.org/pdf/working_paper_267.pdf.pdf (Diakses pada 10 Februari 2014).
- Yusuf, Shahid. “Can Chinese FDI Accelerated Pakistan’s Growth?” (Working Paper, International Growth Centre, Goerge Washington University, Februari 2013) <http://www.theigc.org/sites/default/files/Shahid%20Yusuf%20Final.pdf> (Diakses pada 5 Desember 2013)
- Wirsing, R.G and Jaspardo, C., "Spotlight on Indus River Diplomacy: India, Pakistan, and the Baglihar Dam Dispute". *Asia-Pacific Center for Security Studies*, (2006), <http://www.apcss.org/Publications/APSSS/IndusRiverDiplomacy.Wirsing.Jaspardo.pdf>. (Diakses pada 2 Januari 2014)
- Zeitoun, Mark dan Warner, Jeroen. “Hydro-hegemony – A Framework for Analysis of Transboundary Water Conflicts” *Water Policy* 8 (London: Kings’s College University, 2006): 435-60.

https://www.uea.ac.uk/polopoly_fs/1.147026!ZeitounWarner_HydroHege_mony.pdf (Diakses pada 10 Desember 2013).

Dokumen Negara:

Indus Water Treaty, 1960,
<http://siteresources.worldbank.org/INTSOUTHASIA/Resources/223497-1105737253588/IndusWatersTreaty1960.pdf>. (Diakses pada 9 September 2013).

Artikel Online:

Anonim, "China Only Country to help Pakistan with energy crisis", 3 Agustus 2011,
<http://www.pakistantoday.com.pk/2011/08/03/news/profit/%E2%80%98china-only-country-to-help-pakistan-with-energy-crisis%E2%80%99/?printType=article.htm> (Diakses pada 2 November 2013).

Anonim, "Government Issues Stark Warning" *China Water Risk*,
<http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/government-issues-stark-warning/> (Diakses pada 5 November 2013)

Anonim, "Pakistan raises annual defence budget by 10 percent" *DAWN*, 12 Juni 2013,
<http://www.dawn.com/news/1017785/pakistan-raises-annual-defence-budget-by-10-per-cent> (Diakses pada 8 November 2013).

Anonim, "Blueprint of Bunji Dam Complete", 7 Mei 2013,
<http://www.tribune.com.pk/story/545248/blueprints-of-bunji-dam-complete/> (Diakses pada 23 November 2013).

Anonim, "Four Hydropower Project of 1619 Ready for Construction", *Associated Press of Pakistan*
http://app.com.pk/en /index.php?option=com_content&task=view&id=220555&Itemid=2 (Diakses pada 23 November 2013).

Anonim, "China Water Risk Goes Live" *China Water Risk*, 2011b,
<http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/china-water-risk-goes-live/>. (Diakses pada 5 Desember 2013).

Anonim, "Pakistan sees 4pc GDP growth in 2010-2011" *DAWN*, 2010, <http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/thenewspaper/business/pakistan-sees-4pc-gdp-growth-in-201011-740> (Diakses pada 5 Desember 2013).

Anonim, "Population growth will reduce water availability in Pakistan" *People's Daily*, 28 Juni 2010, <http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/7042509.html> (Diakses pada 8 Desember, 2013).

Anonim, "Who's Running Dry? Provinces, Autonomous Regions and Municipalities" *China Water Risk*, 2011, <http://chinawaterrisk.org/big-picture/whos-running-dry/> (Diakses pada 12 Desember 2013).

Anonim, Pemerintahan Pakistan, t.t, http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/tdap.gov.pk/ContentPages/2552076842.pdf#page=1 (diakses pada 13 Desember 2013).

Anonim, "China bails out Pakistan in hydropower race with India", 26 Mei 2012, <http://asian-power.com/project/news/china-bails-out-pakistan-in-hydropower-race-india.htm> (Diakses pada 21 Desember 2013).

Anonim, "GDP up, Touches 4,8% in Q2" *The Hindu*, 29 November 2013, <http://www.thehindu.com/business/Economy/gdp-up-touches-48-in-q2/article5405276.ece> (diakses pada 2 Januari 2014).

Anonim, "Major attack and blasts in India since 2001", *Reuters*, 25 Agustus 2007, <http://in.reuters.com/article/2007/08/25/idINIndia-29149720070825> (Diakses pada 2 Januari 2014).

Anonim, 13 Agustus 2010, "India offers \$ 5M in aid to Pakistan in 'hour of need'", <http://tribune.com.pk/story/39008/india-offers-5m-in-aid-to-pakistan/> (Diakses pada 10 Februari 2014).

Anonim, "Kishanganga will cause 13% drop in Pakistan's hydroelectricity generation" *Authint Mail*, 20 Desember 2013, <http://www.authintmail.com/article/kashmir/kishanganga-will-cause-13-drop-pakistans-hydroelectricity-generation.htm> (diakses pada 14 Januari 2014).

- Anonim, "Pakistan finds Sino-India trade template attractive", *The Economic Times*, 9 April 2012, <http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/persen/20and/persen/20nation-PM-Manmohan-Singh-to-get-free-water-power-post-elections/articleshow/34820499.cms> (Diakses pada 15 Februari 2014).
- Anonim, "India and Pak sign new liberalized visa Agreement", 8 September 2012, http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-09-08/india/33695663_1_visa-agreement-group-tourist-visitor-visa (Diakses pada 15 Februari 2014).
- Anonim, "India Pakistan water talks put off due to tension", *The Economic Times*, Januari 2013, http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-01-27/news/36577245_1_india-pakistan-neighbours-over-ceasefire-violations-islamabad (Diakses pada 26 Februari 2014).
- Anonim, "China Extends Intensive Cooperation to Pak Water, Power Sector" *Associated Press of Pakistan*, http://www.app.com.pk/en/index.php?option=com_content&task=view&id=124694&Itemid=252 (diakses pada 21 Februari 2014)
- Anonim, "FDI India", <http://fdiindia.in/> (Diakses pada 2 Maret 2014).
- Anonim, "India Hands Over \$ 20 million for Pakistan Flood Relief", *The Hindu*, 18 September 2010, <http://www.thehindu.com/news/national/india-hands-over-20-million-for-pakistan-flood-relief/article696893.ece>. (Diakses pada 16 Maret 2014).
- Anonim, "Aman Ki Asha", Times of India Group, <http://www.timesgroup.com/initiatives/national/aman-ki-aasha.html> (diakses pada 23 Februari 2014).
- Anonim, "CIA World Factbook", <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html> (Diakses pada 21 Maret 2014).
- Anonim, "Number of Dams by Country Members, General Synthesis" *International Commission on Large Dams (ICOLD)*, http://www.icold-cigb.org/GB/World_register/general_synthesis.asp?IDA=206 (22 Maret 2014).

- Anonim, Inflation.eu, “Inflation India”, 2014, <http://www.inflation.eu/inflation-rates/india/historic-inflation/cpi-inflation-india-2014.aspx> (diakses pada 23 Maret 2014).
- Anonim, Trading Economics, <http://www.tradingeconomics.com/pakistan/gdp> ; <http://www.tradingeconomics.com/india/gdp> (Diakses pada 23 Maret 2014).
- Anonim, “India allowed to go ahead with J&K’s Kishanganga project”, *Times of India*, 21 Desember 2013, <http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-allowed-to-go-ahead-with-JKs-Kishanganga-project-articleshow/27738180.cms.htm>. (Diakses pada 24 Maret 2014).
- Anonim, “Pakistan may grant India MFN status on Friday”, *Dawn*, 18 Maret 2014, tersedia dalam <http://www.dawn.com/news/1093810/pakistan-may-grant-india-mfn-status-on-friday.htm>. (Diakses pada 24 Maret 2014).
- Anonim, “Pakistan to import electricity from India: Report”, *The Economics Times*, 20 Maret 2014, http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-03-20/news/48402219_1_feasibility-study-electricity-mahatma-gandhi-power.htm. (diakses pada 24 Maret 2014).
- Anonim, “Comparisons of World Military Strengths Result”, *GFP*, <http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=India&country2=Pakistan&Submit=Compare+Countries> (diakses pada 14 April 2014).
- Anonim, “Cina ‘welcome’ India-Pakistan DGMOs meet” *The Hindu*, 18 September 2013, <http://www.thehindu.com/news/international/world/china-welcomes-indiapakistan-dgmos-meet/article5474556.ece.htm> (Diakses pada 12 Mei 2014).
- Anonim, 17 Desember 2013, “India Pakistan DGMOs to meet on December 24”, *The Hindu*, <http://www.thehindu.com/news/international/south-asia/india->

- [pakistan-dgmos-to-meet-on-december-24/article5470518.ece](http://www.pakistan-dgmos-to-meet-on-december-24/article5470518.ece) (Diakses pada 12 Mei 2014).
- Behera, Laxman K. "India's Defence Budget 2013-14: A Bumpy Road Ahead" (IDSA, 4 Maret 2013), http://www.idsa.in/idsacomments/IndiasDefenceBudget2013-14_Ikbehera_040313. (Diakses pada 22 Maret 2014).
- Bhardwaj, Sandeep. "The 2001-2002 India-Pakistan Standoff (Operation Parakram): A Dangerous Experiment", 17 Juli 2013, <http://revisitingindia.com/2013/07/17/the-2001-2002-india-pakistan-standoff-operation-parakram-a-dangerous-experiment/> (diakses pada 3 Maret 2014).
- Bhutta, Zafar. "Kishanganga project: Victory claims cloud final arbitration award, 22 Desember 2013", <http://tribune.com.pk/story/648986/kishanganga-project-victory-claims-cloud-final-arbitration-award/.htm>. (Diakses pada 24 Maret 2014).
- Chellaney, B & Tellis. A.J, "A Crisis to Come? China, India and Water Rivalry" (Carnegie Endowment for International Peace, 2011), <http://carnegieendowment.org/2011/09/13/crisis-to-come-china-india-and-water-rivalry/54wg> (diakses pada 21 Desember 2013).
- Choudhary, Zafar "Baglihar and Other Chestnuts", Countercurrents.org, 26 februari 2007, <http://www.defence.pk/forums/strategic-geopolitical-issues/48309-pakistan-india-water-disputes-24.html> (diakses pada 12 Januari 2014).
- Dar, Zubai A. "A Rivers and A Turbine", http://www.india-seminar.com/2013/643/643_zubair_a_dar.htm (diakses pada 1 Juni 2014).
- Gupta, Arvind "Indus Water Treaty: Zardari ups the ante on Water Issues" IDSA, 30 Januari 2009, http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/IndusWaterTreaty_AGupta_300109. (Diakses pada 10 Januari 2014).

- ICRIER, "Indian and Pakistani Prime Ministers meet in New York", 29 September 2013, <http://indiapakistantrade.org/recentDevelopments.html#NDMANawaz> (Diakses pada 10 April 2014).
- Javed, Ashraf "No Pak-India Water War: Ranganathan" *The Nation*, 11 Februari 2011, <http://www.nation.com.pk/politics/11-Feb-2010/No-PakIndia-water-war-Ranganathan> (Diakses 21 Desember 2014).
- Jha, Lalit K. "After 2001 Parliament attack, India deployed nuclear missiles on border", 29 Oktober 2011, <http://www.dnaindia.com/world/report-after-2001-parliament-attack-india-deployed-nuclear-missiles-on-border-1604580>. (25 Desember 2013).
- Kakakhel, Shafqat. "Indus Water Treaty: Negotiation, Implementation, New Challenges, and Future Prospects", 10 Mei 2014, <http://www.criterion-quarterly.com/the-indus-waters-treaty-negotiation-implementation-new-challenges-and-future-prospects/> (Diakses pada 1 Juni 2014).
- Khan, Omer Farooq. "Pakistan to grant MFN status to India", *TNN*, 8 September 2013, <http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Pakistan-to-grant-MFN-status-to-India/articleshow/22407883.cms> (Diakses pada 10 Februari 2014).
- Khetani, Sanya. "Could The 'China Model' Finally Improve Relations Between India and Pakistan?", 9 April 2012, <http://www.businessinsider.com/india-pakistan-china-model-2012-4?IR=T&> (Diakses pada 12 Mei 2014).
- Maken, Aftab. "FTA benefiting China more than Pakistan", *The News*, 12 Agustus 2011, <http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=62419&Cat=3>. (diakses pada 13 Desember 2013)
- Mochizuki J, dan Zhang, Z. "Environmental Security and its Implications for China's Foreign Relations" *Social Science Research Network*, (2011):11, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1808628, (diakses pada 21 Desember 2013).
- Mohan, Vishwa. "Indo-Pak talks on river water issues to begin on Sunday, 21 September 2013, <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Indo-Pak-talks->

[on-river-water-issues-to-begin-on-Sunday/articleshow/22860621.cms](http://www.firstpost.com/world/jk-water-dispute-india-registers-diplomatic-victory-over-pak-1301075.html)

(Diakses pada 24 Maret 2014).

PPIB, N.A. Zuberi, *Hydropower Resources of Pakistan*, (PPIB, Februari 2011)

<http://www.ppib.gov.pk/HYDRO.pdf>. (Diakses pada 20 November 2013)

Sharma, Rajeev. “J&K water dispute: India registers diplomatic victory over Pak”, 22 Desember 2013, <http://www.firstpost.com/world/jk-water-dispute-india-registers-diplomatic-victory-over-pak-1301075.html>

(Diakses pada 24 Maret 2014).

SIPRI, “The SIPRI Military Expenditure Database”,

<http://milexdata.sipri.org/result.php4> (diakses pada 14 April 2014).

Tan. D, “8 Take Aways: 2 Degrees Celsius and Water” *China Water Risk*, 2012,

<http://chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/8-takeaways-two-degrees-celsius-water/>. (Diakses pada 5 Desember 2013)

Tiezzi, Shannon. “China, Pakistan Flesh Out New ‘Economic Corridor’” *The Diplomat*. 20 februari 2014, <http://thediplomat.com/2014/02/china-pakistan-flesh-out-new-economic-corridor/>

(Diakses pada 3 Maret 2014).

UDGHOSH, “India’s Foreign Policy with Pakistan”, *Information Dossier*,

(2013):1-32, <http://NSC-Information-Dossier.pdf> (diakses pada 2 Januari 2014).

Varma, KJM. “China for closer relations with India and Pakistan”, 24 Juni 2011,

<http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-China-India-Pak-ties-require-new-perspective/20110624.htm#1> (Diakses pada 12 mei 2014).

Wang, Professor Guo Andrew. “China’s Business Relations with Australia and Pakistan” (ppt) Dept. of International Trade, Zhejiang Gongshang University,

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CHsQFjAI&url=http%3A%2F%2Fconet.zjgsu.edu.cn%2Fandrew.wang%2Fzd%2F120418_China's%2520Trade%2520Relations%2520with%2520Australia%2520and%2520%2520Pakistan.ppt&ei=2FS-

[UoSII8OHrgfLyYCIDQ&usg=AFQjCNH86eQ7pzTywty0wgTqWnWaA7HTOA&sig2=PIgvRqWZrYXKYZUgDsZ5Jg&bvm=bv.58187178,d.bmk](http://www.wapda.gov.pk/pdf/Development%20Portfolio.pdf)
(diakses pada 23 Desember 2013).

WAPDA, “Development Portfolio”,
<http://www.wapda.gov.pk/pdf/Development%20Portfolio.pdf>. (Diakses pada 23 November 2013).

WAPDA, “Mangla Dam Raising Project”,
<http://www.wapda.gov.pk/pdf/ManglaR1010.pdf>. (Diakses pada 22 November 2013).

WAPDA, “Satpara Dam Project”, 31 Oktober 2013,
<http://www.wapda.gov.pk/htmls/sataparapj.html>. (Diakses pada 23 November 2013).

WAPDA, “Kachhi Canal Project”,
http://wapda.gov.pk/vision2025/htmls_vision2025/kcp.htm. (Diakses pada 23 November 2013).

WAPDA, “Darawat Dam Project”, 15 Juli 2013,
<http://wapda.gov.pk/htmls/darawat.htm>(Diakses pada 23 November 2013)

WAPDA, “Duber Khawar Hydropower Project”, 31 Oktober 2013,
<http://www.wapda.gov.pk/htmls/duberkpj.html>. (Diakses pada 23 November 2013).

WAPDA, “Allai Khawar Hydropower Project”, 31 Oktober 2013,
<http://www.wapda.gov.pk/htmls/allaikpj.html>. (Diakses pada 23 November 2013).

WAPDA, “Jinnah Hydropower Project”, 15 April 2013,
http://wapda.gov.pk/vision2025/htmls_vision2025/jinnahhydropower.html.
(Diakses pada 23 November 2013).

WAPDA. t.t. “Neelum Jhelum Hydropower Project”
http://wapda.gov.pk/vision2025/htmls_vision2025_njhp.html (Diakses pada 23 November 2013).

Zaidi, Erum. “Pak-China currency swap accord implemented” *The News*, 8 Mei 2013,
<http://www.thenews.com.pk/Todays-News-3-175962-Pak-China-currency-swap-accord-implemented> (diakses pada 10 Januari 2014).

Zhixiao, Yu. “Improved Pakistan-India ties to boost regional peace, stability”, 8 April 2012, http://news.xinhuanet.com/english/indepth/2012-04/08/c_131513350.htm (Diakses pada 29 Oktober 2013).



LAMPIRAN

Lampiran 1. Indus Water Treaty 1960

Title: Indus Waters Treaty 1960 between the Government of India, the Government of Pakistan and the International Bank for reconstruction and development

Parties: India, Pakistan

Basin: Indus

Date: 9/19/1960

INDIA, PAKISTAN and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

The Indus Waters Treaty 1960 (with annexes). Signed at Karachi on 19 September 1960

Protocol to the above-mentioned Treaty. Signed on 27 November, 2 and 23 December 1960

Official text: English.

Registered by India on 16 January 1962.

No. 6032. THE INDUS WATERS TREATY 1960¹ BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA, THE GOVERNMENT OF PAKISTAN AND THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. SIGNED KARACHI, ON 19 SEPTEMBER 1960

PREAMBLE

The Government of India and the Government of Pakistan, being equally desirous of attaining the most complete and satisfactory utilisation of the waters of the Indus system of rivers and recognizing the need therefore, of fixing and delimiting, in a spirit of goodwill and friendship, the rights and obligations of each in relation to the other concerning the use of these waters and of making provision for the settlement in a cooperative spirit, of all such questions as may hereafter arise in regard to the interpretation or application of the provisions agreed upon herein, have resolved to conclude a Treaty in furtherance of these objectives, and for this purpose named as their plenipotentiaries:

The Government of India:

Shri Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, and The Government of Pakistan:

Field Marshal Mohammad Ayub Khan, H.P., H.J., President of Pakistan

who, having communicated to each other their respective Full Powers and found them in good and due form, have agreed upon the following Articles and Annexures:

Article I

DEFINITIONS

As used in this Treaty:

(1) The terms "Article" and "Annexure" mean respectively an Article of, an Annexure to, this Treaty. Except as otherwise indicated, references to Paragraphs are to the paragraphs in the Article or in the Annexure in which the reference is made

(2) The term "Tributary" of a river means any surface channel, whether in continuous or intermittent flow and by whatever name called, whose waters in the natural course would fall into that river, e.g. a tributary, a torrent, a natural drainage an artificial drainage, a *nadi*, a *nallah*, a *nai*, a *khad*, a *cho*. The term also includes any subtributary or branch or subsidiary channel, by whatever name called, whose waters, in the natural course, would directly or otherwise flow into that surface channel.

(3) The term "The Indus," "The Jhelum," "The Chenab," "The Ravi," "The Beas" or "The Sutlej" means the named river (including Connecting Lakes, if any) and all its Tributaries : Provided however that

- (i) none of the rivers named above shall be deemed to be a Tributary
- (ii) The Chenab shall be deemed to include the river Panjnad ; and
- (iii) the river Chandra and the river Bhaga shall be deemed to be Tributaries of The Chenab.

(4) The term "Main" added after Indus, Jhelum, Chenab, Sutlej, Beas or Ravi means the main stem of the named river excluding its Tributaries, but including all channels and creeks of the main stem of that river and such Connecting Lakes as form part of the main stem itself. The Jhelum Main shall be deemed to extend up to Verinag, and the Chenab Main up to the confluence of the river Chandra and the river Bhaga.

(5) The term "Eastern Rivers" means The Sutlej, The Beas and The Ravi taken together.

(6) The term "Western Rivers" means The Indus, The Jhelum and The Chenab taken together.

(7) The term "the Rivers" means all the rivers, The Sutlej, The Beas, The Ravi, The Indus, The Jhelum and The Chenab.

(8) The term "Connecting Lake" means any lake which receives water from, or yields water to, any of the Rivers; but any lake which occasionally and irregularly receives only the spill of any of the Rivers and returns only the whole or part of that spill is not a Connecting Lake.

(9) The term "Agricultural Use" means the use of water for irrigation, except for irrigation of household gardens and public recreational gardens.

(10) The term "Domestic Use" means the use of water for:

- (a) drinking, washing, bathing, recreation, sanitation (including the conveyance and dilution of sewage and of industrial and other wastes), stock and poultry and other like purposes;
- (b) household and municipal purposes (including use for household gardens and public recreational gardens) ; and
- (c) industrial purposes (including mining, mining and other like purposes) ; but the term does not include Agricultural Use or use for the generation of hydro-electric power.

(11) The term "Non-Consumptive Use" means any control or use of water for navigation, floating of timber or other property, flood protection or flood control, fishing or fish culture, wild life or other like beneficial purposes, provided that exclusive of seepage and evaporation of water incidental to the control or use, the water (undiminished in volume within the practical range of measurement) remains in, or is

returned to, the same river or its Tributaries ; but the term does not include Agricultural Use or use for the generation of hydroelectric power.

(12) The term "Transition Period" means the period beginning and ending as provided in Article 11 (6).

(13) The term "Bank" means the International Bank for Reconstruction Development.

(14) The term "Commissioners" means either of the Commissioners appointed under the provisions of Article VIII (1) and the term "Commission" means the Permanent Indus Commission constituted in accordance with Article VIII (3).

(15) The term "interference with the waters" means

(a) Any act of withdrawal therefrom ; or

(b) Any man-made obstruction to their flow which causes a change in the volume (within the practical range of measurement) of the daily flow of the waters. Provided however that an obstruction which involves only an insignificant and incidental change in the volume of the daily flow, for example, fluctuations due to afflux caused by bridge piers or a temporary by-pass, etc., shall not be deemed to be an interference with the waters.

(16) The term "Effective Date" means the date on which this effect in accordance with the provisions of Article XII, that is, the first of April 1960

Article II

PROVISIONS REGARDING EASTERN RIVERS

(1) All the waters of the Eastern Rivers shall be available for the unrestricted use of India, except as otherwise expressly provided in this Article.

(2) Except for Domestic Use and Non-Consumptive Use, Pakistan shall be under an obligation to let flow, and shall not permit any interference with, the waters of the

Sutlej Main and the Ravi Main in the reaches where these rivers flow in Pakistan and have not yet finally crossed into Pakistan. The points of final crossing are the following: (a) near the new Hasta Bund upstream of Suleimanke in the case of the Sutlej Main, and (b) about one and a half miles upstream of the syphon for the B-R B-D Link in the case of the Ravi Main.

(3) Except for Domestic Use, Non-Consumptive Use and Agricultural (as specified in Annexure B),² Pakistan shall be under an obligation to let flow, and shall not permit any interference with, the waters (while flowing in Pakistan) of any Tributary which in its natural course joins the Sutlej Main or the Ravi Main before these rivers have finally crossed into Pakistan.

(4) All the waters, while flowing in Pakistan, of any Tributary which, in its natural course, joins the Sutlej Main or the Ravi Main after these rivers have finally crossed into Pakistan shall be available for the unrestricted use of Pakistan : Provided however that this provision shall not be construed as giving Pakistan any claim or right to any releases by India in any such Tributary. If Pakistan should deliver any of the waters of any such Tributary, which on the Effective Date joins the Ravi Main after this river has finally crossed into Pakistan, into a reach of the Ravi Main upstream of this crossing, India shall not make

use of these waters ; each Party agrees to establish such discharge observation stations and make such observations as may be necessary for the determination of the component of water available for the use of Pakistan on account of the aforesaid deliveries by Pakistan, and Pakistan agrees to meet the cost of establishing the aforesaid discharge observation stations and making the aforesaid observations.

(5) There shall be a Transition Period during which, to the extent specified in Annexure H,³ India shall

(i) limit its withdrawals for Agricultural Use,

(ii) limit abstractions for storages, and

(iii) make deliveries to Pakistan from the Eastern Rivers.

(6) The Transition Period shall begin on 1st April 1960 and it shall end on 31st March 1970, or, if extended under the provisions of Part 8 of Annexure H, on the date up to which it has been extended. In any event, whether or not the replacement referred to in Article IV (1) has been accomplished, the Transition Period shall end not later than 31st March 1973.

(7) If the Transition Period is extended beyond 31st March 1970, the provisions of Article V (5) shall apply.

(8) If the Transition Period is extended beyond 31st March 1970, the provisions of Paragraph (5) shall apply during the period of extension beyond 31st March 1970.

(9) During the Transition Period, Pakistan shall receive for unrestricted use the waters of the Eastern Rivers which are to be released by India in accordance with the provisions of Annexure H. After the end of the Transition Period, Pakistan shall have no claim or right to releases by India of any of the waters of the Eastern Rivers. In case there are any releases, Pakistan shall enjoy the unrestricted use of the waters so released after they have finally crossed into Pakistan : Provided that in the event that Pakistan makes any use of these waters, Pakistan shall not acquire any right whatsoever, by prescription or otherwise, to a continuance of such releases or such XXXX (pg134)

Article III

PROVISIONS REGARDING WESTERN RIVERS

- (1) Pakistan shall receive for unrestricted use all those waters of the Western Rivers which India is under obligation to let flow under the provisions of Paragraph (XXXX)
- (2) India shall be under an obligation to let flow all the waters of the Western Rivers, and shall not permit any interference with these waters, except for the following uses, restricted (except as provided in item (c) (ii) of Paragraph 5 of Annexure C) in the case of each of the rivers, The Indus, The Jhelum Chenab, to the drainage basin thereof :
 - (a) Domestic Use ;
 - (b) Non-Consumptive Use;
 - (c) Agricultural Use, as set out in Annexure C ; and
 - (d) Generation of hydroelectric power, as set out in Annexure D.
- (3) Pakistan shall have the unrestricted use of all waters originating from the source other than the Eastern Rivers which are delivered by Pakistan into The Ravi or The Sutlej, and India shall not make use of these waters. Each Party agrees to establish such discharge observation stations and make such observations as may be considered necessary by the Commission for the determination of the component of water available for the use of Pakistan on account of the aforesaid deliveries by Pakistan.
- (4) Except as provided in Annexures D and E, India shall not store any water, or construct any storage works on, the Western Rivers.

Article IV

PROVISIONS REGARDING EASTERN RIVERS AND WESTERN RIVERS

- (1) Pakistan shall use its best endeavours to construct and bring into operation, with due regard to expedition and economy, that part of a system of works which will accomplish the replacement, from the Western Rivers and other sources, of water supplies for irrigation canals in Pakistan which, on 15th August 1947, were dependent on water supplies from Eastern Rivers.
- (2) Each Party agrees that any Non-Consumptive Use made by it shall be not made as not to materially change, on account of such use, the flow in any channel the prejudice of the uses on that channel by the other Party under the provisions of this Treaty. In executing any scheme of flood protection or flood each Party will avoid, as far as practicable, any material damage to the other Party, and any such scheme carried out by India on the Western Rivers shall not involve any use of water or any storage in addition to that provided under Article III.
- (3) Nothing in this Treaty shall be construed as having the effect of preventing either Party from undertaking schemes of drainage, river training, conservation of soil against erosion and dredging, or from removal of stones, gravel or sand of the Rivers : Provided that
 - (a) in executing any of the schemes mentioned above, each Party will avoid, as far as practicable, any material damage to the other Party ;
 - (b) any such scheme carried out by India on the Western Rivers shall not involve any use of water or any storage in addition to that provided under Article III;

(c) except as provided in Paragraph (5) and Article VII (1) (b), India not take, any action to increase the catchment area, beyond the area on the Effective Date of any natural or artificial drainage or drain which crosses into Pakistan, and shall not undertake such construction or remodelling of any drainage or drain which so crosses or falls into a drainage or drain which so crosses as might cause XXXX (page 136) damage in Pakistan or entail the construction of a new drain or enlargement of an existing drainage or drain in Pakistan; and

(d) should Pakistan desire to increase the catchment area, beyond the area on the Effective Date, of any natural or artificial drainage or drain, which reduces drainage waters from India, or, except in an emergency, to pour any water XXXX (pg 136) it in excess of the quantities received by it as on the Effective Date, Pakistan shall before undertaking any work for these purposes, increase the capacity of that drainage or drain to the extent necessary so as not to impair its efficacy for dealing with drainage waters received from India as on the Effective Date.

(4) Pakistan shall maintain in good order its portions of the drainages mentioned below with capacities not less than the capacities as on the Effective Date

(i) Hudiyara Drain

(ii) Kasur Nala

(iii) Salimshah Drain

(iv) Fazilka Drain.

(5) If India finds it necessary that any of the drainages mentioned in Paragraph (4) should be deepened or widened in Pakistan, Pakistan agrees to undertake to do so as a work of public interest, provided India agrees to pay the cost of the deepening or widening.

(6) Each Party will use its best endeavours to maintain the natural channels of the Rivers, as on the Effective Date, in such condition as will avoid, as far as practicable, any obstruction to the flow in these channels likely to cause material damage to the other Party.

(7) Neither Party will take any action which would have the effect of diverting the Ravi Main between Madhopur and Lahore, or the Sutlej Main between Hanke and Suleimanke, from its natural channel between high banks.

(8) The use of the natural channels of the Rivers for the discharge of flood or other excess waters shall be free and not subject to limitation by either Party, and neither Party shall have any claim against the other in respect of any damage caused by such use. Each Party agrees to communicate to the other Party, as far in advance as practicable, any information it may have in regard to such extraordinary discharge of water from reservoirs and flood flows as may affect the other Party.

(9) Each Party declares its intention to operate its storage dams, barrages and irrigation canals in such manner, consistent with the normal operations of its hydraulic systems, as to avoid, as far as feasible, material damage to the other Party.

(10) Each Party declares its intention to prevent, as far as practicable undue pollution of the waters of the Rivers which might affect adversely uses similar in nature to those to which the waters were put on the Effective Date, and agrees to take all reasonable measures to ensure that, before any sewage or industrial waste is allowed to flow into the Rivers, it will be treated, where necessary, in such manner as far not materially to affect those uses : Provided that the criterion of reasonableness shall be the customary practice in similar situations on the Rivers.

(11) The Parties agree to adopt, is far as feasible, appropriate measures for the recovery, and restoration to owners, of timber and other property floated or floating down the Rivers, subject to appropriate charges being paid by the owners.

(12) The use of water for industrial purposes under Articles II (2), II (3) and III (2) shall not exceed :

(a) in the case of an industrial process known on the Effective Date, such quantum of use as was customary in that process on the Effective Date

(b) in the case of an industrial process not known on the Effective Date

(i) such quantum of use as was customary on the Effective Date in similar or in any way comparable industrial processes; or

(ii) if there was no industrial process on the Effective Date similar or in any way comparable to the new process, such quantum of use as would not have a substantially adverse effect on the other Party.

(13) Such part of any water withdrawn for Domestic Use under the provisions of Articles 11 (3) and III (2) as is subsequently applied to Agricultural Use shall be accounted for as part of the Agricultural Use specified in Annexure B and Annexure G respectively; each Party will use its best endeavours to return to the same river (directly or through one of its Tributaries) all water withdrawn therefrom for industrial purposes and not consumed either in the industrial processes for which it was withdrawn or in some other Domestic Use.

(14) In the event that either Party should develop a use of the waters of the Rivers which is not in accordance with the provisions of this Treaty, that Party shall not acquire by reason of such use any right, by prescription or otherwise, to a continuance of such use.

(15) Except as otherwise required by the express provisions of this Treaty nothing in this Treaty shall be construed as affecting existing territorial rights over the waters of any of the Rivers or the beds or banks thereof, or as affecting existing property rights under municipal law over such waters or beds or banks.

Article V

FINANCIAL PROVISIONS

(1) In consideration of the fact that the purpose of part of the system of works referred to in Article IV (1) is the replacement, from the Western Rivers and other sources, of water supplies for irrigation canals in Pakistan which, on 15th August 1947 were dependent on water supplies from the Eastern Rivers, India agrees to make a fixed contribution of Pounds Sterling 62,060,000 towards the costs of these works. The amount in Pounds Sterling of this contribution shall remain unchanged irrespective of any alteration in the par value of any currency.

(2) The sum of Pounds Sterling 62,060,000 specified in Paragraph (1) shall be paid in ten equal annual instalments on the 1st of November of each year. The first of such annual instalments shall be paid on 1st November 1960, or if the Treaty has not entered into force by that date, then within one month after the Treaty enters into force.

(3) Each of the instalments specified in Paragraph (2) shall be paid to the Bank for the credit of the Indus Basin Development Fund to be established and administered by the Bank, and payment shall be made in Pounds Sterling, or in such other currency or currencies as may from time to time be agreed between India and the Bank.

(4) The payments provided for under the provisions of Paragraph (3) shall be made without deduction or set-off on account of any financial claims of India on Pakistan arising otherwise than under the provisions of this Treaty: Provided that this provision shall in no way absolve Pakistan from the necessity of paying in other ways debts to India which may be outstanding against Pakistan.

(5) If, at the request of Pakistan, the Transition Period is extended in accordance with the provisions of Article II (6) and of Part 8 of Annexure H, the Bank shall thereupon pay to India out of the Indus Basin Development Fund the appropriate amount specified in the Table below:

Table

<i>Period of Aggregate Extension of Transition Period</i>	<i>Paynet to India £Stg.</i>
One year	3,125,000
Two years	6,406,250
Three years	9,850,000

(6) The provisions of Article IV (1) and Article V (1) shall not be construed as conferring upon India any right to participate in the decisions as to the system of works which Pakistan constructs pursuant to Article IV (1) or as constituting an assumption of any responsibility by India or as an agreement by India in regard to such works.

(7) Except for such payments as are specifically provided for in this Treaty neither Party shall be entitled to claim any payment for observance of the provisions of this Treaty or to make any charge for water received from it by the other Party.

Article VI

EXCHANGE OF DATA

(1) The following data with respect to the flow in, and utilisation of the waters of, the Rivers shall be exchanged regularly between the Parties:

(a) Daily (or as observed or estimated less frequently) gauge and discharge data relating to flow of the Rivers at all observation sites.

(b) Daily extractions for or releases from reservoirs.

(c) Daily withdrawals at the heads of all canals operated by government or by a government agency (hereinafter in this Article called canals), including link canals.

(d) Daily escapages from all canals, including link canals.

(e) Daily deliveries from link canals.

These data shall be transmitted monthly by each Party to the other as soon as the data for a calendar month have been collected and tabulated, but not later than three months after the end of the months to which they relate: Provided that such of the data specified above as are considered by either Party to be necessary for operational purposes shall be supplied daily or at less frequent intervals, as may be requested: Should one Party request the supply of any of these data by telegram, telephone, wireless, it shall reimburse the other Party for the cost of transmission.

(2) If, in addition to the data specified in Paragraph (1) of this Article, either Party requests the supply of any data relating to the hydrology of the Rivers, or to canal or reservoir operation connected with the Rivers, or to any provision of this Treaty, such data shall be supplied by the other Party to the extent that these are available.

Article VII

FUTURE CO-OPERATION

(1) The two Parties recognize that they have a common interest in the optimum development of the Rivers, and, to that end, they declare their intention to co-operate, by mutual agreement, to the fullest possible extent. In particular:

(a) Each Party, to the extent it considers practicable and on agreement by the other Party to pay the costs to be incurred, will, at the request of the other Party, set up or install such hydrologic observation stations within the drainage basins of the Rivers, and set up or install such meteorological observation stations relating thereto and carry out such observations thereat, as may be requested, and will supply the data so obtained.

(b) Each Party, to the extent it considers practicable and on agreement by the other Party to pay the costs to be incurred, will, at the request of the other Party carry out such new drainage works as may be required in connection with new drainage works of the other Party.

(c) At the request of either Party, the two Parties may, by mutual agreement, co-operate in undertaking engineering works on the Rivers.

The formal arrangements, in each case, shall be as agreed upon between the Parties.

(2) If either Party plans to construct any engineering work which would cause interference with the waters of any of the Rivers and which, in its opinion, would affect the other Party materially, it shall notify the other Party of its plans and shall supply such data relating to the work as may be available and as would enable the other Party to inform itself of the nature, magnitude and effect of the work. If a work would cause interference with the waters of any of the Rivers but would not, in the opinion of the Party planning it, affect the other Party materially, nevertheless the Party planning the work shall, on request, supply the other Party with such data: regarding the nature, magnitude and effect, if any, of the work as may be available.

Article VIII

PERMANENT INDUS COMMISSION

- (1) India and Pakistan shall each create a permanent post of Commissioner for Indus Waters, and shall appoint to this post, as often as a vacancy occurs, a person who should ordinarily be a high-ranking engineer competent in the field of hydrology and water-use. Unless either Government should decide to take up any particular question directly with the other Government, each Commissioner will be the representative of his Government for all matters arising out of this Treaty, and will serve, as the regular channel of communication on all matters relating to the implementation of the Treaty, and, in particular, with respect to
- (a) the furnishing or exchange of information or data provided for in the Treaty; and
 - (b) the giving of any notice or response to any notice provided for in the Treaty.
- (2) The status of each Commissioner and his duties and responsibilities towards his Government will be determined by that Government.
- (3) The two Commissioners shall together form the Permanent Indus Commission.
- (4) The purpose and functions of the Commission shall be to establish and maintain co-operation between the Parties in the development of the waters of the Rivers and, in particular,
- (a) to study and report to the two Governments on any problem relating to the development of the waters of the Rivers which may be jointly referred to the Commission by the two Governments: in the event that a reference is made by one Government alone, the Commissioner of the other Government shall obtain the authorization of his Government before he proceeds to act on the reference;
 - (b) to make every effort to settle promptly, in accordance with the provisions of Article IX (1), any question arising thereunder;
 - (c) to undertake, once in every five years, a general tour of inspection of the Rivers for ascertaining the facts connected with various developments and works on the Rivers ;
 - (d) to undertake promptly, at the request of either Commissioner, a tour of inspection of such works or sites on the Rivers as may be considered necessary by him for ascertaining the facts connected with those works or sites ; and
 - (e) to take, during the Transition Period, such steps as may be necessary for the implementation of the provisions of Annexure H.
- (5) The Commission shall meet regularly at least once a year, alternately in India and Pakistan. This regular annual meeting shall be held in November or in such other month as may be agreed upon between the Commissioners. The Commission shall also meet when requested by either Commissioner.
- (6) To enable the Commissioners to perform their functions in the Commission, each Government agrees to accord to the Commissioner of the other Government the same privileges and immunities as are accorded to representatives of member States to the principal and subsidiary organs of the United Nations under Sections 11, 12 and 13 of Article IV of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (dated 13th February, 1946) during the periods specified in those Sections. It is understood and agreed that these privileges and immunities are accorded to the Commissioners not for the personal benefit of the individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the Commission; consequently, the Government appointing the Commissioner not only has the right but is under a duty to waive the immunity of its Commissioner in any case where, in the opinion of the appointing Government, the immunity would impede course of justice and can be waived without prejudice to the purpose for which immunity is accorded.
- (7) For the purposes of the inspections specified in Paragraph (4) (c) and (d) each Commissioner may be accompanied by two advisers or assistants to whom appropriate facilities will be accorded.

(8) The Commission shall submit to the Government of India and to the Government of Pakistan, before the first of June of every year, a report on its work for the year ended on the preceding 31st of March, and may submit to the two Governments other reports at such times as it may think desirable.

(9) Each Government shall bear the expenses of its Commissioner and his ordinary staff. The cost of any special staff required in connection with the work mentioned in Article VII (1) shall be borne as provided therein.

(10) The Commission shall determine its own procedures.

Article IX

SETTLEMENT OF DIFFERENCES AND DISPUTES

(1) Any question which arises between the Parties concerning the interpretation or application of this Treaty or the existence of any fact which, if established, might constitute a breach of this Treaty shall first be examined by the Commission, which will endeavour to resolve the question by agreement.

(2) If the Commission does not reach agreement on any of the questions mentioned in Paragraph (1), then a difference will be deemed to have arisen, which shall be dealt with as follows :

(a) Any difference which, in the opinion of either Commissioner, falls within the provisions of Part I of Annexure F shall, at the request of either Commissioner, be dealt with by a Neutral Expert in accordance with the provisions of Part 2 of Annexure F;

(b) If the difference does not come within the provisions of Paragraph (2) (a), or if a Neutral Expert, in accordance with the provisions of Paragraph 7 of Annexure F, has informed the Commission that, in his opinion, the difference, or a part thereof, should be treated as a dispute, then a dispute will be deemed to have arisen which shall be settled in accordance with the provisions of Paragraphs (3), (4) and (5)

Provided that, at the discretion of the Commission, any difference may either be dealt with by a Neutral Expert in accordance with the provisions of Part 2 of Annexure F or be deemed to be a dispute to be settled in accordance with the provisions of Paragraphs (3), (4) and (5), or may be settled in any other way agreed upon by the Commission.

(3) As soon as a dispute to be settled in accordance with this and the succeeding paragraphs of this Article has arisen, the Commission shall, at the request of either Commissioner, report the fact to the two Governments, as early as practicable, stating in its report the points on which the Commission is in agreement and the issues in dispute, the views of each Commissioner on these issues and his reasons therefor.

(4) Either Government may, following receipt of the report referred to in Paragraph (3), or if it comes to the conclusion that this report is being unduly delayed in the Commission, invite the other Government to resolve the dispute by agreement. In doing so it shall state the names of its negotiators and their readiness to meet with the negotiators to be appointed by the other Government at a time and place to be indicated by the other Government. To assist in these negotiations, the two Governments may agree to enlist the services of one or more mediators acceptable to them.

(5) A court of Arbitration shall be established to resolve the dispute in the manner provided by Annexure G

(a) upon agreement between the Parties to do so; or

(b) at the request of either Party, if, after negotiations have begun pursuant to Paragraph (4), in its opinion the dispute is not likely to be resolved by negotiation or mediation ; or

(c) at the request of either Party, if, after the expiry of one month following receipt by the other Government of the invitation referred to in Paragraph (4), that Party comes to the conclusion that the other Government is unduly delaying the negotiations.

(6) The provisions of Paragraphs (3), (4) and (5) shall not apply to any difference while it is being dealt with by a Neutral Expert.

Article X

EMERGENCY PROVISION

If, at any time prior to 31st March 1965, Pakistan should represent to the Bank that, because of the outbreak of large-scale international hostilities arising out of causes beyond the control of Pakistan, it is unable to obtain from abroad the materials and equipment necessary for the completion, by 31st March 1973, of that part of the system of works referred to in Article IV (1) which related to the replacement referred to therein, (hereinafter referred to as the "replacement element") and if, after consideration of this representation in consultation with India, the Bank is of the opinion that

(a) these hostilities are on a scale of which the consequence is that Pakistan is unable to obtain in time such materials and equipment as must be procured from abroad for the completion, by 31st March 1973, of the replacement element, and

(b) since the Effective Date, Pakistan has taken all reasonable steps to obtain the said materials and equipment and, with such resources of materials and equipment as have been available to Pakistan both from within Pakistan and from abroad, has carried forward the construction of the replacement element with due diligence and all reasonable expedition, the Bank shall immediately notify each of the Parties accordingly. The Parties undertake, without prejudice to the provisions of Article XII (3) and (4), that on being so notified, they will forthwith consult together and enlist the good offices of the Bank in their consultation, with a view to reaching mutual agreement as to whether or not, in the light of all the circumstances then prevailing, any modifications of the provisions of this Treaty are appropriate and advisable and, if so, the nature and the extent of the modifications.

Article XI

GENERAL PROVISIONS

(1) It is expressly understood that

(a) this Treaty governs the rights and obligations of each Party in relation to the other with respect only to the use of the waters of the Rivers and matters incidental thereto; and

(b) nothing contained in this Treaty, and nothing arising out of the execution thereof, shall be construed as constituting a recognition or waiver (whether tacit, by implication or otherwise) of any rights or claims

whatsoever of either of the Parties other than those rights or claims which are expressly recognized or waived in this Treaty.

Each of the Parties agrees that it will not invoke this Treaty, anything contained therein, or anything arising out of the execution thereof, in support of any of its own rights or claims whatsoever or in disputing any of the rights or claims whatsoever of the other Party, other than those rights or claims which are expressly recognized or waived in this Treaty.

(2) Nothing in this Treaty shall be construed by the Parties as in any way establishing any general principle of law or any precedent.

(3) The rights and obligations of each Party under this Treaty shall remain affected by any provisions contained in, or by anything arising out of the execution of, any agreement establishing the Indus Basin Development Fund.

Article XII

FINAL PROVISIONS

(1) This Treaty consists of the Preamble, the Articles hereof and Annexures A to H hereto, and may be cited as "The Indus Waters Treaty 1960".

(2) This Treaty shall be ratified and the ratifications thereof shall be exchanged in New Delhi. It shall enter into force upon the exchange of ratifications, and will then take effect retrospectively from the first of April 1960.

(3) The provisions of this Treaty may from time to time be modified by a duly ratified treaty concluded for that purpose between the two Governments.

(4) The provisions of this Treaty, or the provisions of this Treaty as modified under the provisions of Paragraph (3), shall continue in force until terminated by a duly ratified treaty concluded for that purpose between the two Governments.

IN WITNESS WHEREOF the respective Plenipotentiaries have signed this Treaty and have hereunto affixed their seals.

DONE in triplicate in English at Karachi on this Nineteenth day of September 1960.

For the Government of India:
(Signed) Jawaharlal NEHRU
For the Government of Pakistan

(Signed) Mohammad Ayub KHAN
Field Marshal, H.P., H.J.

For the International Bank for Reconstruction and Development,
for the purposes specified in Articles V and X and Annexures F, G and H

(Signed) W. A. B. ILIFF



- Ketentuan penggunaan hidro-elektrik bagi India dan Pakistan dalam pasal tambahan:

**ANNEXURE C—AGRICULTURAL USE BY INDIA
FROM THE WESTERN RIVERS**

(Article III (2)(c))

9. On those Tributaries of The Jhelum on which there is any Agricultural Use or hydro-electric use by Pakistan, any new Agricultural Use by India shall be so made as not to affect adversely the then existing Agricultural Use or hydro-electric use by Pakistan on those Tributaries.

**ANNEXURE D—GENERATION OF HYDRO-ELECTRIC
POWER BY INDIA ON THE WESTERN RIVERS**

(ARTICLE III (3)(d))

15. Subject to the provisions of Paragraph 17, the works connected with a Plant shall be so operated that (a) the volume of water received in the river upstream of the Plant, during any period of seven consecutive days, shall be delivered into the river below the Plant during the same seven-day period, and (b) in any one period of 24 hours within that seven-day period, the volume delivered into the river below the Plant shall be not less than 30%, and not more than 130%, of the volume received in the river above the Plant during the same 24-hour period: Provided however that:

(iii) where a Plant is located on a Tributary of The Jhelum on which Pakistan has any Agricultural Use or hydro-electric use, the water released below the Plant may be delivered, if necessary, into another Tributary but only to the extent that the then existing Agricultural Use or hydro-electric use by Pakistan on the former Tributary would not be adversely affected

Sumber : Indus Water Treaty 1960 between the Government of India, Government of Pakistan and the International Bank for Reconstruction and Development, tersedia dalam <http://ocid.nacse.org/tfdd/tfddddocs/242ENG>. (diakses pada 10 September 2013).

**Lampiran 2. Pakistan-India *Final Award* Pengadilan Arbitrase Internasional
20 Desember 2013**

**IN THE MATTER OF
THE INDUS WATERS KISHENGANGA ARBITRATION**

-before-

**THE COURT OF ARBITRATION CONSTITUTED
IN ACCORDANCE WITH THE INDUS WATERS TREATY 1960
BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA
AND THE GOVERNMENT OF PAKISTAN
SIGNED ON 19 SEPTEMBER 1960**

-between-

THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

-and-

THE REPUBLIC OF INDIA

FINAL AWARD

COURT OF ARBITRATION:

**Judge Stephen M. Schwebel (Chairman)
Sir Franklin Berman KCMG QC
Professor Howard S. Wheeler FREng
Professor Lucius Caflisch
Professor Jan Paulsson
Judge Bruno Simma
H.E. Judge Peter Tomka**

SECRETARIAT:

The Permanent Court of Arbitration

20 December 2013

46. According to India, any minimum flow greater than 4.25 cumecs would seriously compromise the economic viability of the KHEP.⁶⁹ Examining a 90-percent dependable (dry) year (on the basis of which the KHEP was designed), India submits that a minimum release of 20 cumecs would render the KHEP inoperable for three months of the year, while Pakistan's 100-cumec release would prevent the KHEP from operating for 10 months of the year.⁷⁰ On the whole,

India argues, “Pakistan’s minimum release scenarios of 10 cumecs and above would cause the KHEP to operate below its design discharge for between 60% and 95% of the time, a result that simply would not respect India’s priority of right to the waters.”⁷¹

47. Even with a minimum flow of 10 cumecs, India submits that during a 90-percent dependable (dry) year, the KHEP would suffer a significantly larger percentage loss of generating capacity than would the NJHEP. “Given that the Court has ruled that the KHEP has priority in right over the NJHEP with respect to the use of the waters of the river for hydro-electric power generation,” India argues, “it is impossible to justify a 10 cumec minimum release, let alone higher releases.”⁷²
48. With a minimum release of 7.2 cumecs during a 90-percent dependable (dry) year, India notes, the percentage loss at the two plants would be equal (at 11.2 percent). Nevertheless, in India’s view,

even this 7.2 cumec scenario would result in the KHEP being able to operate at its design discharge for only four months of the year – a result that would run counter to the Court’s admonition that the KHEP must not be made to operate at only a small fraction of its design capacity. Moreover, a minimum release of 7.2 cumec would also not reflect the Court’s finding that the KHEP has priority in right to the waters, a factor which strongly militates in favour of a lower minimum release, and the fact that Pakistan’s losses have been overstated as a result of its new claim and the use of non-Treaty flow data.⁷³

55. By comparison with its earlier submissions, Pakistan has expanded its team of experts to include a hydraulics specialist and specialists in sedimentology and geomorphology and has increased its range of indicators in light of the Court’s ruling on drawdown flushing in its *Partial Award*.⁸⁹ Pakistan’s experts have also developed 17 flow scenarios (corresponding to those discussed above in relation to power generation). In addition to the current baseline condition, a maximum diversion scenario, and the 3.94-cumec release identified by India during the merits hearing, Pakistan’s experts have evaluated minimum releases between 10 and 100 cumecs (in increments of 10 cumecs),⁹⁰ percentage-based scenarios in which between 10 and 90 percent of the flow at the KHEP would be passed downstream,⁹¹ and two variable release scenarios in which the downstream release would vary by season and between dry and normal years.⁹² As in previous submissions, each scenario was evaluated for effects at the Line of Control, at the NJHEP site at Nauseri, and at Dudhnial (halfway between the Line of Control and Nauseri).
59. Turning to India’s environmental submission, Pakistan is critical. First, in Pakistan’s view, India’s decision to analyse minimum flows only below 10 cumecs is inconsistent with the Court’s request.⁹⁶ Second, Pakistan notes that the release of 4.25 cumecs mandated by the Indian Ministry of Environment & Forests “is not supported by any reasoning, either in the October 2012 decision of India’s Ministry of Environment and Forests or in India’s submission.”⁹⁷ Finally, Pakistan considers that India’s most recent environmental analysis suffers from the same problematic absence of methodology that, in Pakistan’s view, characterized India’s earlier environmental reports and failed to stand up to scrutiny during the cross-examination of India’s experts.⁹⁸ Rather than provide new data, Pakistan argues that India has simply tried to “retrieve this situation” through a further report from the same experts, accompanied by additional peer reviews.⁹⁹

India's Arguments

62. In approaching the question of the environmental effects of the KHEP, India first notes that the Indian Ministry of Environment & Forests has fixed a minimum flow of 4.25 cumecs for the KHEP.¹⁰⁵ According to India, this figure was set after a process that considers "all the relevant environmental and socio-economic factors" leading to results that vary from project to project.¹⁰⁶ India further notes that the 4.25-cumec minimum was fixed before India was aware that the Court would request further environmental data.¹⁰⁷

Pakistan's Arguments

71. Pakistan submits that "[w]hatever flow regime is ordered by the Court, it is vital that it be accompanied by an adequate monitoring regime."¹³⁴ Pakistan therefore requests

an order from the Court that the flow regime be supported by India providing to Pakistan, on a real time basis, (i) daily flow data from gauges recording the inflow into the KHEP reservoir and the outflow below the KHEP dam, as well as (ii) the reservoir level, and (iii) with regular inspections permitted to Pakistan of the gauging stations.¹³⁵

India's Arguments

72. India objects to Pakistan's request and submits that "such inspection on the territory of another State is unprecedented and beyond the scope of the inspection regime agreed by the Parties in the Treaty."¹³⁶

V. DECISION

Having considered the Parties' submissions, the Court of Arbitration unanimously decides:

- A. In the operation of the KHEP:
- (1) Subject to paragraph (2) below, India shall release a minimum flow of 9 cumecs into the Kishenganga/Neelum River below the KHEP at all times at which the daily average flow in the Kishenganga/Neelum River immediately upstream of the KHEP meets or exceeds 9 cumecs.
 - (2) At any time at which the daily average flow in the Kishenganga/Neelum River immediately upstream of the KHEP is less than 9 cumecs, India shall release 100 percent of the daily average flow immediately upstream of the KHEP into the Kishenganga/Neelum River below the KHEP.
- B. Beginning 7 years after the diversion of water from the Kishenganga/Neelum River for power generation by the KHEP, either Party may seek reconsideration of the minimum flow in paragraph (A) above through the Permanent Indus Commission and the mechanisms of the Treaty.
- C. This Final Award imposes no further restrictions on the operation of the KHEP, which remains subject to the provisions of the Treaty as interpreted in this Final Award and in the Court's *Partial Award*.
- D. Each Party shall bear its own costs. The costs of the Court will be shared equally by the Parties.

Sumber: "In The Matter of The Indus Waters Kishanganga Arbitration" *Final Award*, tersedia

dalam https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pca-cpa.org%2Fshowfile.asp%3Ffil_id%3D2471&ei=WX6pU7_pCMvn8AWOt4J4&usg=AFQjCNFIMAN8OaAnDlnzWMAn-WDLWsAHA&sig2=Gakng354JlizfvMC_48qbw&bvm=bv.69620078.d.dGc (diakses pada 18 Juni 2014).